



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH KASUS O'KEEFE TERHADAP  
KEBIJAKAN AUSTRALIA PUTIH  
TAHUN 1947-1949**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Humaniora**

**ACHMAD DEDI FAOZI  
0606086722**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
KEKHUSUSAN SEJARAH WILAYAH AUSTRALIA  
DEPOK  
JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENGARUH KASUS O'KEEFE TERHADAP  
KEBIJAKAN AUSTRALIA PUTIH  
TAHUN 1947-1949**

**SKRIPSI**

**ACHMAD DEDI FAOZI  
0606086722**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
KEKHUSUSAN SEJARAH WILAYAH AUSTRALIA  
DEPOK  
JULI 2010**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Achmad Dedi Faozi**

**NPM : 0606086722**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 21 Juni 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Achmad Dedi Faozi  
NPM : 0606086722  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul Skripsi : Pengaruh Kasus O'Keefe Terhadap Kebijakan  
Australia Putih Tahun 1947-1949

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Wardiningsih S.S., M.A., Ph.D.

Pembimbing : Dr. Ita Syamtasyah Ahyat S.S., M.Hum

Penguji : Abdurakhman M.Hum

Penguji : Didik Pradjoko S.S., M.Hum

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 21 Juni 2010

Oleh

Dekan  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

  
Dr. Bambang Wibawarta  
NIP. 19651023 199003 1 002

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum, Wr. Wb. Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan segala nikmat, kemudahan dan kesehatan kepada hamba, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad S.A.W., sebagai sosok yang menjadi teladan dan panutan bagi penulis dalam menjalani kehidupan ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga penulisan ini dapat dirampungkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bpk. Abdurrahman M.Hum., sebagai koordinator Program Studi Ilmu Sejarah yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menjalankan studi di Program Studi ini, sehingga penulis dapat merampungkan studi sampai pada tahap penulisan skripsi.

Terima kasih juga penulis tujukan kepada Ibu Wardiningsih Soerjohardjo, Ph.D selaku pembimbing skripsi penulis, yang selama ini sangat sabar dalam membimbing penulis dalam studi di kajian Australia, maupun dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada beliau karena telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa dan memberikan sarannya dalam tahap penulisan skripsi ini, serta ilmu dan dukungan yang telah beliau berikan selama perkuliahan di kajian Australia.

Terima kasih juga penulis tujukan kepada Bpk. Kresno Brahmantyo, S.S sebagai dosen kajian wilayah Australia yang selama ini telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis selama perkuliahan. Sangat tidak mudah untuk menentukan tema skripsi, apalagi jika semua tema menjadi hal yang menarik untuk ditulis khususnya mengenai Australia. Namun, ketika Bpk. Kresno mengajukan gagasan agar penulis sebaiknya menulis tentang kasus O'Keefe di Australia. Hal itu ternyata merupakan sebuah tema yang sangat menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi guna memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana. Terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh bapak/ibu Dosen Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Indonesia atas ilmu yang telah disampaikan kepada

penulis selama perkuliahan, juga dalam tahap proses pengerjaan dan pengujian skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga di rumah. Mama yang selalu mendoakan, juga memberikan dukungan dan sarannya, sehingga penulisan skripsi ini cepat selesai. Bapak yang telah memberikan dukungannya selama perkuliahan, baik materi maupun moril, karena dengan kerja keras, kemauan yang kuat dan dukungan beliau, penulis dapat merampungkan perkuliahan di Program Studi Ilmu Sejarah. Kepada kakakku ( Dwi, Indah, dan Wawan) dan keponakanku yang lucu (Alya) yang telah memberikan semangat, nasehat, dan segala hal, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Juga terima kasih penulis tujukan kepada seluruh keluarga besar di Surabaya, Tasikmalaya, Bekasi dan Lampung.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2006 Program Studi Ilmu Sejarah, para sahabatku seperjuangan. Demikian juga kepada teman-teman se-kajian wilayah Australia, Amal, Ratna, Winda, dan angkatan 2005, 2007, 2008 saya ucapkan terima kasih. Keluarga besar Kopma, khususnya para pengurus Kopma periode 2009, terima kasih atas pengalaman berorganisasi yang telah kalian berikan. Kemudian, terima kasih saya tujukan juga kepada pegawai Kopma, Sam, mas Yo, mas Lukman, mas Gino, mas Fajar, mba Vivi. Keluarga Besar CEDS UI 2007-2008, Keluarga Besar kost-an Pondok Harapan dan juga semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis menginginkan adanya kritik dan saran yang membangun, agar penulis dapat lebih baik dalam penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga penulisan ini juga dapat menambah penulisan tentang sejarah Australia di Indonesia, yang selama ini masih sangat sedikit dan juga dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Wassalam,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Dedi Faozi  
NPM : 0606086722  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGARUH KASUS O'KEEFE TERHADAP KEBIJAKAN AUSTRALIA  
PUTIH TAHUN 1947-1949**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 21 Juni 2010  
Yang menyatakan

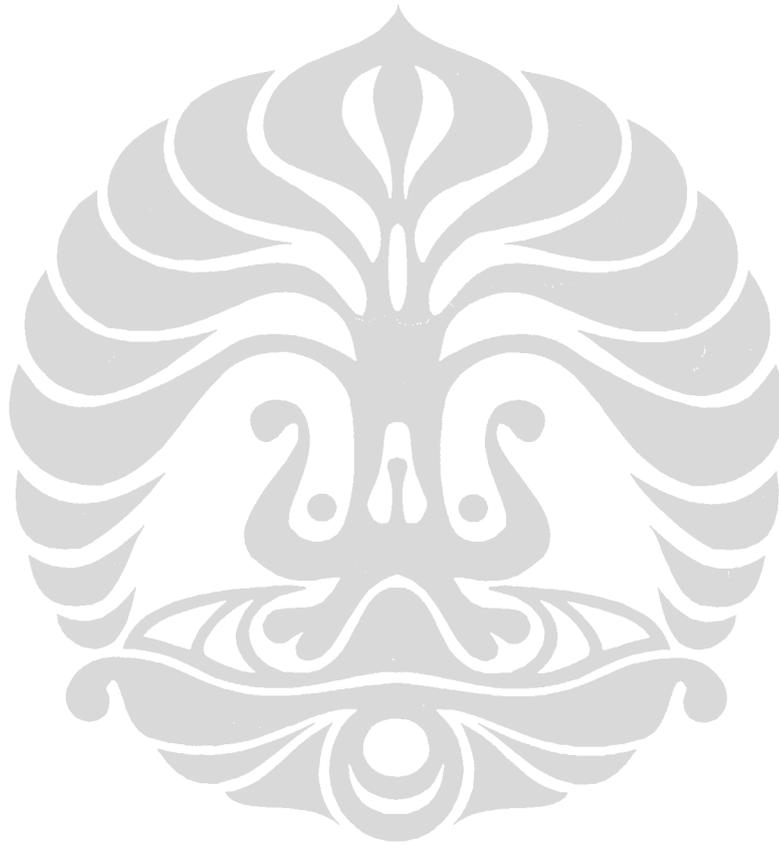


( Achmad Dedi Faozi )

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.6 Sumber Sejarah.....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 KEBIJAKAN AUSTRALIA PUTIH</b> .....	<b>12</b>
2.1 Sejarah dibentuknya Kebijakan Australia Putih.....	12
2.2 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi Terhadap Kulit Berwarna .....	20
2.2.1 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi pada Masa Demam Emas menuju Masa Federasi.....	21
2.2.2 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi dari Masa Federasi ke Perang Dunia Kedua.....	21
2.2.3 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi pada Masa Akhir Perang Dunia Kedua.....	25
<b>BAB 3 KASUS O'KEEFE</b> .....	<b>29</b>
3.1 Profil Keluarga Annie Maas Jacob O'Keefe.....	29
3.2 Perjuangan Mrs.O'Keefe Menentang Deportasi.....	34
3.2.1 Argumen Pihak Pemerintah Australia Terhadap Kasus O'Keefe.....	35
3.2.2 Argumen Pihak Keluarga O'Keefe Terhadap Kebijakan Deportasi.....	37
3.2.3 Perdebatan Antara Pihak O'Keefe dan Pemerintah di Pengadilan Tinggi Australia.....	40
3.2.4 Keputusan Pengadilan Tinggi Australia Terhadap Kasus O'Keefe.....	43
3.3 Respon Masyarakat dan Pemerintah Australia Terhadap Kasus O'Keefe.....	46
3.3.1 Respon Masyarakat Australia.....	46
3.3.2 Respon Pemerintah Australia.....	52
3.3.3 Respon Masyarakat Luar Negeri.....	54

<b>BAB 4 DAMPAK KASUS O'KEEFE TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA.....</b>	<b>57</b>
4.1 Hubungan Masyarakat Australia dengan Pemerintah.....	57
4.2 Hubungan Luar Negeri antara Australia dan Belanda.....	60
4.3 Dinamika Politik antara Pemerintah Buruh dan Pihak Oposisi (Liberal) Terhadap Kasus O'Keefe.....	63
4.3.1 Kekalahan Partai Buruh dalam Pemilihan Umum Tahun 1949.....	69
4.4 <i>Wartime Refugee Removal Act</i> Tahun 1949.....	70
<b>BAB 5 KESIMPULAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

<b>ACTU</b>	<b>: Australian Council of Trade Union</b>
<b>ALP</b>	<b>: Australian Labor Party</b>
<b>CP</b>	<b>: Country Party</b>
<b>LP</b>	<b>: Liberal Party</b>
<b>IRO</b>	<b>: International Refugee Organization</b>
<b>PBB</b>	<b>: Perserikatan Bangsa-Bangsa</b>
<b>PM</b>	<b>: Perdana Menteri</b>
<b>UNHCR</b>	<b>: United Nations High Commissioner for Refugees</b>
<b>HoR</b>	<b>: House of Representative</b>
<b>LP</b>	<b>: Liberal Party</b>
<b>CP</b>	<b>: Country Party</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Populasi Imigran yang diterima Australia Tahun 1945.....18

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penemuan Emas Di Australia.
- Lampiran 2. Ilustrasi Cara Bekerja Orang Cina Di Ladang Emas.
- Lampiran 3. Lencana *White Australia*.
- Lampiran 4. Immigration Restriction Act 1901.
- Lampiran 5. Kedatangan Para Imigran dari Eropa Dalam Program *Assisted Immigration*.
- Lampiran 6. Artikel dukungan salah satu masyarakat Australia terhadap perjuangan Mrs. Annie O'Keefe di koran *Christian Science Monitor* tanggal 12 April 1949.
- Lampiran 7. Foto keluarga O'Keefe
- Lampiran 8. Foto Arthur Calwell
- Lampiran 9. Foto Perdana Menteri J.B.Chifley
- Lampiran 10. Foto Robert Menzies
- Lampiran 11. Contoh *Certificate of Exemption*
- Lampiran 12. Surat Deportasi dari Pemerintah Australia terhadap Mrs. Annie O'Keefe
- Lampiran 13. Argumen Calwell terhadap kasus O'Keefe
- Lampiran 14. Argumen O'Keefe terhadap kebijakan deportasi

Lampiran 15. Perdebatan antara pihak O'Keefe dan Pihak Calwell

Lampiran 16. Daftar nama donatur warga kota Sydney dalam acara

pengumpulan dana koran Sydney Daily Telegraph terhadap keluarga O'Keefe.

Lampiran 17. Daftar Nama Donatur karyawan Cafe yang membantu

pengumpulan dana bagi keluarga O'Keefe.

Lampiran 18. Pemberitaan koran Indonesia mengenai kasus O'Keefe

Lampiran 19. Surat salah satu pendukung O'Keefe kepada Perdana Menteri

Chifley.

Lampiran 20. Pidato Calwell Yang Membahas Revisi Immigration Act 1949 dan

War Time Refugee Removal Act 1949

## GLOSSARIUM

- Aliens Act* : Undang-Undang mengenai warga asing yang ada di Australia
- Anglo Japanese Treaty of Commerce and Navigation* : Perjanjian perdagangan dan pelayaran antara pihak Inggris dengan Jepang yang disahkan pada tanggal 16 Juli 1894.
- Archibishop* : Sebutan bagi Pendeta Gereja Presbyterian

- Assisted Immigration* : Program Imigrasi bantuan Pemerintah Australia yang bertujuan untuk menambah jumlah penduduknya.
- Blackbirding* : Teknik pemaksaan yang digunakan Australia untuk menculik atau mengambil orang-orang Kanaka yang akan diperkerjakan di Perkebunan Australia.
- British Subject* : Istilah mengenai status bagi setiap orang yang lahir di wilayah kerajaan Inggris dan negara Persemakmuran Inggris. Untuk menjadi seorang *British Subject* harus dilahirkan di dalam wilayah kedaulatan Kerajaan Inggris. Pengecualian terhadap istilah tersebut merujuk kepada anak-anak para duta besar asing yang mengambil kewarganegaraan dari pihak negara ayah mereka berasal.
- Buckland River* : Kerusuhan yang terjadi di Sungai Buckland, pada bulan Juli 1857. Antara imigran kulit putih dengan imigran Cina.
- Certificate of Exemption* : Sertifikat khusus bagi para imigran Asia, yang hanya dapat diperoleh setelah penggunaan permohonan dan perluasan biaya administrasi sudah dipenuhi untuk dapat tinggal di Australia.
- Chinese Immigration Restriction Act* : Undang-Undang pembatasan imigrasi Cina
- Country Party* : Salah satu Partai Australia yang

dibentuk pada tahun 1920, akibat adanya protes terhadap perlakuan Pemerintah bagi para petani pedesaan. Partai Country merupakan koalisi dari Partai Liberal.

<i>Coloured Races Restriction and Regulations Bills</i>	:	Undang-Undang pembatasan bagi imigran kulit berwarna
<i>Dictation Test</i>	:	Tes dikte
<i>Digger</i>	:	Suatu istilah dalam terminologi sejarah Australia, yaitu seorang penambang emas pada era Gold Rush di koloni-koloni Australia.
<i>Domicile Right</i>	:	Hak untuk tinggal bagi imigran di Australia
<i>Draft Bill of 1888</i>	:	Rancangan Undang-Undang tahun 1888
<i>Groupers</i>	:	Sebutan bagi para pemimpin Serikat Buruh
<i>House of Representative</i>	:	Parlemen Australia
Imigran Kulit Berwarna	:	Istilah lain bagi imigran non-kulit putih atau Eropa yang merujuk pada orang Asia, dan Pasifik.
<i>Immigration Act</i>	:	Undang-Undang Imigrasi
<i>Immigration Restriction Act</i>	:	Undang-Undang pertama dan paling mendasar tentang imigrasi yang disahkan pada tanggal 23 Desember 1901.
<i>International Refugee Organization (IRO)</i>	:	Organisasi Pengungsi Internasional (IRO) didirikan pada tanggal 20 April 1946 untuk menangani masalah pengungsi akibat adanya Perang Dunia Kedua. Delapan belas negara yang menjadi anggota IRO adalah: Australia, Belgia, Kanada, Cina, Denmark, Republik

Dominika, Perancis, Guatemala, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swiss, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Venezuela.

- Kebijakan Asimilasi : Sebuah istilah kebijakan yang digunakan untuk menggambarkan menyatunya masyarakat minoritas ke dalam masyarakat yang lebih luas. Istilah tersebut digunakan sejak tahun 1940-an sampai akhir tahun 1960-an dalam kaitannya dengan imigran non-Inggris yang ketika itu diasumsikan akan memblenda ke dalam masyarakat mayoritas kulit putih Australia.
- Lambing Flat* : Kerusuhan yang terjadi di Lambing Flat sebagai bentuk serangkaian demonstrasi anti-Cina oleh imigran kulit putih yang terjadi di wilayah Burrangong, di New South Wales, pada tahun 1860-1861.
- Natal's Immigration Restriction Act* : Adalah Undang-Undang pembatasan imigrasi di Negara Afrika Selatan yang mengilhami pembuatan Immigration Restriction Act di Australia.
- Nationality and Citizenship Act* : Undang-Undang Kewarganegaraan
- Neighborhood Committes* : Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Australia dalam menerima imigran asing yang masuk ke Australia.
- Partai Buruh Australia (ALP) : Partai Buruh Australia dibentuk diakhir abad ke-19, setelah terjadi suatu pemogokan besar-besaran oleh massa buruh yang menentang majikan.

Sebelumnya, pada saat Parlemen Federal mulai berkembang, partai Buruh adalah kekuatan kecil dari tiga partai yang ada. Dua partai lainnya adalah kaum proteksionis, serta partainya kaum Liberal dan Free-Trade, ketiga partai tersebut lebih kearah kaum konservatif.

**Partai Liberal Australia (LP)** : Partai Liberal Australia, dibentuk pada saat munculnya gerakan pasukan non Buruh di Australia yang hanya dipersatukan dalam satu partai di tingkat persemakmuran antara tahun 1909 dan 1918. Pemberian nama Partai Liberal bagi gerakan non Buruh tersebut diperoleh dari setiap Negara bagian Australia yang mengkombinasikan kata menjadi Partai Liberal, dari kata ‘nasional’, ‘masyarakat’, ‘demokratis’ dan ‘bersatu’.

*Premier* : Sebutan bagi kepala daerah atau Gubernur di Negara Bagian Australia

*Presbyterian* : Adalah Gereja Kristen yang mengikuti tradisi teologi Calvinis dalam Protestanisme. teologi Presbyterian biasanya menekankan kedaulatan Allah, otoritas Alkitab, dan perlunya kasih karunia melalui iman di dalam Kristus.

*Polynesian Labourers Act* : Undang-undang pembatasan bagi para Buruh imigran Polinesia

<i>Prohibited Immigrant</i>	: seseorang yang memasuki negara lain melalui cara-cara yang tidak sah, tidak dilengkapi dokumen keimigrasian sesuai yang berlaku, bertempat tinggal melampaui ijin tinggal yang ditetapkan dalam visa, maupun seseorang yang bekerja tanpa ijin resmi dari pemerintah setempat.
<i>Refugee</i>	: Seseorang yang berada di luar negaranya atau tempat tinggal menetapnya, yang terancam keselamatannya (risiko terhadap tindak kekerasan), karena latar belakang ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya dalam kelompok sosial atau politik tertentu, dan tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan perlindungan dari negara tersebut, atau kembali ke negara tersebut karena adanya ancaman tindak kekerasan.
<i>Temporary Residence</i>	imigran sementara.
<i>The Australian Conservation Foundation</i>	: yayasan konservasi Australia yang mendukung Kebijakan deportasi Calwell.
<i>The Commonwealth of Australia</i>	: Negara Persemakmuran Australia
<i>The Commonwealth Naturalisation Act</i>	: Undang-Undang naturalisasi Persemakmuran Australia
<i>The Commonwealth Migration Officer</i>	: Petugas dari Departemen imigrasi Australia
<i>The Freezing of Union Fund Legislation</i>	: Kebijakan tentang pembekuan dana upah bagi para Buruh Australia
<i>The High Court of Australia</i>	: Pengadilan Tinggi Australia

- The Hills for the Immigration Act* : Rancangan Undang-Undang Imigrasi
- The Pasific Island Labourers Act* : Undang-Undang pembatasan imigrasi bagi para buruh dari Pulau Pasifik yang dirancang untuk memfasilitasi kebijakan deportasi para imigran buruh Pasifik yang bekerja di Australia.
- The Western Australia Marriage Bill* : Undang-Undang pernikahan Negara bagian Australia Barat
- War Time Refugee Removal Act* : Undang-Undang untuk mendeportasi pengungsi yang datang ketika berlangsungnya perang
- White Australia* : Australia Putih
- Xenophobia* : Sebuah sikap masyarakat Australia yang selalu khawatir terhadap setiap perkembangan yang muncul dari kawasan Asia Tenggara serta imigran asal Asia.

## ABSTRAK

Nama : Achmad Dedi Faozi  
Program Studi : Ilmu Sejarah  
Judul : Pengaruh Kasus O'Keefe Terhadap Kebijakan Australia Putih Tahun 1947-1949

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kasus O'Keefe terhadap Kebijakan Australia Putih. Pembahasan penulisan ini dimulai ketika pada tahun 1947, dengan adanya kebijakan deportasi yang berdasarkan Kebijakan Australia Putih oleh Menteri imigrasi Australia A.A.Calwell terhadap Mrs. Annie O'Keefe seorang pengungsi perang asal Indonesia. Kebijakan deportasi tersebut dimulai pada saat Mrs. Annie menerima surat resmi dari Pemerintah yang isinya memerintahkan Mrs. Annie dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan Australia. Mrs. Annie yang telah menikah dengan suami berwarga negara Australia bernama Mr. John O'Keefe merasa bahwa dirinya tidak bisa dideportasi oleh Pemerintah Australia. Perjuangan Mrs.O'Keefe melawan kebijakan deportasi tersebut telah menyebabkan munculnya simpati dari masyarakat Australia. Dengan adanya dukungan dari masyarakat Australia tersebut telah membuat posisi Pemerintah yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Buruh mengalami beberapa masalah. Akhirnya pada tahun 1949 terjadi perubahan kebijakan politik terhadap peraturan imigrasi di Australia bagi para imigran kulit berwarna terutama Asia. Dapat dikatakan bahwa kasus O'Keefe adalah kasus bagi imigran kulit berwarna sebagai bentuk pertentangan terhadap sikap Pemerintah dalam menjaga eksistensi Kebijakan Australia Putih di Australia.

Kata Kunci: Kebijakan Australia Putih, kasus O'Keefe, imigran kulit berwarna, kebijakan imigrasi, dan deportasi.

## ABSTRACT

Name : Achmad Dedi Faozi  
Study Program : History of Science  
Title : The Influence of O'Keefe Case Towards White Australia Policy in 1947-1949

This thesis discusses the influence of O'keefe case towards White Australia Policy. This writing discussion is begun when in the year 1947, with deportation policy existence based on White Australia Policy by Minister of immigration Australia A.A. calwell towards Mrs. Annie O'keefe an indonesian wartime refugee. Deportation policy begun that Mrs. Annie get official letter from government its contents commands Mrs. Annie and the childrens to leave from Australia. Mrs. Annie had married with husband Australian citizen has named Mr. John O'keefe felt that self can't be deported by Australian Government. Mrs. O'keefe struggle oppose deportation policy causes sympathy appearance from Australian society. The existence support from Australian society make Government position which is on moment that dominated by labour has experienced several problems. Final in the year 1949 happen policies change towards immigration regulation at Australian to all coloured immigrant especially Asia. That the O'keefe case for coloured immigrant as discord form towards Government attitude in watch over white Australia Policy existence in Australia.

Key words: White Australia Policy, O'Keefe case, coloured immigrant, immigration policy, and deportation.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 1 Januari tahun 1901, enam koloni negara bagian Australia berkumpul bersama dan memunculkan kesepakatan untuk berfederasi menjadi *The Commonwealth of Australia*.<sup>1</sup> Bersamaan dengan itu pula, disepakati juga lahirnya *Immigration Restriction Act*, yakni Undang-Undang yang mengatur dan membatasi imigran yang masuk ke Australia bagi para imigran yang berasal dari wilayah Asia dan Pasifik. Undang-Undang pembatasan tersebut terutama didasarkan atas ras sehingga kebijakan ini lebih dikenal dengan nama Kebijakan Australia Putih (*White Australia Policy*).

Parlemen Australia tidak pernah mengesahkan Undang-Undang yang bernama *White Australia*. Sebutan tersebut hanyalah kebijakan Pemerintah Federal berdasarkan *Immigration Act*<sup>2</sup>, yang mengadopsi kebijakan negara bagian New South Wales, Victoria dan Queensland yang melarang kehadiran imigran Cina dan Kanaka ke Australia.<sup>3</sup> Sebenarnya, hal tersebut merupakan suatu dilema bagi Australia. Di satu sisi mereka membutuhkan banyak orang untuk membangun negaranya dengan biaya yang murah dan menguntungkan. Namun, disisi lain mereka memusuhi orang-orang yang mereka butuhkan itu dengan

---

<sup>1</sup> Departement of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs, *Australia and Immigration 1788 to 1988*, Canberra: Australia Government Publishing Service, 1988, hlm .21.

<sup>2</sup> Pada saat *Immigration Act* disahkan pada Bulan Desember 1901, di Australia sudah terdapat 30.000 orang imigran Cina. Mereka merupakan imigran Non Eropa yang terbesar yang berlanjut hingga masa berikutnya. Adanya berbagai undang-undang yang disahkan Parlemen adalah dalam rangka mencegah atau menggeser imigran kulit berwarna agar tidak menjadi warga negara Australia yang permanen. Namun, keberadaan imigran Cina dalam jumlah besar sangat menyulitkan efektifitas Kebijakan Australia Putih. Sebagian dari mereka telah memperoleh naturalisasi (kewarganegaraan) berdasarkan hukum koloni. Sebagian lainnya terdapat hak untuk menetap (*domicile right*). A.C. Palfreeman, *The Administration of The White Australia Policy*, Melbourne University Press, 1967, hlm.81 dan 167.

<sup>3</sup> Kenneth Rivett,ed, *Immigration Control or Colour Bar? The Background to 'White Australia' and a Proposal For Change by The Immigration Reform Group*, Victoria: Melbourne University Press,1962, hlm.140.

menanamkan sikap rasialis<sup>4</sup> terhadap orang-orang Cina dan Kanaka<sup>5</sup>. Hal inilah yang memunculkan konflik antara imigran non-Eropa dengan masyarakat kulit putih Australia yang mendominasi arena politik dalam negeri Australia sejak Federasi dibentuk.

Kebijakan Australia Putih semakin berkembang pelaksanaannya hingga masa-masa berikutnya. Pemerintahan Australia yang silih berganti kepemimpinannya mengutamakan kebijakan tersebut terhadap segala peraturan yang diputuskannya. Hal ini terlihat pada saat Perang Dunia Kedua (1939-1945) terjadi, sekitar 6.269 orang pengungsi dari Asia yang sebagian besar berasal dari Indonesia dan Melayu mengungsi ke Australia, sebagai akibat dari penaklukan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Mereka diberikan ketentuan istimewa dari Pemerintah Australia yang ketika itu dipimpin oleh Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley melalui peraturan *Immigration Restriction Act* yang mengizinkan mereka untuk mengungsi dan tinggal sementara di Australia, dengan ketentuan jika kondisi wilayah mereka sudah aman, mereka diharuskan untuk kembali ke wilayah negara mereka masing-masing setelah perang berakhir.<sup>6</sup> Namun, kehadiran para pengungsi tersebut tidak secara mudah masuk ke Australia. Hal itu didasarkan adanya kebijakan bahwa imigran asal Asia harus mempunyai *Certificate of Exemption*<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa mereka diizinkan untuk tinggal sementara di Australia, bukan untuk menetap.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Rasial berasal dari kata ras. Pada mulanya kata 'ras' umum dipakai untuk identifikasi dan penamaan sekelompok orang yang punya karakteristik tertentu dan berbeda dengan yang lainnya. Identifikasi tersebut umumnya berdasarkan 2 kriteria, yaitu:

1) Biologis, seperti warna kulit, ukuran badan, ukuran kepala, bentuk rambut dan sebagainya;  
2) Budaya, seperti etnisitas, agama, kebangsaan, dan sebagainya. Keith McConnochie dkk, *Race and Racism in Australia*, NSW: Social Science Press, 1989, hlm.3-4

<sup>5</sup> Menurut *Macquarie Dictionary*, kata Kanaka secara luas digunakan di Australia sebagai istilah yang bersifat ofensif terhadap imigran asal Kepulauan Pasifik. Hal ini didasarkan oleh adanya pandangan bahwa sebagian besar "Kanakas" di Australia adalah orang-orang dari Melanesia, Polinesia, dan termasuk beberapa wilayah di Hawaii. Berdasarkan Undang-Undang *Pacific Island Labourers Act 1901*, yang menyatakan bahwa Pemerintah Australia mendeportasi para buruh asal kepulauan Pasifik ke tempat asal mereka antara tahun 1906-1908. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Kanakas>, diunduh pada hari rabu, tanggal 23 Juni 2010, pukul 14.30 WIB).

<sup>6</sup> Kevin Blackburn. "Disguised anti-Colonialism: protest against the White Australia Policy in Malaya and Singapore, 1947-1962". *Australian Journal of International Affairs*, Vol.55, No.1, pp.101-117, 2001. Style Sheet. [www.google.co.au](http://www.google.co.au), (diunduh pada Hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2009, Pukul 15.15 WIB).

<sup>7</sup> Dalam kasus ini, Departemen Imigrasi mempunyai wewenang untuk memberi izin tinggal sementara dan sekaligus berkewajiban menegakkan undang-undang mengenai imigran sementara

Begitu pula setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, Kebijakan Australia Putih diwujudkan dengan adanya penerapan kebijakan asimilasi oleh Pemerintah Chifley. Mereka menerapkan kebijakan tersebut melalui program bantuan untuk para imigran dan pengungsi yang datang ke Australia. Menteri Imigrasi Australia (*the Australian ministry of Immigration*) yang ketika itu dijabat oleh Arthur Calwell pada tahun 1947, memutuskan untuk mendeportasi para pengungsi asal Asia dan mendatangkan para pengungsi asal Eropa. Namun, sekitar 5500 orang pengungsi yang berasal dari Asia, sepertiga dari total jumlah pengungsi Asia menginginkan untuk tetap tinggal di Australia, walaupun perang tersebut telah usai.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, Calwell mulai mengambil tindakan keras berdasarkan Kebijakan Australia Putih yang isinya mengenai penolakan Australia terhadap para pemukim Asia dengan cara melakukan penangkapan dan deportasi terhadap para pengungsi Asia yang tidak mau meninggalkan wilayah Australia.

Tindakan keras yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap para pengungsi Asia, telah memunculkan beberapa kasus yang menjadi perhatian media Australia<sup>10</sup>. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus pendeportasian keluarga pengungsi dari Hindia Belanda, yang terdiri dari Ibu (Mrs. Annie Maas Jacob O'Keefe) dan 8 anaknya (Mary Jacob, Peter Jacob,

---

itu meninggalkan Australia setelah izin tinggal sementara habis. Sertifikat itu membebaskan imigran dari kewajiban untuk mengikuti tes bahasa. Jika para imigran berkehendak untuk menetap secara permanen, maka ia harus mengikuti tes bahasa. Geoffrey Sherington, *Australia Immigrants*, Sydney: George Allen and Unwin, 1982, hlm.122.

<sup>8</sup> Jack Collins, *Migrant Hands in a Distant Land: Australia Postwar Immigration*, NSW: Pluto Press Australia, 1988), hlm. 355.

<sup>9</sup> "The Demise of the White Australia Policy". Policy Fact Sheet, [Http://www.ironbarks-resources.com](http://www.ironbarks-resources.com), (diunduh pada Hari Minggu, Tanggal 29 Maret 2009, Pukul 19.05 WIB).

<sup>10</sup> Pada Bulan November 1947, Calwell, melakukan suatu kebijakan untuk mengusir 43 Orang Nelayan Melayu dari Australia. Dari 14 orang yang telah dideportasi memiliki isteri orang Australia dan telah berkeluarga, hal tersebut mendasari pernyataan Calwell sebagai awal buruknya hubungan masyarakat Australia dengan Pemerintah, yaitu dengan menyatakan bahwa dengan diusirnya orang Melayu tersebut akan menambah jumlah perlakuan yang bersifat diskriminatif, jika mereka (para nelayan) diijinkan untuk tetap tinggal di Australia dan membentuk perkawinan atau ikatan keluarga dengan perempuan Australia. Pernyataan Calwell tersebut dianggap oleh orang Australia telah menciptakan suatu perpecahan dalam keluarga para imigran Asia. (Chris Anderson, "The Demise of the White Australia Policy". Policy Fact Sheet. [Http://www.ironbarks-resources.com](http://www.ironbarks-resources.com), diunduh pada Hari Minggu, Tanggal 29 Maret 2009, Pukul 19.05 WIB). Pada tanggal 14 Juni 1949, dari surat kabar *Strait Times* di Filipina, anggota dari kongres Filipina mengajukan protes terhadap tindakan Pemerintah Australia yang telah mendeportasikan Sersan Gamboa yaitu orang Filipina keturunan Amerika dari Australia. ("Disguised anti-Colonialism: protest against the White Australia Policy in Malaya and Singapore, 1947-1962". [www.google.co.au](http://www.google.co.au), Loc.Cit).

Annie Jacob, Tineka Jacob, Johanna Jacob, Nicolene Jacob, Adolf Laazer Jacob, dan William Jacob) pada tahun 1949, yang dikenal sebagai “Kasus O’Keefe”. Mrs. Annie adalah seorang pengungsi asal daerah Manado, dia beserta delapan anaknya yang datang ke Australia sebagai pengungsi bersama suaminya Samuel Jacob asal Ambon yang merupakan seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda ketika pecah perang pasifik (Perang Dunia Kedua terjadi). Setelah suaminya meninggal, dia kemudian menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan Australia bernama John William O’Keefe. Pada waktu itu Menteri Imigrasi Australia memerintahkan Mrs. Annie dan keluarganya untuk pergi dari Australia karena dianggap sebagai “Imigran Ilegal (*Prohibited Immigrant*)”.<sup>11</sup>

Pada tanggal 9 Februari tahun 1949, Calwell berhasil membawa kasus O’Keefe ke dalam Pengadilan Tinggi Australia (*High Court of Australia*).<sup>12</sup> Pada saat Calwell membawa masalah tersebut terdapat kecaman dari masyarakat Australia yang mendukung keluarga O’Keefe agar tidak dideportasi dari wilayah Australia. Dukungan dari masyarakat Australia tersebut dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada Pemerintah Australia. Selain itu, terdapat juga peran dari media massa dengan cara mengeluarkan opini terhadap kasus tersebut yang secara tidak langsung juga mendukung perjuangan Mrs. O’Keefe.<sup>13</sup>

Topik ini dipilih sebagai tema dari skripsi yang akan saya buat, karena menurut pendapat saya penelitian yang membahas masalah imigrasi terhadap orang Asia di Australia pada periode akhir Perang Dunia Kedua merupakan tema yang masih baru di Indonesia dan perlu diteliti lebih lanjut. Adapun bahan yang menjadi sumber tinjauan dalam skripsi ini mengacu pada penulisan sejarah yang ditulis oleh para sejarawan Australia sebelumnya, terutama artikel yang berjudul “*Mrs O’Keefe and the battle for White Australia*”, yang ditulis oleh Sean Brawley, yang menerangkan tentang kepentingan Pemerintah Australia selama 72 tahun menjaga

---

<sup>11</sup> Albert E. Norman, “This World...Mrs. O’Keefe Spurs an Alliance”, *Australasian News Chief of the Christian Science Monitor*, (Christian Science Monitor, April 12, 1949, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Rabu, Tanggal 1 April 2009, Pukul 14.15 WIB).

<sup>12</sup> Frank Crowley, *A Documentary History Of Australia Volume 5: Modern Australia 1939-1970*, Melbourne: Wren Publishing, Pty.Ltd, 1973, “White Australia Policy Defended”, hlm.196-197.

<sup>13</sup> Sean Brawley, “Mrs O’Keefe and the battle for White Australia”, Public lecture for the National Archives of Australia, presented in Canberra. 1 June 2006 The views expressed in this paper do not necessarily represent those of the National Archives of Australia. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 16 Februari 2009, Pukul 10.30 WIB)

eksistensi Badan Legislatifnya termasuk dengan keberadaan Kebijakan Australia Putih. Akan tetapi, penulisan sejarah yang dipakai dalam artikel tersebut mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Australia sendiri terhadap perkembangan Kasus O'Keefe di Australia, tanpa disertai dengan penjelasan secara lebih dalam mengenai pengaruh kasus tersebut terhadap Kebijakan Australia Putih.

Berbeda dengan karya artikel tersebut diatas, penelitian saya memiliki kerangka pemikiran dan ruang lingkup yang berbeda dengan penulis sebelumnya. Tema yang berkaitan dengan Kebijakan Imigrasi Australia terhadap kulit berwarna di Australia untuk kurun waktu dari berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1947 sampai dengan tahun 1949 yang lebih terpadu perlu ditulis dalam bentuk skripsi. Dengan demikian, timbul rasa tertantang saya untuk menulis skripsi ini dengan menggunakan perspektif baru, yaitu dengan menyoroti pengaruh kasus O'Keefe yang menimbulkan masalah internal pemerintahan Buruh yang dipimpin Chifley pada tahun 1949, dengan disertai adanya dinamika kebijakan imigrasi antara pemerintah Buruh, Liberal, dan Pengadilan Tinggi terhadap kasus tersebut. Ditambah juga, dengan penjelasan mengenai keadaan pengungsi Asia khususnya Indonesia yang diwakili oleh Mrs. Annie O'Keefe dan keluarganya pada akhir Perang Dunia Kedua di Australia.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pada penulisan skripsi ini, masalah yang hendak dikaji adalah bagaimana pengaruh kasus O'Keefe terhadap Kebijakan Australia Putih. Selain itu, skripsi ini juga akan membahas dinamika politik Australia yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua akibat kasus tersebut. Ada pula, pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah sejarah terbentuknya Kebijakan Australia Putih, khususnya kebijakan imigrasi terhadap kulit berwarna?
2. Bagaimana perjuangan O'Keefe dalam menentang deportasi, serta respon masyarakat dan Pemerintah Australia Terhadap kasus O'Keefe?
3. Apa dampak kasus O'Keefe terhadap kebijakan Pemerintah khususnya Kebijakan Imigrasi Australia terhadap kulit berwarna?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh kasus O'Keefe terhadap Kebijakan Australia Putih tahun 1947-1949, yaitu semenjak adanya kebijakan deportasi bagi O'Keefe oleh Pemerintah sampai dengan adanya keputusan imigrasi bagi O'Keefe untuk tetap tinggal di Australia. Tahun 1947 dipakai sebagai batasan awal, karena pada tahun tersebut Mrs. Annie O'Keefe mendapatkan surat resmi dari Pemerintah untuk segera meninggalkan Australia, yang menandai awal munculnya kasus O'Keefe di Australia. Tahun 1949 dipakai sebagai batasan akhir penulisan, karena pada tahun tersebut terjadi perubahan kebijakan politik terhadap peraturan imigrasi di Australia bagi para pengungsi, yang berdampak pada proses selesainya kasus O'Keefe dengan keputusan untuk tetap tinggal di Australia.

Ruang Lingkup geografi yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini terjadi di wilayah Australia, khususnya di Negara Bagian Victoria, kota Melbourne. Negara Australia dipakai sebagai tempat dalam pembahasan skripsi ini, karena kasus O'Keefe lebih banyak terjadi di wilayah tersebut, yang digunakan sebagai tempat tinggal Mrs. O'Keefe.

Di dalam penulisan skripsi ini, untuk membahas kebijakan imigrasi Australia terhadap kulit berwarna, yang menjadi ruang lingkup masalah adalah kasus O'Keefe. Kasus tersebut dipakai menjadi topik dalam skripsi ini, karena kasus tersebut dapat dikatakan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan kebijakan imigrasi di Australia terhadap kulit berwarna pada akhir Perang Dunia Kedua.

### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui secara lebih dalam tentang pengaruh kasus O'Keefe terhadap Kebijakan Australia Putih. Penulis memilih tema kasus O'Keefe karena beberapa hal. Pertama, penulis merasa tertarik bagaimana pengaruh kasus tersebut terhadap kebijakan Australia Putih yang menimbulkan dinamika politik di Australia. Dengan ditandai oleh kekalahan pemerintahan Buruh dari pihak oposisi Partai Liberal pada saat pemilihan umum di Australia tahun 1949. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk memaparkan

latar belakang dibuatnya Kebijakan Australia Putih serta isi dari peraturan mengenai kebijakan imigrasi terhadap kulit berwarna. Dengan mengetahui sejarah kebijakan imigrasi Australia pasca Perang Dunia Kedua, membuat penulis dapat mendeskripsikan secara lebih jauh tentang keadaan para pengungsi Asia, khususnya perjuangan kasus O'Keefe dalam menentang deportasi. Terakhir, Kasus O'Keefe ini menandakan era baru dimana terlihat adanya perubahan kebijakan imigrasi Australia terhadap orang Asia pada akhir Perang Dunia Kedua. Australia yang tadinya bersikap rasis atau menolak kehadiran orang Asia di negaranya berdasarkan Kebijakan Australia Putih yang dianutnya, kemudian berubah menjadi agak lunak dengan ditandai oleh keputusan yang mengizinkan Mrs. O'Keefe untuk tetap tinggal di Australia serta menjadi warga negara Australia secara resmi. Dapat dikatakan juga, bahwa kasus O'Keefe adalah kasus bagi warga Asia terutama Indonesia, sebagai bentuk pertentangan terhadap sikap Pemerintah dalam menjaga eksistensi Kebijakan Australia Putih di Australia.

### **1.5 Metode penelitian**

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam tahap pertama, yaitu heuristik, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai data mengenai sejarah kebijakan imigrasi Australia pada akhir Perang Dunia Kedua, terutama kasus O'Keefe dari tahun 1947 hingga tahun 1949, melalui arsip, artikel, dan buku yang menunjang penulisan skripsi ini.

Tahap kedua adalah tahap kritik. Terdapat bahan-bahan yang dikumpulkan secara internal dan eksternal. Kritik internal dilakukan dengan cara menganalisis materi yang telah didapat agar diperoleh sumber terkait untuk digunakan dalam penulisan ini. Kritik eksternal dilakukan dengan cara meneliti bentuk fisik dan sumber data bahan penulisan. Kritik eksternal dilakukan untuk membuktikan keabsahan dokumen tersebut agar dapat dijadikan acuan dalam penulisan ini. Penulis melakukan kritik terhadap beberapa sumber yang ada, mengenai kebijakan imigrasi Australia pasca Perang Dunia Kedua, yang kebanyakan menjelaskan tentang latar belakang timbulnya kasus O'Keefe; pertahanan

Australia di wilayah Asia; hubungan luar negeri Australia; informasi mengenai keluarga O'Keefe; sistem imigrasi Australia; rekonstruksi negara di Asia dan Australia pasca perang; dan keadaan Badan Kementrian Imigrasi Australia disertai Undang-Undang imigrasi Australia terhadap kulit berwarna antara tahun 1900-1949. Sumber-sumber tersebut kurang menyoroti tentang pengaruh kasus O'Keefe terhadap Kebijakan Imigrasi Australia.

Dalam tahap interpretasi terhadap data-data yang telah dipilah sebelumnya, penulis mulai melakukan intepretasi dari sudut pandang searah. Penulis berpendapat bahwa kasus O'Keefe adalah kasus bagi warga Asia terutama Indonesia, sebagai bentuk pertentangan terhadap sikap Pemerintah Australia dalam Kebijakan Australia Putih.

Dalam tahap historiografi, seperti pada umumnya, penulis mencoba menuliskan hasil penelitian ini ke dalam sebuah tulisan karya ilmiah secara naratif, dengan menggunakan metode deskriptif analitis secara kronologis berdasarkan atas fakta dan interpretasi yang dilakukan.

## **1.6 Sumber Sejarah**

Sumber-sumber yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan penulis berasal dari kumpulan dokumen dan arsip yang telah dibukukan, serta dari situs arsip nasional Australia yang sudah dapat diunduh secara gratis. Dalam pengumpulan sumber primer, penulis mencari di berbagai perpustakaan, serta *website* resmi milik pemerintah Australia. Mengenai sumber primer, penulis mendapatkan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penulisan ini berupa sumber primer yang telah diterbitkan. Sumber primer tersebut antara lain; dokumen-dokumen pilihan yang telah diterbitkan oleh Frank Crowley yang berjudul *A Documentary History Of Australia Volume 5: Modern Australia 1939-1970*. Kumpulan arsip tersebut menceritakan tentang pidato dari Arthur Calwell sebagai menteri Imigrasi di *Commonwealth Parliementary Debates, House of Representatives* mengenai pembelaannya terhadap penerapan “Kebijakan Australia Putih” pada tahun 1948-1949, mengenai kebijakannya memulangkan para pengungsi perang khususnya orang Asia, untuk kembali ke negara asalnya. Serta, penulis juga mengambil

sumber primer dari kumpulan dokumen yang telah dipublikasikan oleh J.T. Gilchrist and W.J. Murray yang berjudul *Eye Witness: Selected Documents from Australia's Past*. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterbitkan, penulis juga mengambil sumber dari *website* resmi milik pemerintah Australia, yaitu Undang-Undang resmi *Immigration Restriction Act* tahun 1901. Arsip tersebut merupakan arsip online dari website resmi milik Pemerintah Australia yaitu NAA (*National Archive Australia*), [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), dan Surat kabar Merdeka ( Suara Rakyat Republik Indonesia) terbitan tahun 1949, mengenai respon pihak Indonesia terhadap kasus O'Keefe yang didapat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Sumber-sumber sekunder cukup banyak penulis gunakan. Beberapa diantaranya adalah Sumber Sekunder tertulis, yaitu, buku yang berjudul *Australia Immigrants*, yang ditulis oleh Geoffrey Sherington, menerangkan tentang kondisi para imigran pada Perang Dunia Kedua dari beberapa negara di dunia terutama yang berasal dari Asia, yang tiba ke Australia pada tahun 1945; buku *Migrant Hands in a Distant Land: Australia Postwar Immigration* yang ditulis oleh Jack Collins; buku *Australia and The Non White Migrant for the Immigration Reform Group* dan *Immigration Control or Colour Bar? The Background to 'White Australia' and a Proposal For Change by The Immigration Reform Group* yang ditulis oleh Kenneth Rivett; buku *Non White Immigration and this White Australia Policy* yang ditulis oleh H.I.London; buku *The Administration of The White Australia Policy* yang ditulis oleh A.C. Palfreeman; serta buku *Australia and Immigration 1788 to 1988* yang ditulis oleh Departement of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs Australia, yang didapat dari perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI dan Perpustakaan Pusat UI, jurnal-jurnal ilmiah atau artikel yang berjudul "*Mrs O'Keefe and the battle for White Australia*", yang ditulis oleh Sean Brawley diunduh dari website resmi milik Pemerintah Australia yaitu NAA (*National Archive Australia*), [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), serta sumber ilmiah lainnya.

## 1.7 Sitematika Penulisan

Dalam rencana penulisan skripsi ini, penulis akan membuat sistematika penulisan sebanyak lima bab, yaitu:

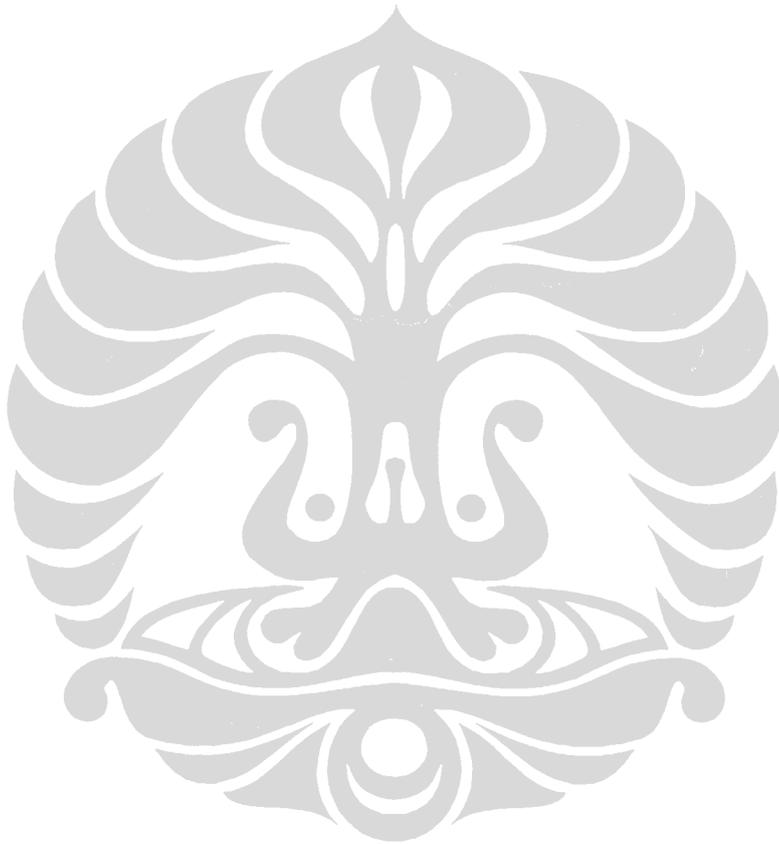
Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, sumber sejarah, dan sistematika penulisan. Bab kedua menjelaskan bagaimana proses terbentuknya Kebijakan Australia Putih, yang disertai dengan peraturan kebijakan imigrasi bagi kulit berwarna. Bab ini akan diawali dengan munculnya rasisme terhadap imigran Cina pada masa demam emas, lalu bagaimana kebijakan awal imigrasi dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris hingga pemerintah Federasi Australia pada masa akhir Perang Dunia Kedua terhadap para pengungsi. Bab ini juga membahas mengenai Undang-Undang *The New Nationality and Citizenship Act 1949*, yang pada akhirnya menyebabkan munculnya kebijakan deportasi bagi para imigran kulit berwarna.

Bab ketiga membahas mengenai kasus O'Keefe. Penulis akan memulai bab ini dengan membahas profil dari keluarga Mrs. Annie O'Keefe dari sebelum menjadi pengungsi sampai tiba ke Australia. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perjuangan Mrs.O'Keefe untuk menentang deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia, yang disertai perlawanan Mrs. O'Keefe dengan Calwell di Pengadilan Tinggi Australia serta hal-hal yang menyebabkan Pemerintah memutuskan Mrs.O'Keefe harus dideportasi dari Australia hingga diterima menjadi warga negara Australia secara resmi. Selain itu, dalam bab ini juga akan membahas mengenai respon masyarakat dan pemerintah Australia terhadap kasus tersebut.

Bab keempat akan membahas mengenai dampak yang terjadi akibat kasus O'Keefe terhadap kebijakan imigrasi Australia. Penulis akan memulai bab ini dengan membahas dampak yang ditimbulkan kasus O'Keefe terhadap hubungan masyarakat Australia dan Pemerintah Belanda dengan Pemerintah Australia, serta dinamika kebijakan imigrasi antara pemerintah Buruh dan Liberal terhadap kasus O'Keefe mengenai keadaan politik yang terjadi antara Partai Buruh dan Liberal dalam Pemilihan Umum Australia tahun 1949. Dalam bab ini juga akan dibahas

mengenai dikeluarkannya peraturan imigrasi baru *Wartime Refugees Removal Act* Tahun 1949 di Australia.

Bab kelima adalah bab terakhir yang meliputi bagian penutup yang menjelaskan hal-hal penting, kemudian mengambil kesimpulan dari penulisan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB 2

### KEBIJAKAN AUSTRALIA PUTIH

#### 2.1 Sejarah dibentuknya Kebijakan Australia Putih

Secara garis besar, sejarah ditetapkan dan diterapkannya Kebijakan Australia Putih<sup>14</sup> dapat dibagi menjadi beberapa periode pembabakan. Dimulai dari sejarah awal munculnya kebijakan pembatasan terhadap imigran Cina pada masa demam emas dan masa Federasi pada tahun 1901, sampai dengan perkembangan terakhir kebijakan imigrasi terhadap para pengungsi atau imigran kulit berwarna pada tahun 1949. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tahap-tahap Kebijakan imigrasi Australia terhadap para imigran kulit berwarna berdasarkan perubahan kebijakan yang terjadi di Australia di bidang keimigrasian. Kebijakan Australia Putih sebenarnya merupakan kebijakan tidak resmi dari pemerintah Australia, yang berkaitan dengan penerimaan imigran, yang bertujuan untuk mencegah masuknya imigran non-Eropa ke Australia.<sup>15</sup> Kebijakan keimigrasian yang bersifat diskriminatif tersebut berlangsung sampai dengan masa berakhirnya Perang Dunia Kedua.

Pada tahun 1788, Australia memiliki penduduk berjumlah sekitar 1.000 orang. Pada tahun 1860, jumlah penduduknya bertambah menjadi 1.100.000 jiwa dari 400.000 jiwa.<sup>16</sup> Peningkatan jumlah populasi tersebut di Australia disebabkan adanya penemuan emas di Australia sekitar tahun 1850-an yang menyebabkan terjadinya banjir imigran dari berbagai negara. Banyak diantara mereka mencoba mengadu nasib dengan mencari emas. Salah satunya adalah

---

<sup>14</sup> Tidak pernah ada kebijakan resmi yang khusus menyebut Kebijakan Australia Putih, istilah ini digunakan untuk menyebut sistem perundang-undangan dan kebijakan yang secara tidak sengaja terhadap Undang-Undang Pembatasan Imigrasi non- kulit putih ke Australia tahun 1901-1973. Peresmian Undang-Undang *White Australia* sebagai kebijakan pemerintah secara umum diambil untuk menjadi bagian dari *Immigration Restriction Act* pada tahun 1901, segera setelah federasi Australia terbentuk. Kebijakan tersebut diubah secara bertahap oleh pemerintah setelah akhir Perang Dunia Kedua, yang kebijakan pertamanya terhadap imigran non-Inggris dan kemudian terhadap imigran non- kulit putih. AT Yarwood, *Asian Migration to Australia: The Background to Exclusion 1896–1923*, (Melbourne: Melbourne University Press, 1964), hlm. 24-25.

<sup>15</sup> "The Demise of The White Australia Policy", <http://www.members.ozemail.com.au>, *Loc.Cit.*

<sup>16</sup> John Lack, dan Jacqueline Templeton, *Sources of Australian Immigration History Volume 1: 1901-1945*, (Melbourne: History Department The University of Melbourne, 1989), hlm. 250.

imigran Cina (terutama orang-orang Kanton<sup>17</sup>) yang datang ke ladang-ladang emas yang ada di Victoria.<sup>18</sup>

Para penambang Cina ini selalu bekerja berkelompok<sup>19</sup> di ladang-ladang emas, mereka sangat teratur dan memiliki pembagian kerja yang sedemikian rupa. Kepandaian mereka adalah menyaring tanah-tanah yang berada di *alluvial gold* yang sebelumnya telah diolah oleh para penambang emas kulit putih.<sup>20</sup> Ketekunan serta kerajinan mereka ternyata tidak disukai oleh para penambang kulit putih, karena mereka bekerja dalam kelompok besar yang mengakibatkan persaingan di ladang emas semakin tidak adil. Hal ini disebabkan, penambang kulit putih hanya bisa bekerja seorang diri atau paling banyak bersama 4-5 orang saja.<sup>21</sup> Sehingga, hasilnya pun akan terbatas dibandingkan dengan kerja para penambang emas Cina dengan skala jauh lebih besar serta hasil yang juga lebih banyak.

Para penambang kulit putih kemudian mengajukan protes kepada pemerintah kolonial dimana mereka menolak kehadiran para penambang Cina di ladang-ladang emas, namun sayangnya protes mereka diacuhkan oleh pihak Pemerintah. Sehingga, para penambang kulit putih pun melakukan kerusuhan di *Lambing Flat* pada tanggal 30 Juni 1861. Kerusuhan tersebut berlangsung selama

---

<sup>17</sup> Gelombang pertama dari eksodus orang Cina secara besar-besaran ke wilayah koloni negara Eropa di wilayah Pasifik berdasarkan catatan Sir John Bowring seorang Konsulat Inggris di Kanton. Bahwa pada tahun 1847, orang-orang Cina menyebar melintasi wilayah Pasifik untuk mencapai California pada tahun 1850, ke Australia pada tahun 1853, ke Amerika Selatan pada tahun 1855 dan Kanada pada tahun 1858. Kebanyakan imigran Cina tersebut berasal dari provinsi di wilayah selatan Cina, seperti Kwangtung dan Fukien, daerah tersebut kebanyakan berpenduduk miskin. Imigran Cina keluar dari negaranya melalui pelabuhan Swatow, Canton, Hong Kong dan Amoy. Hal tersebut juga dilatar belakangi oleh adanya Pemberontakan Taiping di Cina yang terjadi hingga wilayah selatan Cina, yang mengakibatkan kelaparan dan beberapa penyakit. Rivett, *Control or Colour Bar?*, *Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>18</sup> Pada tahun 1856, sekitar 896 orang Cina telah tiba ke Australia. Tahun berikutnya jumlahnya menurun sebesar 327 orang. Akan tetapi, pada tahun 1858, 12.906 orang Cina datang ke Australia, karena adanya penemuan emas. Kedatangan imigran Cina tersebut disambut secara tidak ramah oleh masyarakat di koloni Victoria hingga New South Wales. Pada tahun 1861, diperkirakan sekitar 21.000 orang Cina berada di koloni-koloni Australia dengan perbandingan 1:16 dari jumlah populasinya di Australia. Willard, *Op.Cit.*, hlm.30-31

<sup>19</sup> Para imigran non-Inggris (Asia) atau Cina di Australia cenderung berkumpul dalam jumlah besar dalam satu wilayah. Tiga wilayah yang menjadi tempat bagi imigran non-Inggris adalah Shepparton, di negara bagian Victoria, yang kedua adalah di daerah irigasi atau pertanian Leeton Griffith di negara bagian New South Wales, dan yang ketiga berada di sebelah utara ladang tebu di negara Queensland. H.I. London, *Non-White Immigration and The "White Australia" (The Development of the "White Australia" Policy)*, Sydney : Sydney University Press, 1970), hlm.5-6. (ilustrasi cara bekerja penambang Cina di ladang emas dapat dilihat pada lampiran 2).

<sup>20</sup> Ratih Hardjono, *Suku Putihnya Asia : Perjalanan Australia Mencari Jati Dirinya*. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1991), hlm. 79

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.80.

10 bulan. Kerusuhan paling serius terjadi pada tanggal 14 Juli 1861 ketika sekitar 2000 penggali emas kulit putih menyerang para penambang Cina, sekitar 250 penambang Cina terluka parah dan kehilangan semua harta benda mereka.<sup>22</sup> Beberapa kerusuhan<sup>23</sup> yang dilakukan oleh para penambang kulit putih tersebut, membuat Pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan imigrasi yang tidak hanya untuk melarang para imigran Asia datang, mereka juga melakukan pemeriksaan serta mengurangi arus kedatangan imigran asal Asia untuk masuk ke Australia. Akibatnya pada bulan November 1861, *Chinese Immigration Restriction Act* disahkan, yang mengakibatkan kedatangan para imigran dari Cina pun berkurang. Kemudian, Pemerintah koloni Inggris mengesahkan Undang-Undang yang mewajibkan setiap laki-laki Cina dewasa untuk membayar pajak 1 poundsterling setiap bulannya. Kebijakan ini mampu menurunkan jumlah pendatang Cina pada tahun 1861 dari 12.000 orang menjadi 100 orang.<sup>24</sup> Dapat dikatakan, bahwa kedatangan para imigran dari Cina tersebut merupakan titik awal datangnya imigran non-Eropa di Australia.

Sekitar tahun 1870-an perkebunan tebu di koloni Queensland mulai berkembang dan memerlukan tenaga kerja yang banyak untuk mengurusnya. Sayangnya, keadaan Queensland yang tropis tidak cocok untuk buruh kulit putih, sehingga para pemilik perkebunan pun mulai mengimpor buruh-buruh asing.<sup>25</sup> Selama masa itu, orang-orang Jawa, Sri Lanka dan Kepulauan Pasifik dibawa ke Australia sebagai tenaga kerja murah. Tenaga kerja ini kemudian disebut sebagai '*Kanaka*' yang berasal dari bahasa Hawaii yang berarti manusia. Kebanyakan buruh asing ini datang karena dipaksa dan bukan karena kemauan mereka sendiri. Mereka ditipu dan diculik untuk kemudian diperkerjakan di perkebunan. Teknik pemaksaan ini dikenal dengan sebutan '*blackbirding*'.<sup>26</sup> Penggunaan buruh asing ini kemudian menimbulkan reaksi dari gerakan serikat buruh Australia. Mereka

---

<sup>22</sup> Manning Clark, *A Short History of Australia*, (Sydney: Mentor, 1963), hlm. 27.

<sup>23</sup> Kerusuhan terhadap para imigran Cina yang mulai terancam terjadi juga di lapangan Bendigo pada bulan Juli tahun 1854, dan kekerasan terjadi juga di daerah Victoria di Dunolly dan Ararat. Para pemberontak Eureka di Ballarat, dan pada Bulan Juli tahun 1857 di *Buckland River*. Kenneth Rivett, *Immigration Control or Colour Bar? The Background to 'White Australia' and a Proposal For Change by The Immigration Reform Group*, (Victoria: Melbourne University Press, 1962), hlm. 4-5.

<sup>24</sup> Willard, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>25</sup> Barnard, *op.cit.*, hlm. 451.

<sup>26</sup> Ratih Hardjono, *op.cit.*, hlm. 78

melakukan serangkaian unjuk rasa dan protes menentang kehadiran buruh asing, karena menganggap buruh asing tersebut telah mengambil pekerjaan mereka. Pemerintah pun merespon mereka dengan mengesahkan *Pacific Island Labourers Act*<sup>27</sup> pada tahun 1901 yang berdampak pada dideportasinya para buruh Kanaka dari Queensland. Hal inilah yang kelak menjadi salah satu alasan diadopsinya Kebijakan Australia Putih pada tahun 1901.

Pada tanggal 1 Januari tahun 1901, Australia resmi menjadi sebuah negara federasi dengan nama Persemakmuran Australia. Dengan berdirinya pemerintahan federasi ini, timbul keinginan bagi Australia untuk menjadi sebuah negara kesatuan yang didasarkan pada kehomogenan penduduknya, yaitu persamaan bahasa, agama, dan ras. Pada masa itu, isu rasial mulai menyadarkan masyarakat Australia, bahwa mereka adalah bangsa kulit putih yang hidup diantara bangsa-bangsa kulit berwarna. Masyarakat Australia sendiri melihat diri mereka sebagai sebuah masyarakat yang merupakan bagian dari masyarakat Inggris.<sup>28</sup> Untuk dapat diakui sebagai bagian dari bangsa barat, maka mereka harus bisa mempertahankan homogenitas kulit putih mereka semurni mungkin. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan W.G. Spencer yang merupakan Pemimpin Partai Buruh pada saat itu dalam sebuah debat parlemen sebagai berikut: “..If we keep the race pure, and build up a national character, we shall become highly progressive people of whom the British Government will be prouder the longer we live and the stronger we grow...”<sup>29</sup> Jelas dari pernyataan tersebut terlihat bahwa ras sangat memainkan peranan penting dalam identitas Australia sebagai bagian dari bangsa kulit putih yang berada di Eropa. Seolah-olah kemurnian bangsalah yang menjadi kriteria utama sebuah bangsa sejati. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh kesadaran Australia yang pada waktu itu tengah dipandang rendah oleh masyarakat Inggris. Sehingga, untuk dapat lebih dihargai oleh masyarakat Inggris, masyarakat Australia pun harus bisa mempertahankan ras putihnya diantara ras-ras lainnya yang berwarna.<sup>30</sup> Oleh

---

<sup>27</sup> Pemerintah Queensland membuat *Polynesian Labourers Act* pada tahun 1868, yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur perekrutan dan regulasi terhadap para buruh kanaka. H.I London, *op.cit.*, hlm.10.

<sup>28</sup> Ratih Hardjono, *op.cit.*, hlm.91.

<sup>29</sup> Commonwealth Parliamentary Debates, House of Representative didalam buku Frank Crowley, *Modern Australia in Documents: 1901-1939, Vol.1(1973).*, hlm. 15.

<sup>30</sup> Tubagus Lutfi, *Persepsi Australia tentang Ancaman Indonesia*, (Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1999), hlm. 21

karena itu, untuk dapat mempertahankan kemurnian ras mereka maka Australia akhirnya mengadopsi Kebijakan Australia Putih dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan imigrasi terhadap imigran non-Eropa di Australia untuk pertama kalinya melalui *Immigration Restriction Act* pada tanggal 23 Desember 1901. Kebijakan tersebut bukan semata-mata sebagai kebijakan imigrasi saja, melainkan juga merupakan suatu dasar bagi nasionalisme dan kesatuan nasional Australia. Kebijakan tersebut juga memperkenalkan tes pengujian penggunaan bahasa yang digunakan oleh bangsa Eropa tertentu, khususnya Inggris yaitu *dictation test*, yang diawasi dan dinilai langsung oleh pejabat imigrasi dan bea cukai Australia.<sup>31</sup> Apabila, calon imigran gagal melewati tes tersebut maka tidak diperkenankan menjadi imigran di Australia. Selain itu, terdapat pula dasar hukum yang mengatur pemberian izin tinggal sementara dan deportasi bagi para imigran. Kebijakan tersebut pada akhirnya menjadi alat untuk menolak masuknya imigran non-Eropa dan menandai dimulainya Kebijakan Australia Putih yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang homogen dari segi ras di Australia.

Pada tahun 1906, Australia mengeluarkan lencana<sup>32</sup> untuk mengeskpresikan Australia Putih saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat bagi ras-ras lain khususnya yang berwarna, sebagaimana dapat dilihat dari tulisan lencana tersebut yang berbunyi: "*Australia for the Australians*". Dilihat dari latar belakang dikeluarkannya kebijakan *Immigration Restriction Act 1901*, yang melarang penggunaan tenaga kerja dari negara Asia dan Pasifik, terdapat faktor politis yang juga mempengaruhi Kebijakan Australia Putih. Kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai akibat adanya tekanan bangsa kulit putih di wilayah negara bagian Victoria dan New South Wales yang merasa terancam dengan kehadiran tenaga kerja dari bangsa Asia dan bangsa kulit berwarna (pekerja Kanaka).<sup>33</sup> Sumber lain juga menyatakan adanya sentimen anti Cina yang diprovokasi oleh perbedaan fisik (penampilan), kepercayaan, dan diduga pula

---

<sup>31</sup> Andreas Schloenhardt, "*Trafficking in Migrants, Organised Crime and Illegal Migration in Australia and The Asia Pasific Region*", (Adelaide: Adelaide University Law School, 2002). hlm.63.

<sup>32</sup> Gambar lencana dapat dilihat pada lampiran 3.

<sup>33</sup> Department of Immigration and Multicultural Affairs (DIMA), "*Abolition of The White Australia*", Policy Fact Sheet, <http://www.minister.immi.gov.au>, diunduh pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2009, Pukul 13.18 WIB.

adanya kecemburuan sosial terhadap keberhasilan bangsa Cina menjalankan usaha tambang emasnya. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran dari masyarakat Australia yang bersifat *xenophobia*, bahwa imigran non-Eropa dapat menghancurkan karakteristik bangsa Inggris atau kulit putih di Australia pada saat itu.<sup>34</sup> Dengan demikian, Kebijakan Australia Putih merupakan suatu kebijakan pembatasan imigran yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan domestik, yang dilatarbelakangi oleh adanya perasaan terancam atau takut terhadap bangsa-bangsa non-Eropa, khususnya bangsa Asia dan bangsa kulit berwarna lainnya. Dalam buku yang ditulis oleh A.C. Palfreeman dijelaskan bahwa dibuatnya Kebijakan Australia Putih memperlihatkan adanya upaya penundaan, perubahan, dan perluasan *Immigration Act* di Australia.<sup>35</sup>

Pada Masa Perang Dunia Kedua tahun 1939-1945, jumlah penduduk Australia mencapai 7 Juta jiwa. Pada saat itu proses imigrasi mengalami sedikit perkembangan. Menjelang akhir perang, Australia mengalami kekurangan penduduk sekitar 15.148 orang pada tahun 1946.<sup>36</sup> Oleh karena itu, Pemerintah Australia akhirnya memutuskan untuk menerima lebih dari 15.000 pengungsi<sup>37</sup> selama jangka waktu tiga tahun untuk datang ke Australia. Kebijakan untuk menerima pengungsi ke Australia, dilakukan oleh pihak Pemerintah Australia yang dipimpin oleh Calwell Sebagai anggota penuh, dan penyumbang keuangan terhadap *International Refugee Organization* (IRO). Selain itu, Pemerintah Australia juga telah menandatangani perjanjian untuk mengizinkan 12.000

<sup>34</sup> Paul Brown, "Immigration Policies, Federation: underlying trends and issues", <http://www.abc.net.au/civics/democracy/trends.htm>, diunduh pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2009, Pukul 09.05 WIB.

<sup>35</sup> Hal tersebut ditandai oleh adanya kejadian pada tahun 1904, mengenai penundaan kewajiban tes bahasa secara administratif bagi para imigran Jepang dan India. Pada tahun berikutnya, terdapat upaya dari pemerintah Australia yang mengubah tes bahasa dari 'bahasa Eropa' ke 'bahasa yang ditentukan'. A.C Palfreeman, *The Administration of the White Australia Policy*, (Melbourne University Press, 1967), hlm.82-83

<sup>36</sup> "Immigration to Australia During the 20th Century Historical Impacts on Immigration Intake, Population Size and Population Composition A Timeline The Lead Up to Federation 1901", [www.google.co.au](http://www.google.co.au), diunduh pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2010, Pukul 09.15 WIB.

<sup>37</sup> Para pengungsi yang datang ke Australia terbagi dalam tiga kelas, yaitu: orang-orang Arya (Aryans); orang-orang Kristen non-Arya (*non-Aryan christians*), yaitu orang-orang yang memiliki sebagian keturunan Yahudi yang beragama Kristen; dan Yahudi. John Lack dan Jacqueline Templeton, *Sources of Australian Immigration History Volume I: 1901-1945*, (Melbourne: History Department the University of Melbourne, 1989), hlm.176-177.

pengungsi untuk masuk ke Australia setiap tahunnya dan bersedia untuk meningkatkan jumlah pengungsi yang masuk tersebut menjadi 20.000 orang per tahun. Adapun alasan Pemerintah Australia menerima kebijakan tersebut didasarkan oleh pernyataan Calwell sebagai berikut:

*“...these people are coming to help us as well as coming to share our good fortune. Let us receive them as friends and fellow citizens who have chosen to make our destiny theirs. we have not unlimited time to build our strength or plan our future. Our decisions now must be the right ones, else our Australian nation might not survive beyond the lives of the children of this generation...”<sup>38</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari Calwell tersebut, dapat dijelaskan bahwa keputusan untuk menerima para pengungsi ke Australia pada saat Perang Dunia Kedua adalah hal yang sangat tepat dan perlu bagi masyarakat Australia. Hal tersebut didasarkan oleh adanya tujuan dari pihak Pemerintah bahwa kedatangan pengungsi tersebut untuk membantu kemajuan bagi Australia.

Berikut ini jumlah serta asal imigran yang diterima Australia sejak tahun 1945:

Negara Asal	Jumlah Imigran
Italia	400.000
Yunani	238.000
Eropa Timur	200.000
Yugoslavia	193.000
Belanda	174.000
Jerman	148.000
Indo-Cina	90.000

Sumber: *Advisory Council on Multicultural Affairs. Towards a National Agenda for a Multicultural Australia*. Canberra, 1988, hlm.1, terdapat dalam buku Ratih Hardjono, *Suku Putihnya Asia, op.cit.*, hlm. 118.

Berakhirnya Perang Dunia Kedua, telah membawa pengaruh terhadap berkurangnya jaminan keamanan Inggris atas Australia yang telah mengubah perspektif bangsa Australia terhadap bangsa non-Eropa atau Asia. Hal itu dapat dilihat ketika pihak Kerajaan Inggris yang secara bertahap mulai mengurangi

<sup>38</sup>J.T Gilchrist dan W.J.Murray ed, *Eye Witness Selected Documents from Australia's past*, (Rigby Limited: Adelaide, 1968), hlm.220.

jaminan keamanan serta pasokan imigrannya<sup>39</sup> ke Australia pada saat Perang Dunia Kedua berakhir. Berkurangnya keterlibatan militer Kerajaan Inggris di Asia serta trauma terhadap invansi Jepang selama Perang Dunia Kedua menimbulkan kekhawatiran bagi Australia yang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang sedikit. Berdasarkan pertimbangan politis dan keamanan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasukan perang untuk menghadapi kemungkinan serangan fisik, maka pemerintah Australia mulai mengambil tindakan meningkatkan jumlah imigran ke negara selain Inggris di wilayah Eropa<sup>40</sup>. Dengan demikian, peningkatan jumlah imigran diharapkan oleh Australia dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi penyediaan pasukan untuk mengamankan kepentingan nasional Australia maupun untuk mendukung perkembangan ekonomi Australia.

Pada tahun 1946, penduduk Australia belum mencapai delapan juta jiwa. Pada tahun itu pemerintah Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Ben Chifley, mulai khawatir mengenai kelanjutan kehidupan masyarakat Australia. Maka dibuatlah semacam solusi untuk membuat kebijakan imigrasi baru dengan membuat semacam slogan penyemangat. Salah satu slogan tersebut memiliki ungkapan yang bernada tepat dan tajam seperti slogan "*populate or perish* (mengisi atau binasa)", yang menjadi awal dibuatnya kebijakan imigrasi baru terhadap para imigran untuk masuk ke Australia.<sup>41</sup> Keprihatinan yang dirasakan oleh pemerintah Australia tentang penambahan penduduk yang lambat telah menyebabkan dibuatnya pengenalan peraturan imigrasi yang baru yang bernama *assisted immigration*. Namun demikian, imigrasi yang berlangsung tersebut masih

---

<sup>39</sup> Berkurangnya pasokan imigran asal Inggris tahun 1940-an disebabkan adanya tekanan dari Pemerintah Inggris yang melakukan tekanan terhadap pasar tenaga kerja Inggris untuk menghalangi program tersebut. Adapun jumlah imigran asal Inggris yang sebenarnya disediakan adalah sekitar 41,4 persen dari keseluruhan jumlah imigran yang masuk ke Australia antara tahun 1947 sampai tahun 1951. Robert Birell, dan Tanya Birell, *Australian Studies. An Issue of People Population and Australian Society, (The Machine Starts Up Immigration After the Second World War)*, (Second Edition. Melbourne: Long man Cheshire, 1987), hlm.51.

<sup>40</sup> Pada akhir Perang Dunia Kedua, kebijakan imigrasi massal tidak mungkin lagi untuk menarik jumlah pemukim asal Inggris. Akhirnya Pemerintah Australia mulai merasa perlu untuk merekrut secara besar-besaran imigran asal Eropa Timur serta diizinkan imigran asal Eropa Selatan untuk masuk ke Australia, yang ditangani secara hati-hati oleh Pemerintah. Pada awalnya para imigran tersebut, dilihat terlebih dahulu oleh masyarakat Australia kemudian dipilih untuk masuk ke Australia dengan usia imigran sekitar 15-35 tahun. Robert Birell, *op.cit.*, hlm.46.

<sup>41</sup> Ratih Hardjono, *White Tribe of Asia: An Indonesian View of Australia*, Victoria: Hyland House Publishing Pty Limited, 1993, hlm.78.

dalam kerangka Kebijakan Australia Putih dengan hanya orang-orang yang berasal dari Eropa lah yang dibantu pindah ke Australia. Pada tahun yang sama juga, Australia menerapkan kebijakan asimilasi terhadap para imigran dan pengungsi yang masuk. Hal ini dilakukan dalam upaya agar para imigran yang sebelumnya berbeda secara bahasa, pakaian, makanan, dan agama dapat menjadi warga Australia serta bertujuan agar warga Australia dapat menerima imigran tersebut layaknya warga sendiri.<sup>42</sup> Banyak para pengungsi yang tiba di Australia pada masa berakhirnya Perang Dunia Kedua datang dengan trauma perang. Sehingga, proses asimiliasi dengan masyarakat Australia lainnya memakan waktu yang agak lama, karena pengungsi tersebut lebih senang berkumpul dengan rekan senegarannya.<sup>43</sup> Dapat dikatakan, bahwa konsep asimilasi tersebut sesuai dengan Kebijakan Australia Putih pada saat itu, yang berusaha untuk mempertahankan kemurnian bangsa kulit putih Australia. Dengan demikian, proses asimilasi tersebut bukan hanya dalam bahasa, cara hidup dan budaya. Hal itu sampai juga pada pertanyaan ras yang mereka miliki.

## **2.2 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi Terhadap Kulit Berwarna**

Seperti yang sudah disebutkan pada bagian sejarah dibentuknya Kebijakan Australia Putih sebelumnya, ide dasar dari diberlakukannya Undang-Undang imigrasi adalah untuk mencegah serbuan imigran non-Eropa ke Australia, yang dalam terminologinya sebagai sikap rasis yang akan merusak, tidak hanya budaya, sekaligus juga gen dari 'ras tertinggi'.<sup>44</sup> Menurut penelitian Dr. Litz Gerald, masyarakat Australia merasa ragu terhadap imigran Asia. Hal tersebut disebabkan bahwa imigran Asia mewakili beranekaragam kebudayaan serta latar belakang politis yang sangat berbeda dengan yang lain.<sup>45</sup> Dengan demikian, dibuatnya Undang-Undang Kebijakan imigrasi di Australia lebih mengarah kepada imigran asal Asia ataupun bagi imigran kulit berwarna.

---

<sup>42</sup> Alain Markus, *Australia's Race Relations 1978-1993*, (Sydney: Allen & Unwin, 1994), hlm.45

<sup>43</sup> Ratih Hardjono, *op.cit.*, hlm.113-114.

<sup>44</sup> McConnochie, *Race and Racism in Australia, op.cit.*, hlm.30-32

<sup>45</sup> Ratih Hardjono, *Suku Putihnya Asia, op.cit.*, hlm.104.

### **2.2.1 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi pada Masa Demam Emas menuju Masa Federasi**

Dibuatnya Undang-Undang kebijakan imigrasi terhadap kulit berwarna dimulai pada bulan Maret tahun 1896, para *Premier* dari berbagai koloni di Australia bertemu dalam konferensi di Sydney. Mereka memutuskan untuk memperpanjang tanpa menunda ketentuan pembatasan *Draft Bill of 1888* "untuk semua ras berwarna", dan tidak mengubah bagian dari isi Undang-Undang tersebut, kecuali bagian 15. Sesuai dengan resolusi dalam konferensi tersebut, Negara bagian New South Wales, Australia Selatan, dan Tasmania mulai memberlakukan "*coloured races restriction and regulation*", yang termasuk juga pada penduduk asli Asia, Afrika dan pulau-pulau Pasifik.<sup>46</sup>

Undang-Undang pembatasan imigrasi tersebut di Australia sudah dimulai di daerah koloni Victoria pada tahun 1896 dan di daerah koloni Australia Barat yang mulai dibuat pada tahun 1920. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang imigrasi pada tahun itu hampir setiap negara bagian Australia melakukan tindakan diskriminasi terhadap setiap pabrik yang dimiliki oleh imigran Cina ataupun pada pabrik yang mempekerjakan imigran Cina. Puncaknya pada tahun 1910 dengan dibuatnya rancangan Undang-Undang *The Western Australia Marriage Bill*, yang melarang perkawinan antar-ras di Australia.<sup>47</sup>

### **2.2.2 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi dari Masa Federasi ke Perang Dunia Kedua**

Australia dalam membuat *Immigration Restriction Act* tahun 1901 mengikuti contoh *Natal's Immigration Restriction Act* yang dibuat di Afrika Selatan tahun 1897, terutama mengenai diperlukannya tes bahasa dalam bahasa Eropa. Meskipun, Undang-Undang tersebut bagi para imigran non-Eropa kurang menguntungkan. Namun, ada satu negara Asia yang mendapatkan keistimewaan dalam tes tersebut yaitu Jepang. Hal itu disebabkan adanya tekanan dari pemerintah Jepang, yang memiliki hubungan dengan Inggris dalam perjanjian

<sup>46</sup> Myra Willard, *op.cit.*, hlm.109-110.

<sup>47</sup> Kenneth Rivett, *Immigration Control or Colour Bar? The Background to 'White Australia' and a Proposal For Change by The Immigration Reform Group*, (Victoria: Melbourne University Press, 1962), hlm.7.

*Anglo Japanese Treaty of Commerce and Navigation* pada tahun 1894, peraturan mengenai tes bahasa tersebut diubah sehingga tes tersebut dapat ditentukan sendiri oleh imigran yang bersangkutan sesuai dengan bahasa apapun.<sup>48</sup> Dalam Undang-Undang Imigrasi tahun 1901 pihak Pemerintah Australia lebih mengarahkan pada penolakan imigran dari Kanaka dan Cina. Sedangkan, imigran yang berasal dari Jepang mendapatkan pengecualian dari peraturan tersebut. Pada tahun yang sama juga, Negara bagian South Australia, Tasmania, dan New South Wales mulai membuat *Coloured Races Restriction and Regulation Bills*. Undang-Undang imigrasi tersebut secara nyata melarang orang Asia, Afrika, dan Polinesia untuk masuk ke Australia. Pada pemilihan Parlemen Federal yang pertama, ketiga Negara tersebut mengadopsi *Immigration Restriction Act* atau biasa disebut dengan kebijakan 'Australia Putih' sebagai suatu kebijakan yang resmi.

Persyaratan untuk masuknya imigran kulit berwarna ke Australia didasarkan oleh *Immigration Restriction Act* 1901 pada bab 5 (2), yang isinya sebagai berikut:

“...Any Immigrant may at any time within one year after he has entered the commonwealth be asked to comply with the requirements of paragraph (a) of section three (dictation test), and shall if he fails to do so be deemed to be a prohibited immigrant offending against this act...”<sup>49</sup>

Pada bab tersebut menyatakan bahwa setiap imigran setelah satu tahun masuk ke Australia, mereka diperintahkan untuk memenuhi syarat-syarat alinea (a) bagian 3 (tes bahasa), dan jika mereka gagal memenuhi syarat tersebut maka imigran tersebut dianggap menjadi imigran ilegal yang melanggar Undang-Undang imigrasi tersebut.

*Dictation test* digunakan untuk mencegah imigran yang tidak diinginkan, termasuk juga imigran Eropa yang dicurigai. Walaupun, ada beberapa perbedaan pendapat, namun akhirnya disepakati bahwa tes bahasa adalah sebuah peraturan, berdasarkan yang tertulis dalam *Immigration Restriction Act*, yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> H.I. London, *Non-White Immigration and The “White Australia” Policy (The Development of the “White Australia” Policy)*, (Sydney University Press, 1970), hlm.11-12.

<sup>49</sup> “Immigration Restriction Act 1901”, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*, (selengkapnya dalam dilihat dalam lampiran 4)

“... any person who when asked to do so by an officer fails to write out a dictation and sign in the presence of the officer a passage of fifty words in length in any european language directed by the officer (is a prohibited immigrant..”<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap orang yang diperintahkan untuk mengikuti *dictation test* oleh pejabat imigrasi Australia. Jika salah satu calon imigran gagal menulis dan menandatangani di depan pejabat itu berupa serangkaian kalimat yang terdiri dari lima puluh kata panjangnya dalam salah satu bahasa yang diarahkan petugas, maka ia disebut sebagai imigran terlarang atau ilegal. Dengan demikian, untuk menjadi warga negara Australia diharuskan untuk lulus dalam tes bahasa yang dilakukan oleh petugas imigrasi.

Adapun definisi imigran ilegal di Australia tertuang dalam salah satu ayat dalam *Immigration Act* tahun 1901, yang isinya:

“3.-(1.) *The Immigration into the Commonwealth of the persons described in any of the following paragraphs of this section (hereinafter called ‘prohibited immigrants’) is prohibited, namely:*

*(a) Any person who fails to pass the dictation test: that is to say, who, when an officer dictates to him not less than fifty words in any prescribed language, fails to write them out in that language in the presence of the officer or authorized person. No regulation prescribing any language or languages shall have any force until it has been laid before both house of the parliament for thirty days and, before or after the expiration of such thirty days, both houses of the parliament, by a resolution, of which notice has been given, have agreed to such regulation;”<sup>51</sup>*

Undang-undang tersebut menerangkan bahwa seseorang yang disebut sebagai imigran ilegal, yaitu setiap orang yang tidak lulus dalam tes bahasa. Pada saat melakukan tes bahasa, ia gagal menulis sebanyak 50 kata dalam bahasa asing tertentu di depan pejabat atau orang yang berwenang. Di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa tidak ada peraturan yang menentukan satu atau beberapa bahasa yang harus diujikan kepada para imigran, sampai peraturan tersebut dibawa ke depan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Parlemen Australia selama 30 hari, melalui sebuah resolusi setelah dipertimbangkan serta menyetujui peraturan tersebut.

Seorang imigran paling lambat diberi waktu satu tahun untuk mengikuti tes bahasa, jika ia gagal maka ia termasuk imigran ilegal. Ketentuan satu tahun dalam Undang-Undang imigrasi pada bab 5, kemudian diperpanjang selama 3

<sup>50</sup> A.C Palfreeman, *The Administration of the White Australia Policy*. (Melbourne University Press, 1967), hlm.81.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm.167

tahun pada tahun 1920, dan 5 tahun pada tahun 1932.<sup>52</sup> Peraturan tersebut menjadi lebih ringan bagi imigran. Akan tetapi, peraturan tersebut sebenarnya memberikan kewenangan yang lebih luas dan waktu yang lebih panjang bagi pihak Departemen imigrasi Australia untuk menjaring dan mendeportasi imigran yang tidak diinginkan berdasarkan pasal-pasal lainnya dalam peraturan *Immigration Act*.

Pada tahun 1903, *the Commonwealth Naturalisation Act* mengecualikan semua imigran non-Eropa untuk bisa dinaturalisasi, dan sangat terbatas untuk mengizinkan mereka membawa pasangan dan anak-anaknya ke Australia. Salah satu contohnya, adalah keluarga Chen Ah Kew yang telah tiba ke Australia selama masa demam emas, yang kemudian membawa istrinya ke Victoria. Mereka kembali ke Cina dengan enam anak mereka pada tahun 1901.<sup>53</sup> Meskipun, anak mereka disebut sebagai warga 'Australia' karena lahir di Australia. Berdasarkan Undang-Undang baru tersebut mereka ditolak menjadi penduduk tetap di Australia. Para wanita atau istri imigran dipaksa untuk hidup dalam keadaan yang berbahaya di Australia. Untuk bertahan hidup mereka menggunakan visa sementara yang bisa diterima dan ditolak masuk sesuai dengan kebijakan dari para pejabat pemerintah Australia.

Dalam kaitan dengan kebijakan deportasi terhadap orang-orang non Eropa, dibuatnya kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan dengan alasan kesehatan, kriminal, atau ketentuan khusus lainnya yang tidak ada di dalam ketentuan *Immigration Act*. Oleh karena itu, kebijakan deportasi yang dilakukan pemerintah Australia berdasarkan pada Bab 5 (2) mengenai tes bahasa dan bab 4 (4) mengenai *Certificate of exemption* adalah yang paling sering dipakai sebagai alasan untuk melakukan deportasi terhadap para imigran kulit berwarna.<sup>54</sup>

Mengenai sistem pengawasan *temporary residence*, dalam mekanismenya Departemen imigrasi Australia mempunyai wewenang untuk memberi izin tinggal sementara dan sekaligus berkewajiban menegakkan Undang-Undang imigrasi yang menjamin imigran sementara meninggalkan Australia, apabila izin tinggal semmentaranya habis. Imigran sementara diperkenankan tinggal di Australia setelah

---

<sup>52</sup> A.C Palfreeman, *The Administration of the White Australia Policy*, (Melbourne University Press, 1967), hlm.83-84.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> M. Sornarajah, "Deportation Of Aliens And Immigrants From Australia. The International and Comparative Law Quarterly", Vol.34, No.3 (Jul., 1985), pp. 498-521, published Cambridge University Press, British Institute of International and Comparative Law, [www.jstor.com](http://www.jstor.com), diunduh pada Hari Minggu, Tanggal 29 Maret 2010, Pukul 10.15 WIB.

mendapat *certificate of exemption*.<sup>55</sup> Sertifikat tersebut membebaskan imigran dari kewajiban untuk mengikuti tes bahasa. Jika imigran mempunyai keinginan untuk menetap secara permanen, maka ia harus mengikuti tes bahasa terlebih dahulu.

Wewenang penuh yang dimiliki Pemerintah untuk mengeluarkan ataupun melakukan pembatalan sertifikat pembebasan bagi para imigran, berdasarkan isi dari *Immigration Act* tahun 1901, yang isinya sebagai berikut:

“...3 (h). Any person possessed of a certificate of exemption in force for the time being in the form in the schedule, signed by the minister or by any officer appointed under this act whether within or without the commonwealth is expected from the definition of prohibited immigrant.

4. a certificate of exemption shall be expressed to be in force for a specified period only, and may at any time be cancelled by the minister by writing under his hand...”<sup>56</sup>

Berdasarkan isi yang ada dalam Undang-Undang tersebut, dapat dijelaskan bahwa setiap orang yang memiliki sertifikat pembebasan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu serta telah ditandatangani oleh Menteri atau pejabat setempat yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang, baik di dalam atau di luar persemakmuran (Negara Australia) dapat dikecualikan dari sebutan imigran gelap atau ilegal. Pada bagian 4 dalam Undang-Undang tersebut juga dinyatakan bahwa sebuah sertifikat pembebasan akan dinyatakan berlaku dalam periode tertentu saja dan dapat setiap saat dibatalkan oleh keputusan Menteri yang bersangkutan. Pada saat sertifikat pembebasan tersebut tidak berlaku, seorang imigran tidak diharuskan mengikuti tes bahasa, karena secara otomatis ia menjadi imigran ilegal di Australia.

### **2.2.3 Undang-Undang Kebijakan Imigrasi pada Masa Akhir Perang Dunia Kedua**

Departemen Imigrasi Australia sendiri diciptakan pertama kali pada tahun 1945.<sup>57</sup> Sebagai Menteri pertama dalam departemen tersebut, Arthur Calwell memberikan beberapa ancaman untuk imigran kulit berwarna yang menolak

---

<sup>55</sup> Geoffrey Sherington, *Australia's Immigrants*, Sydney: George Allen and Unwin, 1982. hlm.122.

<sup>56</sup> “Immigration Restriction Act 190”, [www.naa.com](http://www.naa.com), *loc.cit.*, Lihat selengkapnya dalam lampiran.4

<sup>57</sup> “Immigration control and deportation”, Chapter 1. Gone with hardly a trace: deportees in immigration policy, [http://epress.anu.edu.au/anzsog/immigration/mobile\\_devices/ch01.html](http://epress.anu.edu.au/anzsog/immigration/mobile_devices/ch01.html), diunduh pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010, Pukul 16.15 WIB.

dideportasi. Calwell berkomitmen untuk membangun suatu sistem dalam melakukan kontrol imigrasi berdasarkan parameter Kebijakan Australia Putih dan menegakkan kebijakan imigrasi bagi para imigran ilegal di Australia. Calwell melakukan kebijakan deportasi tanpa kompromi bagi para pengungsi dan imigran ilegal terutama yang berasal dari Asia.

Pada tahun 1947<sup>58</sup>, Pemerintah Australia mulai melonggarkan peraturan pembatasan pada *Immigration Restriction Act* 1901, yang isinya imigran Non-Eropa dapat diakui sebagai warga negara Australia. Jika imigran tersebut pernah tinggal di Australia secara terus-menerus selama lima belas tahun, dapat diizinkan untuk tinggal tanpa mengajukan izin perpanjangan berkala. Berdasarkan kebijakan tersebut Pemerintah Australia sepakat untuk menerima sekitar 12.000 orang pengungsi per tahun dengan ketentuan untuk meningkatkan jumlah penduduk Australia, yang tertera pada *Aliens Act* pada tahun 1947, yang isinya bahwa semua warga negara asing yang telah berusia 16 tahun atau lebih tua harus mendaftar dan memberitahu nama, status atau pekerjaan. Akibat peraturan tersebut antara tahun 1947-1948, pengungsi di Australia melebihi penerimaan yang disepakati menjadi 29.365 orang, dibandingkan dengan tahun 1945-1946 yang mencapai hampir 10.000 orang dan tahun 1946-1947, yang mencapai 6.500 orang.<sup>59</sup>

Pada bulan Oktober tahun 1948, Calwell memperkenalkan *Aliens Deportation Bill* ke Parlemen Australia. Hal tersebut telah menetapkan suatu proses yang khusus dalam melakukan deportasi terhadap imigran asing non-Inggris. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Calwell, yang isinya: “...*Those aliens whose character and conduct is such that they should not be allowed to continue to reside here ...*”.<sup>60</sup> Berdasarkan pernyataan dari Calwell tersebut, dapat

---

<sup>58</sup> Untuk pertama kalinya dalam sejarah Australia, setelah Perang Dunia Kedua berakhir mulai merasakan dampak kedatangan sejumlah besar imigran non-Inggris, yang diantaranya adalah orang Jerman, Italia, Belanda, Polandia, dan Yunani. Hal tersebut ditunjukkan pada sensus tahun 1954, Australia mengalami peningkatan populasi dari 6.029.839 jiwa pada tahun 1933 menjadi 8.962.281 jiwa pada tahun 1947. Gordon Greenwood, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Arthur Calwell, 22 October 1948, “Deportation of Aliens Bill, Second Reading, House of Representatives; and Senator Armstrong”, 2 December 1948, Second Reading, Senate, National

dijelaskan bahwa sasaran Calwell terhadap imigran asing berdasarkan karakter dan perilaku yang berbeda dari masyarakat Australia kulit putih yang seharusnya mereka tidak diperbolehkan untuk terus tinggal di Australia. Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 1949 yang untuk pertama kalinya bahwa hukum mengenai kebijakan deportasi telah dibuat dengan menggunakan kekuatan konstitusi Australia mengenai imigran asing.<sup>61</sup>

Pada tahun 1948, jumlah pendatang yang masuk ke Australia sudah mencapai lebih dari 118.800 jiwa, empat kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun itu juga mulai diberlakukan *The Nationality and Citizenship Act 1948*<sup>62</sup> yang mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1949.<sup>63</sup> Dalam Undang-Undang tersebut setiap warga negara yang berasal dari semua negara Persemakmuran Inggris dianggap sebagai *British Subject*. Dapat diakui, bahwa mulai berlakunya Undang-Undang tersebut izin selama lima tahun bagi masuknya 800 pengungsi non-Eropa ke Australia mulai dilaksanakan. Hal ini

---

Archive of Australia Collection, A446, 1964/46109, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010, Pukul 15.00 WIB.

<sup>61</sup> Tidak lama setelah the *Aliens Deportation Act 1948* mulai berlaku, Calwell harus berurusan dengan ancaman bagi kekuasaan deportasinya, yang melibatkan pihak Pengadilan Tinggi Australia untuk melawan Pemerintah dalam kasus deportasi. Seperti yang terjadi dalam kasus Mrs. O'Keefe, pihak Pengadilan Tinggi membatalkan perintah deportasi terhadap Annie O'Keefe (seorang pengungsi perang dari Indonesia yang menikah dengan seorang pria warga Australia). Keputusan dari Pengadilan Tinggi tersebut telah mengancam Calwell untuk memaksa pelaksanaan kebijakan deportasi bagi imigran non-Eropa lainnya dengan menggunakan Undang-Undang imigrasi baru yang direvisi oleh Pemerintah Australia, lebih lanjut akan dijelaskan di Bab.3. "Immigration", [http://epress.anu.edu.au/anzsog/immigration/mobile\\_devices/ch01.html](http://epress.anu.edu.au/anzsog/immigration/mobile_devices/ch01.html), *loc.cit.*

<sup>62</sup> Peraturan *The New Nationality and Citizenship Act* sendiri, mulai diberlakukan bersamaan dengan ditandainya peringatan 161 tahun pendirian pemukiman Eropa di Australia. Secara signifikan adanya inovasi mengenai status "*Australian Citizen*" bagi warga negara baru tidak mempengaruhi status "*British subject*" di Australia. Status baru bagi orang yang lahir di Australia, atau lahir di luar wilayah Australia dengan ayahnya berwarga Negara Australia, mereka dapat diakui secara otomatis untuk tetap tinggal di Australia, atau mereka akan dinaturalisasikan di Australia, atau telah tinggal di Inggris sebagai *British subjects* selama lima tahun atau lebih dapat bertempat tinggal di Australia. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang tersebut bahwa wanita Australia yang menikah dengan orang asing dapat tinggal di Australia, dan pada wanita asing yang menikah dengan warga Australia tidak akan menjadi warga Australia secara otomatis. Frank Crowley, *A Documentary History Of Australia Volume 5: Modern Australia 1939-1970* ("Australians and New Australians", Argus, Melbourne, 11 August 1949), Melbourne: Wren Publishing, Pty.Ltd, 1973, hlm.209.

<sup>63</sup> "Immigration to Australia During the 20th Century Historical Impacts on Immigration Intake, Population Size and Population Composition A Timeline The Lead Up to Federation 1901", [www.google.co.au](http://www.google.co.au), yang diunduh pada tanggal 12 Maret 2010, Pukul 09.15 WIB.

menandakan bahwa munculnya Undang-Undang tersebut telah menjadi elemen pertama dari kebijakan imigrasi Australia yang tidak terfokus pada imigran asal Inggris saja. Namun, Undang-Undang tersebut masih dibuat berdasarkan *Immigration Act* 1901, yang menegaskan bahwa sertifikat pembebasan hanya dapat diperoleh setelah pengajuan permohonan dan pelunasan biaya administrasi yang ditetapkan. Selain itu, sertifikat tersebut harus ditandatangani oleh pemohon. Hal itulah yang membuat Pemerintah Australia pada pertengahan tahun 1949 memberlakukan *Wartime Refugee Removal Act*<sup>64</sup> yang memungkinkan mengembalikan pengungsi yang masuk ke Australia pada masa perang Pasifik ke negara asalnya. Dapat dikatakan bahwa munculnya Undang-Undang tersebut menandakan Australia dalam hukum imigrasi berdasarkan “Australia Putihnya” tidak berjalan secara konsisten.

---

<sup>64</sup> Mengenai *War Time Refugee Removal Act* tahun 1949, akan dijelaskan lebih lanjut di Bab.4.

## BAB 3

### KASUS O'KEEFE

#### 3.1 Profil Keluarga Annie Maas Jacob O'Keefe

Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, banyak orang Asia<sup>65</sup> melarikan diri dari negaranya akibat pendudukan Jepang dan mengungsi ke Australia. Pada waktu itu, Pemerintah Australia mengizinkan para pengungsi tersebut untuk masuk ke negaranya. Namun, Pemerintah Australia menegaskan bahwa ketika perang berakhir, para pengungsi dari Asia tersebut harus kembali ke negara asal mereka. Pada saat Perang Dunia Kedua berakhir, banyak pengungsi Asia yang tidak ingin kembali ke negaranya. Oleh karena itu, Pemerintah Australia yang menganut Kebijakan Australia Putih mengenai penolakan Australia terhadap pemukim Asia, mulai melakukan penangkapan atau deportasi terhadap para pengungsi Asia pada masa perang yang tidak mau kembali ke negara asalnya.

Pada tahun 1949, muncul salah satu nama pengungsi dari Asia yang mencoba melawan kebijakan deportasi tersebut. Pengungsi Asia tersebut bernama Mrs. Annie Maas Jacob O'Keefe. Ia adalah seorang pengungsi asal Hindia Belanda pada saat Jepang menyerang wilayah Hindia Belanda, yang menjadi salah satu tokoh imigran Asia yang melawan Kebijakan Australia putih. Ia bersama delapan anaknya tinggal di Australia sebagai pengungsi perang.<sup>66</sup> Pada saat perang berakhir Menteri Imigrasi Australia yang pada saat itu dijabat oleh Arthur Augustus Calwell<sup>67</sup> memerintahkan Mrs. Annie untuk meninggalkan Australia dan menyebutnya sebagai *Prohibited Immigrant*.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Sekitar 6.269 orang pengungsi yang berasal dari Asia datang ke Australia pada masa perang Dunia II dengan perjanjian untuk kembali ke negaranya masing-masing setelah perang berakhir. Sekitar 5.473 pengungsi secara sukarela telah kembali ke negaranya masing-masing, termasuk sekitar 3.700 pengungsi asal Indonesia, 1.500 pengungsi Cina dan Melayu. Gordon Greenwood, dan Norman Harper. Ed, *op.cit.*, hlm. 16.

<sup>66</sup> H.I. London, *Non-White Immigration and The "White Australia" Policy* (The Development of the "White Australia" Policy), Sydney: Sydney University Press, 1970, hlm.16-17.

<sup>67</sup> Adapun profil dari Arthur Augustus Calwell (1896-1973), lahir dari keluarga polisi. Ayahnya adalah seorang polisi di West Melbourne, datang dari latar belakang campuran Skotlandia-Irlandia Amerika dan Welsh di sisi ayahnya, dan Irlandia pada ibunya. Calwell Sangat terkesan dengan masalah kemiskinan yang dialami oleh para kelas pekerja (buruh). Ia menjadi seorang sosialis dan aktif dalam Partai Buruh pada usia dini. Pada tahun 1940, ia memenangkan kursi senat di kota Melbourne. Tiga tahun kemudian ia menjadi Menteri Imigrasi Australia yang secara lantang mengatur program imigrasi setelah perang terhadap para pengungsi. John Lack, dan Jacqueline Templeton, *Sources of Australian Immigration History Volume 1: 1901-1945* (Melbourne Sun

Mrs. Annie Maas Jacob O'Keefe lahir di Treman Manado di Sulawesi Utara pada tanggal 17 Desember 1908. Sebelum menikah dengan suami pertamanya, ia adalah seorang guru sekolah di kota Manado. Pada Bulan Juni tahun 1928, Mrs. Annie menikah dengan Mr. Samuel Jacob<sup>69</sup> di Manado. Setelah ia menikah dengan Mr. Samuel ia pindah bersama suaminya ke kota Gorontalo, lalu kemudian pindah lagi ke Ternate di pulau Maluku, dan ke Suporoia sebuah pulau yang berdekatan dengan Ambon dan terakhir ia dan keluarga kemudian bermukim di Pulau Aru.<sup>70</sup>

Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, Mrs. Annie bersama suami dan anak-anaknya<sup>71</sup> melakukan evakuasi dengan menggunakan kapal Australia "Warrnambool" pada tanggal 16 September 1942 menuju Australia. Tepat 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 18 September 1942, Mrs. Annie dan keluarganya mendarat di kota Darwin, Australia. Setelah mereka tiba di kota Darwin selama beberapa hari, mereka lalu dibawa oleh konvoi motor militer dan dipindahkan ke kota Adelaide. Kemudian dari Adelaide, Mrs. Annie dan keluarganya datang ke kota Melbourne pada tanggal 1 Oktober 1942. Di kota Melbourne mereka tinggal sementara di Hotel Metropole sekitar 7 bulan.<sup>72</sup>

---

*News Pictorial*, 9 February 1945), Melbourne: History Department The University of Melbourne, 1989, hlm. 246.

<sup>68</sup> "This World...Mrs. O'Keefe Spurs an Alliance", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*, selengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 6.

<sup>69</sup> Mr. Samuel Jacob adalah seorang perwira eks-distrik ("*controleur*") dengan pemerintah sipil Hindia Belanda. Ia meninggal pada tanggal 7 September 1944, karena kecelakaan pesawat di Cairns, Queensland. National Archive of Australia Collection "Deportations from Australia – Mrs O'Keefe and eight children" 1949– 50A1838, 1477/2/11.NETHERLANDS POSITION REGARDING AFFAIR O'KEEFE. "Nieuwagier", Dutch Daily, Batavia, 5 Mar'49 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB.

<sup>70</sup> National Archive of Australia Collection, "Affidavit of Plaintiff Document No.3. I. Annie Maas O'Keefe of Beach Reserve Shenfield Avenue Bonbeach in the state of Victoria Married Woman make oath and say:- Endorsement on writ Document No.1 in the High Court of Australia principal registry 1949,3 between Annie Maas O'Keefe plaintiff and Arthur Augustus Calwell, Alan Hewitt Priest and the Commonwealth of Australia Defendants", Transcript Record of Proceedings, J.P. Minogue Carey & Moran, Solicitors, 20 Queen Street, Melbourne,hlm. 6-7, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2010, Pukul 11.15 WIB.

<sup>71</sup> Adapun nama anak dari Mrs. Annie dengan Mr. Samuel Jacob yaitu: Mary yang lahir tanggal 24 Juli 1931; Tineka yang lahir tanggal 10 April 1933, Johanna yang lahir tanggal 14 Februari 1935; Adolfine yang lahir tanggal 25 April 1936; Nicolene yang lahir tanggal 5 Desember 1937; Adolf Laazer yang lahir tanggal 22 November 1939; dan William yang lahir tanggal 23 Agustus 1941. 7 anak tersebut lahir di Indonesia yang pada waktu itu disebut Hindia Belanda dan satu anaknya lahir di Australia pada tanggal 27 Agustus 1943, bernama Peter August. "Affidavit of Plaintiff Document No.3. I. Annie Maas O'Keefe", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*,

<sup>72</sup> "Affidavit of Plaintiff Document No.3. I. Annie Maas O'Keefe", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*,

Pada tanggal 3 Mei 1943, Mrs. Annie dan keluarga mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan John William O'Keefe, yang terletak di alamat 46 Raleigh Street Thornbury di Negara Bagian Victoria. Mrs. Annie dan keluarga menyewa lantai dasar rumah tersebut. Pada saat mereka sudah mendapatkan tempat tinggal, suaminya kembali ke Indonesia untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Hindia Belanda. Pada Bulan Maret tahun 1944 setelah suaminya mengikuti pelatihan awal dalam administrasi pemerintah Belanda, suaminya dipindahkan ke wilayah New Guinea. Pada saat suaminya terbang ke New Guinea ia berpesan kepada John William O'Keefe untuk menjaga Mrs. Annie dan anak-anaknya.<sup>73</sup>

Pada tanggal 7 September 1944, suami Mrs. Annie tewas dalam kecelakaan pesawat angkut Belanda dalam penerbangan ke Cairns, Queensland. Setelah suami Mrs. Annie dikabarkan telah meninggal dunia, pada tanggal 5 November 1946, ia menerima surat dari *the Commonwealth Migration Officer* tertanggal 4 November 1946, yang memberitahukan bahwa Pemerintah Australia melalui sebuah peraturan imigrasi baru memerintahkan pengungsi perang yang berada di Australia untuk kembali ke negaranya masing-masing.<sup>74</sup>

Pada tanggal 16 Januari 1947, Pemerintah Australia mengeluarkan sertifikat pembebasan bagi Mrs. Annie yang mengizinkan Mrs. Annie dan keluarganya untuk tetap berada di Australia tanpa tunduk pada setiap ketentuan Undang-Undang Imigrasi tahun 1901-1940. Namun demikian, sertifikat pembebasan itu hanya berlaku dalam jangka waktu tiga bulan dari tanggal 10 Januari 1947. Pada tanggal 12 Juni 1947, sertifikat pembebasan tersebut diperpanjang kembali oleh Pemerintah Australia sampai tanggal 31 Desember 1947. Sertifikat pembebasan tersebut diperpanjang lagi pada tanggal 17 November 1947 dalam jangka waktu 12 bulan, sampai tanggal 31 Desember 1948.<sup>75</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Australia sendirilah yang tetap mengizinkan Mrs. Annie untuk tetap tinggal di Australia dengan memperpanjang masa sertifikat pembebasannya.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.7-8.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm.8-9.

Pada bulan Januari tahun 1947, Mrs. Annie menerima lamaran pernikahan dari John William O'Keefe.<sup>76</sup> Pada lamaran pernikahan tersebut terdapat rencana dari pihak Mrs. Annie dan Mr. O'Keefe agar Mrs. Annie dan keluarganya tetap tinggal di Australia. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Mrs. Annie di Pengadilan Tinggi Australia, yang isinya sebagai berikut:

*"... We both made enquiries in order to ascertain whether the proposed marriage would confer any right on me to remain in Australia with my children. The said John William O'Keefe interviewed as he informs me and I verily believe one Mr. Maddison of the Department of Immigration who advised him that the proposed marriage would confer British nationality on me. About the first week in June 1947 the said John William O'Keefe paid a second visit to the said Mr. Maddison stating that he was uneasy about my position and asking for information as to whether the marriage would enable me to remain in Australia. Mr. Maddison said that he would find out from Canberra and furnish a reply within 24 hours. After 48 hours elapsed the said John William O'Keefe telephoned Mr. Maddison who informed him that there was no reply from Canberra..."<sup>77</sup>*

Berdasarkan isi pernyataan dari Mrs. Annie tersebut, dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dibuat oleh Mr. O'Keefe terhadap Mrs. Annie didasarkan pada tujuan agar Mrs. Annie mendapatkan hak untuk tetap tinggal di Australia. Namun demikian, tujuan pernikahan tersebut belum sepenuhnya memberikan hak terhadap Mrs. Annie dan keluarganya untuk menjadi warga Australia, karena belum adanya jawaban dari pihak Pemerintah di Canberra mengenai hal tersebut.

Pada tanggal 14 Juni 1947, Mrs. Annie akhirnya menikah dengan Mr. John William O'Keefe, yang selanjutnya nama Mrs. Annie Jacob berubah menjadi Mrs. Annie O'Keefe dan tinggal bersama 8 anaknya di Pantai Reserve, Shenfield Avenue, Bonbeach di negara bagian Victoria. Mereka menikah di gereja St Joseph, Chelsea dengan Pastor Gerald Fitzpatrick sebagai Imam Katolik di gereja tersebut. Pernikahan mereka berdasarkan lisensi Gereja Katolik dan sah menurut hukum. Bersamaan dengan hal itu, pada tanggal 20 Juni 1947, Mr. O'Keefe menerima surat dari Pemerintah Australia tertanggal 19 Juni 1947<sup>78</sup>, yang isinya sebagai berikut:

*"...with reference to your recent call at this office regarding your contemplated marriage, I have to advise you that the Minister has directed that you be informed that*

---

<sup>76</sup> "Affidavit of Plaintiff Document No.3. I. Annie Maas O'Keefe", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*, hlm.8-9.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

*marriage between yourself and Mrs. Jacob would not confer any right on Mrs. Jacob to remain in Australia as a permanent resident...*<sup>79</sup>

Berdasarkan isi surat tersebut dapat dijelaskan bahwa respon Pemerintah Australia terhadap pernikahan antara Mrs. Annie dan Mr. O'Keefe tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintah untuk mendeportasi Mrs. Annie dan anak-anaknya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Australia sendiri sudah mengetahui rencana dari pernikahan tersebut, sehingga Pemerintah Australia tetap melakukan kebijakan deportasi terhadap Mrs. Annie dan anak-anaknya.

Tidak lama setelah penerimaan surat tersebut, pada tanggal 30 Oktober 1947, pejabat Departemen Imigrasi mengunjungi rumah keluarga O'Keefe yang memerintahkan Mrs. Annie O'Keefe dan anaknya harus meninggalkan Australia dengan pesawat dalam waktu 3 atau 4 hari, meskipun masa perpanjangan sertifikat pembebasannya sampai tanggal 31 Desember 1948.<sup>80</sup> Kebijakan deportasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah terhadap keluarga Mrs. Annie O'Keefe berdasarkan surat resmi dari Pemerintah Australia, yang isinya sebagai berikut:

*"I refer to my minute of the 8<sup>th</sup> December regarding the abovenamed and would appreciate advice as to the action to be taken in this case. The exemption Certificate issued in her favour expired on the 31<sup>st</sup> December, 1948."*<sup>81</sup>

Berdasarkan isi surat tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Australia mendeportasi keluarga O'Keefe, karena surat izin masuk atau *The Certificate of Exemption* yang dimiliki oleh Mrs. Annie O'Keefe berakhir pada tanggal 31 Desember 1948. Hal tersebut membuat Pemerintah Australia memiliki bukti untuk melakukan deportasi terhadap Mrs. O'Keefe.

### 3.2 Perjuangan Mrs. O'Keefe Menentang Deportasi

---

<sup>79</sup> "Affidavit of Plaintiff Document No.3. I. Annie Maas O'Keefe", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*, hlm.9.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> National Archive of Australia Collection " Department of Immigration File Of Papers" 49/2/385. Subject: (Mrs) O'Keefe A. Maas. 3418. Commonwealth Migration Officer. " MRS.ANNIE MAAS O'KEEFE & FAMILY RETURN TO THE N.E.I".to Secretary Dept. of Immigration, Canberra. A.C.T. DEPARTMENT OF IMMIGRATION. 455 COLLINS STREET (Cp. William Street). Melbourne.C.1. 4<sup>th</sup> January, 1949. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB.Lihat selengkapnya pada lampiran .12

Pada awalnya Perdana Menteri Joseph Benedict Chifley dan Menteri imigrasi Arthur Calwell mengizinkan Mrs. Annie O'Keefe dan 8 anaknya serta 1000 pengungsi lainnya dievakuasi ketika masa Perang Dunia Kedua untuk datang ke Australia sebagai pengungsi.<sup>82</sup> Hal tersebut berdasarkan perjanjian bahwa mereka dapat segera kembali ke negara asalnya setelah perang berakhir. Menteri Imigrasi pada saat itu, yaitu Arthur Calwell telah sepenuhnya mempertimbangkan masalah deportasi terhadap keluarga O'Keefe yang telah didiskusikan dengan Perdana Menteri Chifley. PM Chifley dalam hal ini merasa bahwa masalah deportasi O'Keefe tidak bisa dirubah dari prinsip yang sudah ditetapkan. Pemerintah Australia memahami kondisi Mrs. O'Keefe yang sudah menikah dengan seorang warga Australia sebagai suaminya. Namun demikian, dalam hal kebijakan deportasi yang sudah ditetapkan secara jelas Mrs. O'Keefe tidak memperoleh hak untuk tetap tinggal di Australia.

Menteri Imigrasi Australia Arthur Calwell menggugat Mrs. O'Keefe dan keluarganya agar segera meninggalkan Australia. Pihak Pemerintah Australia menunjuk Alan Hewitt Priest sebagai penuntut yang mewakili Departemen imigrasi Australia. Akibat hal tersebut Mrs.O'Keefe didaftarkan dan mulai disidangkan di *the High Court of Australia* oleh Pemerintah Australia yang diwakili oleh A.A.Calwell dan Alan Hewitt Priest.<sup>83</sup> Pada tanggal 10 Februari 1949, pihak penuntut yang diwakili oleh Alan Hewitt Priest mengirimkan pemberitahuan secara tertulis untuk Mrs.O'Keefe agar meninggalkan Australia pada tanggal 23 Februari 1949.<sup>84</sup>

Langkah pertama yang diambil oleh Mrs. O'Keefe dalam menentang kebijakan deportasi dari Pemerintah Australia adalah dengan mengikuti tuntutan Pemerintah Australia dalam Pengadilan Tinggi Australia. Adapun nama

---

<sup>82</sup> National Archive of Australia Collection, "[Personal Papers of Prime Minister Chifley] Correspondence 'O', including representations relating to deportation of Mrs Annie O'Keefe and children" 1947-49M1455, Letter from J.B Chifley ( Prime Minister of Australia) to Mr. F. Macken 110 George Street Paramatta, N.S.W, 10 February 1949, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Rabu, Tanggal 25 Maret 2009, Pukul 13.05 WIB).

<sup>83</sup> National Archive of Australia Collection, "Endorsement on writ Document No.1 in the High Court of Australia principal registry 1949,3 between Annie Maas O'Keefe plaintiff and Arthur Augustus Calwell, Alan Hewitt Priest and the Commonwealth of Australia Defendants page 2", Trevor Rapke, Transcript Record of Proceedings, J.P. Minogue Carey & Moran, Solicitors, 20 Queen Street, Melbourne, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada tanggal 4 Maret 2010, hari Kamis, Pukul 11.15 WIB.

<sup>84</sup> *Ibid.*

pengacara yang mendukung Mrs. O'Keefe dalam persidangan di Pengadilan Tinggi adalah Mr Sholl, Mr Trevor Rapke, JP Minogue, Carey, Moran dan Mr J. B. Tait. K.C. Sedangkan, pihak pengacara dari Pemerintah Australia diwakili oleh Sir John Latham dan Mr. A.M. Fraser.<sup>85</sup>

### 3.2.1 Argumen Pihak Pemerintah Australia Terhadap Kasus O'Keefe

Kebijakan deportasi yang dilakukan Calwell terhadap Mrs. O'Keefe berdasarkan pernyataan dari Pemerintah Australia tanggal 10 Februari 1949, yang menyatakan bahwa hukum perpanjangan Surat Pembebasan tidak berlaku bagi Mrs. O'Keefe. Hal tersebut telah membuat para petugas imigrasi yang mencoba memaksa Mrs.O'Keefe untuk segera meninggalkan Australia tanpa adanya persetujuan dari pihak tergugat pada tanggal 15 Februari 1949.<sup>86</sup> Pernyataan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 6 dari Undang-Undang *the Nationality and Citizenship Act* tahun 1948, yang menerangkan bahwa Mrs. O'Keefe sebagai seorang imigran ilegal di Australia. Ditambahkan juga bahwa alasan Pemerintah untuk melakukan deportasi terhadap Mrs.O'Keefe dan 8 anaknya, berdasarkan pada bagian 4 dari Undang-Undang *the Immigration Act* tahun 1901-1940, yang menyatakan penggugat Mrs.O'Keefe secara langsung melalui pemberitahuan secara tertulis dari pihak petugas imigrasi, yang isinya Mrs.O'Keefe dan 8 anaknya diharuskan untuk meninggalkan Australia berdasarkan waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan tersebut.<sup>87</sup>

Di Parlemen Australia, Calwell juga berusaha menyanggah alasan dari pihak Mrs.O'Keefe dengan merilis beberapa dokumen dari para pejabat imigrasi mengenai kasus O'Keefe untuk menunjukkan bahwa Departemen Imigrasi tidak bertindak melanggar hukum. Adapun alasan dari Pemerintah Australia tersebut, pada tanggal 10 Januari 1947, Mrs O'Keefe meminta izin untuk tinggal di Australia dalam waktu jangka panjang. Mrs. O'Keefe juga memiliki surat

---

<sup>85</sup> National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration", FILE OF PAPERS. 49/2/385, FOUR-POINT MOVE TO DEPORTATION OF MRS.O'KEEFE, Melbourne Sunday, S2/3418 Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30 WIB.

<sup>86</sup> "Endorsement on writ Document No.1 in the High Court of Australia", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*, hlm.3.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

pengantar dari Konsulat Belanda, yang isinya bahwa semua orang Indonesia harus kembali ke Hindia Belanda. Namun, Mrs. O'Keefe telah menerima tawaran untuk menikah dengan orang Australia. Pihak Departemen Imigrasi Australia telah mengeluarkan Sertifikat pembebasan untuk membebaskan dirinya dari ketentuan Undang-Undang Imigrasi selama tiga bulan. Akan tetapi, Mrs. O'Keefe tidak menaati peraturan sebagaimana yang diminta. Pada tanggal 28 Mei 1947, seorang petugas Departemen Imigrasi pernah memberitahukan Mrs. O'Keefe bahwa meskipun Mrs. O'Keefe menjadi seorang subjek Inggris pada pernikahannya dia masih tetap seorang imigran ilegal. Pada tanggal 3 Juni 1947, pihak Konsulat Belanda meminta pertimbangan lebih lanjut untuk perpanjangan Sertifikat pembebasan bagi keluarga O'Keefe untuk tetap tinggal di Australia dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Selanjutnya sertifikat pembebasan tersebut dikeluarkan yang memungkinkan dirinya untuk tetap tinggal di Australia sampai dengan tanggal 31 Desember 1947. Pada tanggal 3 November 1947, Menteri Imigrasi, memberikan perpanjangan terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 1948, lebih dari satu tahun izin tinggal.<sup>88</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, menunjukkan bahwa sebetulnya pihak Departemen Imigrasi telah bersikap toleran terhadap Mrs. O'Keefe. Hal tersebut didasarkan pada diberikannya izin bagi Mrs. O'Keefe untuk tetap tinggal selama beberapa kali di Australia. Namun, tindakan tersebut belum mengarah kepada alasan diberikannya izin perpanjangan sertifikat oleh Departemen Imigrasi. Argumen tersebut lebih ditujukan kepada peringatan saja terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Mrs. O'Keefe.

Alasan yang lain dari Pemerintah Australia dengan tidak mengizinkan izin tinggal bagi keluarga O'Keefe adalah agar tidak terjadi dampak yang lebih besar lagi dari para pengungsi yang tinggal di Australia. Hal itu berdasarkan pernyataan Calwell, yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>88</sup>.National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. O'KEEFE WRITS ISSUED IN HIGH COURT", Extract Sydney Daily Telegraph, Morning Herald, 16-2-1949, S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB. Lihat selengkapnya pada lampiran 13.

“...if Mrs.O’Keefe and her children were allowed to remain in Australia. all the 6000 Asiatics people admitted as wartime evacuees also should be permitted to stay...”<sup>89</sup>

Pernyataan dari Calwell tersebut, dapat dijelaskan bahwa adanya kekhawatiran dari Pemerintah Australia jika keluarga O’Keefe diizinkan untuk tetap tinggal di Australia. Hal itu berdasarkan pernyataan bahwa jika Mrs.O’Keefe dan anak-anaknya diizinkan tinggal di Australia akan mengakibatkan sekitar 6000 pengungsi perang yang berasal dari Asia lainnya juga harus diijinkan untuk tinggal.

### 3.2.2 Argumen Pihak Keluarga O’Keefe Terhadap Kebijakan Deportasi

Mrs.O’Keefe memiliki pendapat bahwa ia adalah seorang *British Subject* dan Warga Negara Australia resmi. Mrs. O’Keefe berusaha melawan ketentuan Pasal 25, sub-bagian 6, dari Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1948. Ia mengatakan bahwa pasal tersebut tidak mengacu pada dirinya dan tidak dapat berlaku baginya. Hal tersebut berdasarkan isi dari Sub-bagian 6, yang mengecualikan secara otomatis hak-hak Kewarganegaraan Australia seseorang di Australia sebagai imigran atau imigran ilegal di Australia berdasarkan pada adanya Sertifikat Pembebasan. Mrs.O’Keefe juga menuduh bahwa perintah yang dibuat oleh Calwell pada tanggal 9 Februari 1949, ilegal dan berada di luar kekuasaan Pemerintah Australia. Mrs.O’Keefe juga mencoba untuk meminta pihak Pengadilan Tinggi untuk menahan para terdakwa yang masing-masing terdiri dari; para petugas imigrasi dan agen-agen yang mencoba mendeportasi dia atau sebaliknya menyuruhnya untuk meninggalkan Australia tanpa adanya alasan atau komentar dari Mrs. O’Keefe sendiri. Melalui pengacaranya Mrs O’Keefe mengeluarkan surat perintah ke Pengadilan Tinggi Australia terhadap Menteri Imigrasi, Mr A.A.Calwell, seorang petugas imigrasi yang bernama Mr. Alan Hewitt Priest, dan Pemerintah Australia. Surat tersebut ditulis berdasarkan adanya

---

<sup>89</sup> National Archive of Australia Collection, “Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. “O’KEEFE ORDER SEEN A BLOW TO GOODWILL Grounds ‘Not Economic’ “S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au)., diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

klaim bahwa Menteri Imigrasi tidak memiliki kekuatan untuk melakukan deportasi.<sup>90</sup>

Pada tanggal 16 Februari 1949, pengacara Mrs. O'Keefe yang bernama Mr. Carey, dari Bonbeach, Victoria, mengeluarkan surat perintah Pengadilan Tinggi yang mengklaim bahwa Mr. Calwell tidak mempunyai kekuatan hukum untuk mendeportasi Mrs O'Keefe dari Australia. Hal tersebut berdasarkan belum diterimanya surat dari Calwell mengenai hal tersebut. Mr Carey mengatakan isi tulisan surat tersebut tidak berhenti bagi Mr. Calwell untuk melaksanakan ancamannya dalam mendeportasi Mrs O'Keefe dan keluarganya ke Indonesia paling lambat tanggal 23 Februari.<sup>91</sup>

Adapun alasan dari pihak pengacara yang membantu Mrs. O'Keefe, adalah pada tanggal 7 Agustus dan 31 Oktober 1947, pihak Konsulat Belanda telah menyarankan bahwa Mrs.O'Keefe kini dianggap sebagai *British Subject*, dan akan memerlukan visa masuk ke Hindia Belanda atau wilayah Belanda lainnya. Pemerintah Australia dan Mr.Calwell tidak memiliki kekuatan untuk mendeportasi Mrs .O'Keefe. Mrs.O'Keefe secara hukum adalah seorang *British Subject* dan seorang warga negara Australia, karena Mrs.O'Keefe telah menikah dengan Mr. John William O'Keefe seorang *British Subject* dan warga negara Australia resmi pada tanggal 14 Juni 1947. Berdasarkan Undang-Undang *the Nationality and Citizenship Act* 1948 yang mulai beroperasi pada tanggal 26 Januari 1949, secara lebih lanjut bahwa Mrs.O 'Keefe telah menjadi warga negara Australia resmi. Ditambahkan juga bahwa Mrs. O'Keefe tidak dalam periode yang bersangkutan sebagai seorang imigran atau imigran ilegal dalam arti sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi tahun 1901-1940 dan tidak tunduk pada setiap ketentuan dari Undang-Undang tersebut. Bahwa ketentuan Pasal 25, sub bagian enam dari Undang-undang Kebangsaan dan Kewarganegaraan tahun 1948 tidak

---

<sup>90</sup> National Archive of Australia Collection,"Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. O'KEEFE WRIT-Deportation Fight, Extract Sydney Morning Herald, 16-2-1949" S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

<sup>91</sup> "O'KEEFE WRITS ISSUED IN HIGH COURT",[www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit*.

bisa diterapkan pada Mrs. O'Keefe. Isi dari sub-bagian tersebut tidak berlaku serta tidak dapat diterapkan pada Mrs. O'Keefe, karena perintah yang dibuat oleh Menteri Imigrasi pada tanggal 9 Februari adalah tidak resmi atau ilegal serta berada di luar kekuasaan Pemerintah. Hal itu juga menunjukkan bahwa tindakan deportasi yang dibuat oleh Mr Calwell secara hukum adalah tidak sah.<sup>92</sup>

Pada saat kasus O'Keefe terjadi, Menteri Imigrasi (Calwell) telah menghasilkan suatu rencana untuk menunjuk para pekerja yang terlatih dengan mendirikan *neighborhood committees* dengan membantu para pendatang dari Eropa dan Asia untuk menetap di Australia.<sup>93</sup> Sikap tidak konsisten dari Pemerintah Australia terhadap kebijakan imigrasi Australia, ditanggapi oleh Mr.O'Keefe yang isinya sebagai berikut:

*“... Dr. Evatt said recently he would like to bring Asian students to Australia to create good will and demonstrate that the White Australia policy was economic and not racial. here we have little Asian students who are being educated in an Australian school at no expense to the Australian public. ‘ the case of my wife and her children is a test case for the Government to show whether it is sincere in what it says to Asia... ”*<sup>94</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Mr.O'Keefe tersebut, dapat dijelaskan bahwa ia merasa pemerintah Australia tidak konsisten terhadap kebijakan imigrasi yang ditetapkannya. Hal itu didasarkan pada tindakan Pemerintah yang diwakili oleh Dr Evatt yang membawa siswa Asia ke Australia untuk menunjukkan bahwa kebijakan Australia Putih tidak bersikap rasis terhadap orang Asia. Mr.O'Keefe juga menambahkan dengan membandingkan kasus yang menimpa istrinya dengan kebijakan pemerintah yang membawa orang Asia ke Australia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus O'Keefe yang menimpa istri dan anak-anaknya adalah ujian bagi Pemerintah untuk menunjukkan apakah Pemerintah tulus terhadap apa yang dikatakan Pemerintah Australia terhadap Negara-Negara di Asia.

---

<sup>92</sup>. “Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. O'KEEFE WRITS ISSUED IN HIGH COURT”, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*, Lihat selengkapnya pada lampiran 14.

<sup>93</sup> National Archive of Australia Collection, “Extract Daily Telegraph Sydney, 16-2-1949. “S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.35WIB.

<sup>94</sup> National Archive of Australia Collection, “HERE IS BONBEACH FAMILY CALWELL WANTS TO GO “S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.40WIB.

### 3.2.3 Perdebatan Antara Pihak O'Keefe dan Pemerintah di Pengadilan Tinggi Australia

Perdebatan dalam Pengadilan Tinggi antara pihak Mrs.O'Keefe dengan Pemerintah Australia terutama Mr. Calwell dimulai pada tanggal 16 Februari 1949 di kota Melbourne. Perdebatan tersebut dimulai setelah aplikasi yang dibuat atas nama penggugat dibaca bersamaan dengan sudah dibacanya surat pernyataan Mrs. O'Keefe dan Mr. Paulus Joseph Carey. Kemudian pihak yang akan melakukan perdebatan mulai disumpah, setelah ditunjuknya Mr. Rapke yang mewakili pihak Konsulat Pengadilan Tinggi untuk mewakili Mrs. O'Keefe sebagai pihak tergugat. Perdebatan tersebut dilaksanakan pada pukul 10 sebelum tengah hari pada hari Senin, tanggal 21 Februari 1949 sampai tanggal 2 Maret 1949 (hari Rabu) Pukul 4.30 sore. Pihak Pengadilan Tinggi menyetujui agar Mrs.O'Keefe memiliki kebebasan untuk tetap tinggal di Australia serta mengikuti jalannya persidangan dengan mengalihkan terlebih dahulu perintah deportasi tersebut atau menunda kebijakan deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah.<sup>95</sup>

Adapun isi perdebatan dari pihak pengacara yang mewakili Mr.O'Keefe ( Mr. Tait) dengan pihak pengacara yang mewakili Pemerintah ( J.Dixon) mengenai kasus O'Keefe, yang isinya sebagai berikut:

*Dixon, J.: "I find it very difficult to understand the particular view described to Mr. Justice Issacs. Section 5 seems to be one of the sections directed to preventing people becoming a part of the community. It says within five years dictation tests may be read to him and if he fails out he goes; and that is a measure directed to preventing a person becoming a member of the Australian community. It is difficult for me to understand..."*<sup>96</sup>

Berdasarkan pernyataan dari pihak pengacara Pemerintah yang diwakili J.Dixon, dapat dijelaskan bahwa pihak pemerintah merasa sangat sulit untuk memahami pandangan yang diuraikan oleh hakim Pengadilan Tinggi Mr. Issacs. Ditambahkan juga bahwa berdasarkan Bagian 5 Undang-Undang imigrasi Australia, menjadi salah satu bagian yang ditujukan untuk mencegah imigran asing menjadi bagian dari masyarakat Australia. Pihak Pemerintah mengatakan bahwa dalam lima tahun tes dikte dapat diterapkan pada pihak Mrs.O'Keefe, jika

<sup>95</sup> National Archive of Australia Collection, "O'Keefe, Annie Maas – Immigration Act 1901–40 – Prosecution"1949MP401/1, CL31130. Style Sheet. (Order Giving Leave To Serve Notice of Motion, Document No.6, Before His Honour The Chief Justice (Sir John Latham) and M. Doherty in Chambers, Wednesday The 16<sup>th</sup> Day of February 1949), [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 10.15 WIB. Lihat selengkapnya pada lampiran 15.

<sup>96</sup> *Ibid.*

Mrs.O'Keefe gagal mengikuti tes dikte maka ia harus segera keluar dari Australia. Pihak pemerintah juga menyatakan bahwa alasan untuk mencegah seseorang menjadi anggota masyarakat Australia sudah cukup baik.

Pernyataan dari pihak Pemerintah tersebut ditanggapi oleh pihak pengacara Mrs. O'Keefe, yang isinya sebagai berikut:

*Mr Tait: "yes- the only time this court he said " you are a member of the community". He was naturalized here and was here 14 years. my friend is taking a case that whatever may be the position under the act, a period of waiting five years, or suspension of intermingling with the community, what you have got is a woman coming here when the japanese were knocking at the door and were overrunning her own country and she got here and those conditions operated for quite a time and the question of repatriated was difficult to accomplish. yes, to say that by january 1947 she had to become a member of the australian community seems to be to stretch it enormously. When you add to that the matter of having a certificate, the provision of five years in section 5(2), the fact that a few months before this she was apparently willing to go-it was only because indonesia was too unsettled –and when you consider the facts as to what happened in january when she went along and interviewed the immigration officer, and when my friend – who seems to know something about the public service –seems to think the immigration officer more or less forced a certificate on her; that she made inquiries through her husband of the dutch authorities as to what would happen if she did marry-when you add those things..."*  
97

Berdasarkan balasan dari pihak pengacara Mrs.O'Keefe ( Mr. Tait), dapat dijelaskan bahwa perdebatan tersebut berlangsung secara sengit antara pihak Mrs.O'Keefe dan pemerintah. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Mr. Tait yang mencoba meyakinkan bahwa Mrs.O'Keefe sudah dinaturalisasi di Australia dan hampir 14 tahun suaminya Mr. O'Keefe di Australia. Mr. Tait juga menyatakan bahwa keluarga O'Keefe sudah menjadi teman baginya. Ditambahkan juga olehnya bahwa Mrs.O'Keefe sudah membaaur dengan masyarakat Australia selama 5 tahun sejak Perang Dunia Kedua terjadi. Dari pernyataan tersebut, juga terdapat pengakuan dari pihak Mrs.O'Keefe bahwa pada bulan Januari 1947, Mrs.O'Keefe diharuskan untuk menjadi anggota masyarakat Australia, karena adanya tekanan yang besar pada saat itu. Masalah terhadap kepemilikan sertifikat pembebasan selama lima tahun berdasarkan bagian 5 (2) Undang-Undang imigrasi, terdapat fakta bahwa beberapa bulan sebelumnya bahwa Mrs.O'Keefe ingin segera pergi dari Australia. Namun, kondisi negara Indonesia pada saat itu belum begitu stabil. Dijelaskan juga bahwa Mrs.O'Keefe pernah pergi bersama petugas imigrasi untuk melakukan wawancara. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

---

<sup>97</sup> "O'Keefe, Annie Maas – Immigration Act 1901–40 – Prosecution", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*,

bahwa pemberian surat perintah deportasi dari petugas imigrasi merupakan suatu bentuk paksaan dari Pemerintah Australia terhadap Mrs.O'Keefe dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan Australia.

Menurut perwakilan dari pihak Pengadilan Tinggi Australia yang membantu Mrs.O'Keefe, yaitu Mr.R.R Sholl, KC, bahwa jika Mrs Annie Maas O'Keefe sekarang dalam kekuasaan dan cakupan Undang-undang Imigrasi, tidak ada kekuatan yudisial yang diberikan kepada Menteri Imigrasi yaitu Mr. Calwell atau petugas imigrasi untuk melakukan kebijakan deportasi terhadap Mrs.O'Keefe. Hal tersebut didasarkan pada tidak ikutnya Mrs. O'Keefe dan anak-anaknya mengikuti tes dikte, karena istilah bagi imigran ilegal di Australia adalah yang dinyatakan tidak lulus atau gagal dalam mengikuti tes dikte. Adanya ketentuan dari Pemerintah bisa diterapkan pada Mrs. O'Keefe adalah jika ia mengikuti tes dikte, yang akan menyebabkan dia dianggap sebagai orang yang diperkenankan dalam Undang-Undang imigrasi.<sup>98</sup> Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mr. Sholl bahwa Mrs.O'Keefe tidak pernah ada di dalam kekuasaan Menteri imigrasi.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Sir John Latham. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Sir John Latham dalam persidangan di Pengadilan Tinggi, yang isinya sebagai berikut: *"...That if state of mind on entry were important , there was no evidence to show that Mrs. O'Keefe had any idea of making Australia her home..."*<sup>99</sup> Tanggapan dari Sir John Latham tersebut menerangkan bahwa cara masuknya Mrs. O'Keefe dan keikutsertaannya dalam mengikuti ketentuan Pemerintah tidak begitu penting. Hal tersebut didasarkan pernyataannya yang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Mrs O'Keefe dapat menjadikan Australia sebagai rumahnya.

Pernyataan dari Sir John Latham pun akhirnya dibalas oleh Mr. Sholl, yang isinya sebagai berikut:

*"...Let us say she was delighted to get on the ship which happened to be coming to Australia. she did not select Australia. she did not ask to get on the ship but was told to get on it. the application of the Immigration Act depends upon her state of mind to decide whether the entry were voluntary..."*<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> "Four-Point Move To Deportation Of Mrs.O'Keefe", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*,

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

Berdasarkan tanggapan dari Mr. Sholl tersebut, dapat dijelaskan bahwa penerapan Undang-Undang imigrasi tergantung kepada pikiran Pemerintah untuk memutuskan masuknya Mrs.O'Keefe secara sukarela ke Australia. Hal tersebut berdasarkan pernyataannya yang menyatakan bahwa Mrs.O'Keefe dianalogikan sebagai seorang awak kapal yang kebetulan datang ( tidak minta naik kapal) dan tidak pilih tujuan ke Australia. Akan tetapi, telah diberi tahu untuk mendapatkan pelayanan di atas kapal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masuknya Mrs.O'Keefe ke Australia disebabkan oleh Pemerintah yang pada awalnya secara sukarela mengizinkan Mrs.O'Keefe masuk. Walaupun, Mrs.O'Keefe pada awalnya tidak menginginkan untuk tinggal di Australia.

#### **3.2.4 Keputusan Pengadilan Tinggi Australia Terhadap Kasus O'Keefe**

Selama jalannya persidangan antara Mrs.O'Keefe dan Pemerintah, Pihak Pengadilan Tinggi Australia menemukan standar bagi pemerintah di luar kerangka Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan deportasi terhadap para pengungsi. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Imigrasi pada Bagian 18, yang menyatakan bahwa menteri dapat memerintahkan deportasi terhadap seseorang yang dianggap sebagai imigran ilegal berdasarkan ketentuan imigrasi dalam kondisi apapun. Pada bagian 19 dinyatakan pula bahwa, istri dan anak-anak dari imigran ilegal tersebut juga akan dideportasi.<sup>101</sup> Akan tetapi, imigran tersebut ditolak sesuai dengan aturan yang menerangkan bahwa ia sudah tinggal di Australia selama lima tahun tanpa perintah deportasi yang dilakukan terhadapnya, yang akan menempatkan dia di luar kekuasaan menteri untuk melakukan deportasi.<sup>102</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Mrs. O'Keefe dan anak-anaknya tidak dapat dideportasi oleh Pemerintah, karena telah tinggal di Australia selama lima tahun.

Mrs.O'Keefe juga telah melakukan banding<sup>103</sup> atas kebijakan deportasi Pemerintah Australia sejak tahun 1947. Akibat hal tersebut Mrs O'Keefe

---

<sup>101</sup> "Deportation Of Aliens And Immigrants From Australia", [www.jstor.com](http://www.jstor.com), *loc.cit.*,

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Mrs. O'Keefe sendiri diberikan waktu 10 hari untuk mengajukan banding dalam kasusnya di Pengadilan Tinggi, dengan syarat jika ia ditolak kewarganegaraan Australia harus segera meninggalkan Australia. National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian.

diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Australia bahwa ia bukan imigran ilegal, karena ia tidak mengikuti tes dikte.<sup>104</sup> Pihak Pengadilan Tinggi juga menyatakan bahwa Mrs O'Keefe dan anak-anaknya datang dari Hindia Belanda atau Indonesia dan mendarat di Darwin sebagai pengungsi lalu mereka dibawa ke Melbourne di bawah kendali pemerintah Belanda bukan Pemerintah Australia. Oleh karena itu, Menteri imigrasi tidak lagi memiliki wewenang untuk mendeportasi Mrs. O'Keefe dan keluarganya.

Pada tanggal 18 Maret 1949, empat dari enam hakim di Pengadilan Tinggi Australia, memutuskan bahwa Mrs. Annie O'Keefe dan anak-anaknya bisa tinggal di Australia. Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa Menteri Imigrasi Australia yaitu Mr. Calwell tidak mungkin dapat mendeportasi Mrs.O'Keefe dan keluarganya. Keputusan tersebut menandakan bahwa kekuasaan yang diperoleh Calwell adalah terbatas. Kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh Calwell secara ketat dianggap oleh Pengadilan Tinggi Australia telah menyebabkan keputusan yang tidak berperikemanusiaan.<sup>105</sup> Mrs.O'Keefe akhirnya diterima sebagai warga negara Australia secara resmi. Keputusan pihak Pengadilan Tinggi yang memutuskan untuk tidak mendeportasi Mrs.O'Keefe dari Australia didasari oleh pernyataan dari pihak Pengadilan Tinggi di koran *Sydney Morning Herald* tanggal 19 Maret 1949, yang isinya sebagai berikut:

*“... The fact that she is the wife of an Australian and therefore possesses certain rights of citizenship, was not pressed to a legal issue. The majority judgment in her favour was concerned with the limitations imposed on the Government's power to deport by section 4 of the Immigration Act. The White Australia Policy has never been in question in the O'Keefe controversy, and if its proper implementation is really imperilled by weaknesses in the Immigration Act, these can easily be repaired. What has been in question more than anything else in this lamentable affair is the Minister's rigid and short sighted administration of a policy that was already a sore point with many coloured people. Mr. calwell, by his ill-judged zeal in trying to push out of this country all of the few wretched aliens who had been involuntarily planted here by the war, has converted the score point into a raw wound. Whereas intelligent Asiatics were willing to concede that Australia had*

---

Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. MRS.O'KEEFE FIGHTING FUND“, Extract Daily Telegraph (Sydney) 14-2-1949, S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au)., diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

<sup>104</sup> H.I London, *Non-White Immigration and The “White Australia” Policy (The Development of the “White Australia” Policy)*, Sydney: Sydney University Press, 1970, hlm.16.

<sup>105</sup> National Archive of Australia Collection, “Commonwealth of Australian. Department of Immigration”, FILE OF PAPERS, 49/2/385, Citizen Rights, Sydney Daily Telegraph-March 19,1949, S2/3418, Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

*a justifiable economic basis for her immigration policy, there is now a dangerous tendency to see it as an offensive manifestation of racialism. ...*<sup>106</sup>

Berdasarkan pernyataan dari pihak Pengadilan Tinggi tersebut, dapat dijelaskan bahwa keputusan diizinkan Mrs.O'Keefe dan anak-anaknya untuk tinggal di Australia didasari alasan bahwa Mrs.O'Keefe telah menjadi istri warga Australia, yang membuat Mrs.O'Keefe memiliki hak-hak tertentu dari kewarganegaraan Australia serta tidak dapat ditekan dalam masalah hukum. Ditambahkan juga bahwa penilaian mayoritas pendukungnya yang merasa prihatin terhadap keluarga O'Keefe telah memunculkan pandangan baru mengenai kebijakan pembatasan imigrasi dari Pemerintah untuk melakukan kebijakan deportasi di bagian 4 dari Undang-Undang Imigrasi. Diakui juga oleh pihak Pengadilan Tinggi bahwa Kebijakan Australia Putih belum pernah di pertanyakan dan menjadi kontroversi sebelum kasus O'Keefe muncul. Dengan munculnya kasus O'Keefe telah memunculkan suatu implementasi yang tepat terhadap bahaya dari adanya kelemahan Undang-Undang Imigrasi Australia sehingga dapat diperbaiki dengan mudah. Dikatakan juga bahwa kebijakan deportasi yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini adalah Calwell disesalkan oleh pihak Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa kebijakan imigrasi terhadap imigran kulit berwarna yang dibuat oleh Calwell terkesan kaku dan cepat. Sehingga Calwell dalam membuat kebijakan imigrasi telah mengabaikan hukum yang berlaku. Bagi pihak Pengadilan Tinggi, Calwell sebagai Menteri Imigrasi kurang bijaksana dalam membuat kebijakan imigrasi terhadap imigran asing, yang menimbulkan pandangan warga Asia Australia yang sebelumnya mengakui bahwa Kebijakan Australia Putih berdasarkan segi ekonomi menjadi memiliki pandangan yang cenderung negatif terhadap adanya manifestasi rasialisme di Australia.

---

<sup>106</sup> National Archive of Australia Collection, "High Court Rebuff For Mr. Calwell, " THE SYDNEY MORNING HERALD"- MARCH,19, 1949. File Department File in Canberra, 21-3-1949, S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.35WIB.

### 3.3 Respon Masyarakat dan Pemerintah Australia Terhadap Kasus O'Keefe

Kasus deportasi O'Keefe adalah salah satu kasus perjuangan orang Asia<sup>107</sup> dalam menentang Kebijakan Australia Putih yang cukup penting di Australia. Akibat dari tindakan Pemerintah Australia dalam mendeportasi Mrs. O'Keefe dan anak-anaknya, Mrs. O'Keefe telah menjadi salah satu dari beberapa mantan pengungsi yang menolak untuk dipulangkan serta menjadi bahan pemberitaan di beberapa media di Australia. Respon tersebut berasal dari Masyarakat Australia sendiri (baik yang mendukung<sup>108</sup> dan yang tidak mendukung), Pemerintah, media yang berasal dari luar negeri yang mengetahui kasus O'Keefe.

#### 3.3.1 Respon Masyarakat Australia

Respon masyarakat Australia terhadap tindakan deportasi yang dilakukan oleh Calwell terhadap Mrs O'Keefe mendapat respon yang cukup beragam dari masyarakat Australia. Hal tersebut didasarkan pada banyaknya surat yang masuk ke Perdana Menteri Chifley yang isinya banyak yang mendukung Mrs.O'Keefe agar tetap tinggal di Australia. Hal itu berdasarkan surat dari Frederick.I.T.Humpries kepada Perdana Menteri Chifley, yang isinya sebagai berikut:

*"...Is an Australian ciltizen and a firm labour supporter I wish to lodge my strongest protest against the action of the Minister for Immigration in Calwell, in enforcing the deportation of Mrs. Annie O'Keefe and her eight children. I also entreat your intervention on their behalf to allow them To remain in Australia. With my wife and daughter. I had she good fortune to be she occupant of Mr. O'Keefe upstairs flat for seven months of last year and in that time came to know Mr. O'Keefe and her children very well. Of this fine family at Bonbeach. The children hence proved shemaches extremely good in their schooling at St. Josephs R.C school at Chelsea. Three of them*

<sup>107</sup> Pada tahun 1947, terdapat juga beberapa orang Asia yang dideportasi salah satunya adalah para nelayan asal Malaysia. Adapun nama dari para nelayan Malaysia itu adalah; Wahdee bin Mohamad Noor, seorang British Subject, yang tiba di Australia sebagai anggota kru SS "Klang" pada tahun 1941; Harun bin Sulong, seorang British Subject asal Singapura yang tiba di Australia pada tahun 1936 bekerja dalam bidang Industri di Broome Pearling sebagai sopir.; Abdul Samad bin Anjah, seorang British Subject yang datang ke Australia pada tanggal 16 Desember 1941; Nawar bin Awee, ia datang ke Australia pada tahun 1941. Pada tahun 1944. ia bergabung dengan Angkatan Darat Amerika dibagian Transportasi dan bertugas di wilayah Pasifik pada tahun 1946.; Amid bin Drani, ia datang ke Australia tepatnya kota Sydney tahun 1943. National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration", FILE OF PAPERS. 49/2/385, 7<sup>th</sup> July, 1948. S2/3418, Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

<sup>108</sup> Masyarakat Australia yang terlibat dalam mendukung kasus O'Keefe, terdiri dari masyarakat kota Melbourne dan kota Sydney (terutama tetangga keluarga O'Keefe), para tokoh Gereja, pelaut Asia, pengungsi dan para substitusi seperti mahasiswa, para istri dan keluarga dari semua imigran Asia. National Archive of Australia Collection, "White Australia Policy Threatened" Calwell's fears on O'Keefe ruling. Melbourne Argus. 24 -3-1949", Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret of 2010, Pukul 15.30WIB).

*gained first pace in their respective classes while two others were high up. So break off this education by forcing them to leave would be criminal. Ann she elder is an accomplished linguist and holds a responsible position in the Dutch Consulate. The younger children know no country than Australia having lived had since 1942 and know no language except English Mrs.O'Keefe is a British Subject and a Christian and to remove a woman and eight children to a land , which would be foreign to the children. Where discontent and trouble is wife would be contrary to freedom and tolerance which me regard as our Australian way of living. There is little time before Feb 28<sup>th</sup> and sincerely hope you an investigate the position and come to see is as we do. Allow them to stay here in happiness and peace... ”<sup>109</sup>*

Berdasarkan surat tersebut, dapat dijelaskan bahwa keinginan masyarakat Australia terhadap perjuangan Mrs.O'Keefe sangat besar. Hal tersebut didasarkan oleh adanya pernyataan dari Frederick bahwa masyarakat Australia dan para buruh mendukung agar Mrs.O'Keefe dan anak-anaknya tetap tinggal di Australia. Ia juga menginginkan adanya campur tangan Perdana Menteri atas nama masyarakat agar Mrs.O'Keefe dan keluarganya tetap tinggal di Australia. Ditambahkan juga bahwa Frederick berusaha meyakinkan Pemerintah dalam suratnya bahwa keluarga O'Keefe sangat baik untuk tinggal di Australia. Di dalam surat tersebut juga diceritakan bahwa Mrs. O'Keefe adalah seorang ahli bahasa dan telah memegang posisi yang bertanggung jawab langsung di Konsulat Belanda. Mr. Frederick dalam suratnya juga berharap agar Pemerintah Australia bersedia menyelidiki kembali kebijakan deportasi terhadap keluarga O'Keefe seperti yang dilakukan oleh masyarakat Australia agar Mrs.O'Keefe dan anak-anaknya dapat tinggal di Australia secara damai.

Dukungan masyarakat Australia terhadap kasus O'Keefe, selain berasal dari masyarakat Australia sendiri juga berasal dari sesama imigran Asia yang mengalami kasus serupa. Salah satunya adalah Mrs.Ernest Goulding (sebelumnya

---

<sup>109</sup> National Archive of Australia Collection, “ Deportations from Australia – Mrs O'Keefe and eight children” 1949– 50A1838, 1477/2/11. Frederick.I.T. Humphries. To Prime Minister the Hon. J.B.Chifley. GS.Wellington Street, Windsor S1 Victoria 28-1-49 p. 53-55, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au)., diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB.

bernama Gwenda Yee<sup>110</sup>). Dukungan yang kuat dari Mrs. Goulding terhadap Mrs. O'Keefe didasarkan pada pernyataannya, yang isinya sebagai berikut:

*"... I know how she feels , because I went through the same dreadful ordeal myself. ' I am with her all the way. I think it is a terrible shame that Calwell should deport this poor woman. she is not doing any harm in Australia. from all accounts , she and her children are very decent people. I wonder how Calwell would feel if he were in her place? But Calwell doesn't think of that, does he? No, because Calwell has no feeling at all. I am quite sure he hasn't got a heart..."*<sup>111</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, menerangkan bahwa Mrs. Goulding merasa prihatin terhadap masalah yang menimpa keluarga O'Keefe dan marah terhadap sikap Pemerintah terhadap kasus tersebut. Hal itu didasarkan oleh pernyataan bahwa ia pernah merasakan hal yang dirasakan oleh Mrs. O'Keefe. Ditambahkan juga, bahwa Mrs. Goulding sangat kecewa terhadap sikap yang dibuat oleh Calwell dan menyatakan bahwa Calwell adalah seseorang yang tidak memiliki perasaan dan hati nurani.

Perjuangan keluarga O'Keefe dalam mendapatkan hak untuk tinggal di Australia tidak hanya dilakukan oleh Mr. dan Mrs. O'Keefe saja. Keluarga O'Keefe didukung oleh para penduduk di kota Melbourne. Para penduduk kota Melbourne mengumpulkan uang berupa sumbangan untuk keluarga O'Keefe dalam menjalani persidangan di Pengadilan Tinggi Australia melawan Pemerintah Australia.<sup>112</sup> Kegiatan pengumpulan dana<sup>113</sup> tersebut disponsori oleh Koran *The Daily Telegraph* untuk membantu Mrs. O'Keefe mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi terhadap perintah Menteri imigrasi (Mr. Calwell) yang

<sup>110</sup> Gwenda Yee datang ke Australia pada tahun 1947. Pada saat ia berusia 19 tahun, ia bersembunyi di Australia selama lima bulan dari pihak otoritas Imigrasi Australia yang berusaha mendeportasinya ke Cina. Namun demikian, nasib Mrs. Ernest cukup beruntung ia dipersunting oleh Mr. Arthur Debenham S.M. Goulding untuk menjadi istrinya pada saat ia bekerja di daerah Rookwood. National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australia. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. W. Morgan. CHINESE GIRL HELPS FUND. Extract Daily Telegraph Sydney, 16-2-1949. "S2/3418". Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30 WIB).

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> The Sunny Australia?, "The Annie O'Keefe Story", Making History-Middle Secondary Units (Investigating People and Issues in Australia after World War II), page. 27, [www.google.co.au](http://www.google.co.au), diunduh pada Hari Minggu, tanggal 28 Februari 2010, Pukul 09.15 WIB.

<sup>113</sup> Total sekitar £ 747/9/6, uang yang terkumpulkan dari pengumpulan dana Koran Daily Telegraph untuk membantu Mrs. O'Keefe dan keluarganya. National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australia. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. £747 given to O'Keefe fund. Sunday Telegraph", S2/3418, Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30 WIB).

mendeportasi keluarga O'Keefe dari Australia.<sup>114</sup> Kasus O'Keefe menjadi hal yang cukup menarik bagi masyarakat Australia pada waktu itu, karena bagi mereka keadilan dan toleransi telah gagal dilaksanakan oleh Pemerintah Australia.

Selain masyarakat kota Melbourne yang menyumbangkan dana terhadap kasus O'Keefe. Warga kota Sydney juga melakukan hal yang serupa, mereka melakukan penggalangan dana hingga berjumlah £ 117 untuk Daily Telegraph, yang ditujukan bagi perjuangan Mrs Annie O'Keefe melakukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk melawan kebijakan deportasi terhadap keluarga O'Keefe dari Australia. Total jumlah dana yang diperoleh oleh Mrs. O'Keefe dari masyarakat kota Sydney berjumlah hampir £ 385/13.<sup>115</sup> Pengumpulan dana yang dilakukan oleh koran "*Sydney Daily Telegraph*" pada saat itu telah mendapat uang sejumlah 400 Dollar Australia, tiga hari setelah pengumpulan dana dimulai.<sup>116</sup>

Pengumpulan dana yang dilakukan oleh masyarakat Australia terhadap kasus O'Keefe, selain dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat<sup>117</sup>. Pengumpulan dana tersebut juga dilakukan oleh 12 karyawan sebuah kafe di kota Sydney dengan berlangganan £ 9 koran Daily Telegraph untuk membantu Mrs Annie

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. O'KEEFE APPEAL FUND GROWS", Extract Sydney "Daily Telegraph" Tuesday, 15-2-1949. S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB. Adapun perincian nama warga kota Sydney yang menjadi donatur serta jumlah uang yang disumbangkan dapat dilihat dalam lampiran.16.

<sup>116</sup> Surat Kabar Merdeka ( Suara Rakyat Republik Indonesia), PERKARA O'KEEFE DIMAJUKAN KE MAHKAMAH, Djakarta, Kamis, 17 Pebruari 1949, 18 Rabiul Achir 1368 Edisi Malam No.949, Tahun ke-V, Tahun Republik IV, hlm.3.

<sup>117</sup> Pengumpulan dana tersebut diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat kota Melbourne, salah satunya adalah Pastor Bapa Fitzpatrick dari Gereja Katolik Roma di kota Chelsea, dan Dr. R. Soeuf sebagai pimpinan yang mengadakan penggalangan dana untuk membantu Mrs.O'Keefe. National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. ANYNOMOUS £100 FOR FUND, Extract " Daily Telegraph, Sydney, Friday, 15-2-1949." S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret of 2010, Pukul 15.30WIB. Diantara para donatur yang memberikan sumbangan, terdapat nama beberapa Artis Australia yang terkenal, bernama Eugene Gossens, *dirrigent symphonie –orchest Sydney*, dan William Dobell. Serta tiga orang sarjana hukum dari Sydney, yang mendapat pangkat "*kings counceI*" dan tiga orang opsir Angkatan Udara Australia, yang tidak disebut namanya, yang ditempatkan di Ambon dimana suami pertama nyonya O'Keefe dilahirkan. Surat Kabar Merdeka ( Suara Rakyat Republik Indonesia), PERKARA O'KEEFE DIMAJUKAN KE MAHKAMAH, Djakarta, Kamis, 17 Pebruari 1949, 18 Rabiul Achir 1368 Edisi Malam No.949, Tahun ke-V, Tahun Republik IV, hlm.3.

O'Keefe melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Australia. Dana yang telah dikumpulkan mencapai total £ 540/12.<sup>118</sup>

Masyarakat Australia yang mendukung perjuangan keluarga O'Keefe merasa senang dengan keputusan Pengadilan Tinggi terhadap Mrs.O'Keefe, yang tidak jadi dideportasi dari negara Australia. Suasana suka cita<sup>119</sup> atas kemenangan keluarga O'Keefe di Pengadilan Tinggi Australia juga dialami oleh masyarakat Australia yang sejak awal mendukung perjuangan Mrs.O'Keefe. Hal tersebut berdasarkan laporan dari surat pembaca di koran Australia, yang isinya sebagai berikut:

*"...The court ruled in Mrs O'Keefe favor. Having been arbitrarily evacuated to Australia, it said she was not a "prohibited immigrant" and could not be deported. The O'Keefe could stay. Australia threw its hat in the air..."*<sup>120</sup>

Isi surat pembaca tersebut, menerangkan bahwa pada saat itu masyarakat Australia sangat memperhatikan dan mendukung perjuangan yang dilakukan oleh Mrs.O'Keefe untuk memperoleh hak untuk tinggal di Australia. Hal tersebut didasarkan pada hasil dari peraturan yang dibuat oleh pihak pengadilan telah membuat senang Mrs. O'Keefe dan masyarakat Australia, serta didasari juga oleh perhatian masyarakat Australia terhadap perjuangannya sejak ia dievakuasi ke Australia pada masa perang sampai deportasi yang dialaminya. Hal itu juga ditandai dengan Mrs O'Keefe yang mengatakan bahwa dirinya bukan seorang "*prohibited immigrant*" dan dapat tinggal di Australia serta tidak bisa untuk dideportasi, disambut dengan suka cita oleh masyarakat Australia.

Selain adanya respon dari masyarakat Australia yang mendukung kasus O'Keefe. Terdapat juga respon dari masyarakat atau organisasi<sup>121</sup> yang tidak

---

<sup>118</sup> National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration, FILE OF PAPERS. 49/2/385. CAFÉ WORKERS HELP APPEAL", Extract Sydney Daily Telegraph, 17-2-1949,S2/3418,Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB. Adapun nama-nama yang menyumbang serta jumlah uang yang disumbangkan dapat dilihat dalam lampiran 17.

<sup>119</sup> Ketika berita kemenangan kasus O'Keefe disiarkan di radio, seorang biarawati (yang bernama Sister Paula) mengumumkan ke semua kelas di sekolah St Joseph, tempat bersekolahnya enam dari delapan anak-anak keluarga O'Keefe. Menurut sebuah laporan di koran tempat tinggal keluarga O'Keefe, para siswa disana bertepuk tangan dan bersorak. Di rumah keluarga O'Keefe setelah mereka mendengar berita tersebut secara spontan mereka merayakannya dengan menari. The Sunny Australia?, "The Annie O'Keefe Story", Making History-Middle Secondary Units (Investigating People and Issues in Australia after World War II), hlm. 27, [www.google.co.au](http://www.google.co.au), diunduh pada Hari Minggu, tanggal 28 Februari 2010, Pukul 09.15 WIB.

<sup>120</sup> "This World...Mrs. O'Keefe Spurs an Alliance", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*,

mendukung Mrs. O’Keefe dan mendukung tindakan Pemerintah Australia untuk mendeportasinya. Hal tersebut secara jelas diterangkan oleh surat yang ditujukan untuk Calwell dari seorang wanita bernama Kathleen Hames, yang isinya sebagai berikut:

*“...I wish to convey my sincere sympathy on the adverse decision of the High Court on the O’Keefe case, and the ill-natured gloating of the press. As a thinking person, I have always deplored the attitude of the press in upholding lawbreakers and provoking public hysteria on obscure issues. I consider you are doing a magnificent job in keeping Australia white in the face of such opposition and I am sure your efforts are appreciated by the majority of intelligent Australians. I hope you will be able to amend the Act in order to keep up your good work...”*<sup>122</sup>

Berdasarkan surat dari Kathleen Hames tersebut, dapat dijelaskan bahwa para pendukung tindakan Calwell terhadap kasus O’Keefe didasari oleh tujuan agar Pemerintah Australia tetap menjaga Australia Putih di Australia. Hal itu didasarkan oleh pernyataan bahwa rasa simpati dari Kathleen secara tulus terhadap pemerintah atas keputusan Pengadilan Tinggi yang merugikan Pemerintah serta banyaknya media yang marah atas sikap Calwell. Ditambahkan juga bahwa Kathleen menyesalkan sikap pers dalam mendukung pelanggaran hukum (dalam hal ini adalah Mrs. O’Keefe) serta banyaknya isu publik yang memprovokasi masyarakat. Kathleen pun menerangkan bahwa ia menghormati pekerjaan Calwell yang luar biasa dalam menjaga Australia putih serta menginginkan Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang dalam menjaga Kebijakan Australia Putih.

### **3.3.2 Respon Pemerintah Australia**

---

<sup>121</sup> Satu-satunya organisasi nasional yang secara sah melakukan tindakan tegas melawan publik mengenai Kebijakan imigrasi yang dilakukan Pemerintah adalah *the Australian Conservation foundation*. Organisasi yang mendukung Australia Putih tersebut telah menyatakan oposisi mereka, terutama terhadap imigran non British dan imigran kulit berwarna. Namun demikian, dukungan dari organisasi tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari perdebatan bahkan terkesan diabaikan dalam kasus O’Keefe, karena organisasi tersebut belum dapat mengumpulkan bukti adanya dukungan dari masyarakat. Robert Birell, *op.cit.*, hlm. 240.

<sup>122</sup> National Archive of Australia Collection, “ Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. (Miss) Kathleen Hames, letter for Mr. A.A. Calwell, Dept. of Immigration Canberra, A.C.T. 392 Edecliff Road, Edgecliff, N.S.W. 21st March, 1949”, S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30 WIB.

Banyaknya dukungan dari masyarakat Australia yang mendukung keluarga O'Keefe mendapat tanggapan dari Pemerintah. Hal itu berdasarkan pidato Mr. Calwell di *House of Representative*, yang isinya sebagai berikut:

*"... Had seized upon the O'Keefe case to run a political campaign to try to water down the White Australia Policy. It is a great pity this insignificant case should be made the subject of so much dislocation and discussion. I have seen a lot of subscriptions contributed by people who remain anonymous. Apparently they are ashamed of their efforts to smash the White Australia Policy. The law will take its course and the policy will not be watered down or broken down..."*<sup>123</sup>

Berdasarkan pidato dari Calwell tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Australia yang diwakili oleh Calwell tetap kuat untuk mempertahankan Kebijakan Australia Putih dengan melakukan deportasi terhadap Mrs.O'Keefe. Walaupun, banyaknya pemberitaan yang mendukung Mrs.O'Keefe, bagi Pemerintah Australia telah menjadi bentuk kampanye politik yang mencoba untuk mempermudah Kebijakan Australia Putih. Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Calwell yang agak sinis terhadap masyarakat yang mendukung kasus O'Keefe dengan menganggap pendukung tersebut malu dari upaya mereka untuk menghancurkan Kebijakan Australia Putih, serta adanya pernyataan bahwa hukum kebijakan imigrasi tersebut tidak akan dipermudah atau rusak.

Tindakan pengumpulan dana dari masyarakat Australia untuk membantu keluarga O'Keefe mendapat respon juga dari pihak Departemen Imigrasi dan Informasi yang diwakili oleh Mr. Daly dalam opininya di Koran *Sydney Daily Telegraph*, yang isinya sebagai berikut:

*"... Has been started by the Sydney Daily Telegraph? He has also noticed that among the principle subscribers to the fund are Mr.J.Casside, K.C., Dr. F.A.Maguire, Councillor J.O.Cramer and other active members and supporters of the Liberal party? In view of the support given to this fund, ad the opposition to the Minister regarding the O'Keefe case by these prominent members of the Liberal party, will the Minister make inquiries, in the interests of the Australian people, to ascertain whether or not the Liberal party, in co-peration with the Daily Telegraph, is prepared to water down or a handom the White Australia Policy?. Apparently those people are so ashamed of their efforts to smash the White Australia Policy that they do not want their names to be known. However, the law will take its course, and the White Australia policy will not be broken down or watered down. If there is to be a fight in this country on the White Australia issue-the first since Federation – in my opinion it is the best issue on which the next federal elections could be fought..."*<sup>124</sup>

<sup>123</sup> "O'Keefe Writs Issued In High Court", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*,

<sup>124</sup> National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. O'KEEFE FAMILY", Hansard Tuesday, 15/2/1949.Extract Sydney Daily Telegraph Tuesday, 15-2-1949, S2/3418 Style Sheet,[www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

Berdasarkan pernyataan dari Mr. Daly tersebut, menerangkan bahwa diantara donatur yang membantu pengumpulan dana tersebut tercatat nama pendukung yang bernama; Mr.J.Casside, KC, Dr F.A.Maguire, *Councillor* J.O.Cramer yang merupakan anggota Partai Liberal di New South Wales. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari pihak Pemerintah terhadap pihak oposisi terutama kepada para anggota terkemuka dari partai Liberal dalam melakukan tindakan kerja sama dengan pihak Koran *Daily Telegraph*, yang dibuat untuk mempermudah atau menghancurkan Kebijakan Australia Putih. Ditambahkan juga dengan banyaknya donatur yang anonim menurut Mr. Daly adalah masyarakat Australia yang memberikan uangnya sangat malu dari upaya mereka untuk menghancurkan Kebijakan Australia Putih. Hal tersebut disebabkan para donatur tersebut tidak ingin nama mereka dikenal. Ditambahkan juga, bahwa pengumpulan dana tersebut menjadi isu penting sejak Federasi Australia dibentuk. Dimana isu tersebut menjadi isu terbaik yang diangkat pada Pemilihan Umum Federal yang akan dilaksanakan di Australia.

Pemerintah Australia dari pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri Chilfley menyatakan kekecewaannya terhadap hasil keputusan Pengadilan Tinggi Australia terhadap kasus O'Keefe. Hal itu berdasarkan pernyataan dari Menteri Imigrasi Australia, Arthur calwell, yang mengumumkan bahwa ia akan memperkenalkan sebuah peraturan imigrasi baru ke Parlemen Federal. Jika, peraturan tersebut disahkan akan memungkinkan Departemen Imigrasi untuk dapat mengirim Mrs.O'Keefe dan anak-anaknya kembali ke Indonesia. Akan tetapi, keluarga O'Keefe tidak terpengaruh oleh tindakan dari Pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan, pada tahun 1949, pemerintah Buruh kehilangan kekuasaannya dalam Pemilu di tingkat Federal oleh Partai Liberal.<sup>125</sup>

### **3.3.3 Respon Masyarakat Luar Negeri**

---

<sup>125</sup> The Sunny Australia?, "The Annie O'Keefe Story", Making History-Middle Secondary Units (Investigating People and Issues in Australia after World War II)," p.28, [www.google.co.au](http://www.google.co.au), diunduh pada Hari Minggu, tanggal 28 Februari 2010, Pukul 09.15 WIB.

Selain munculnya respon dari masyarakat di dalam Australia sendiri terhadap kasus O'Keefe. Muncul juga beberapa respon dari masyarakat yang berada di luar negeri. Adapun respon dari media di luar negeri terhadap masalah O'Keefe berasal dari Amerika Serikat dan Singapura. Di Amerika Serikat yaitu di koran *New York Herald Tribune* pada tanggal 10 Februari 1949 menerbitkan sebuah kolom laporan berita wawancara dengan Mr.O'Keefe, mengenai deportasi yang menimpa keluarganya dan komentar dari Mr.Calwell di Parlemen dengan judul “ *Wife Exiled as Asian by Australia*”. Pada tanggal yang sama juga berita mengenai kasus O'Keefe menjadi *Headline* di koran Singapura *Strait Times*, dengan judul “ *Calwell Hits at Dutch and English –Calwell accuses Dutch of plot*”, yang isinya mengenai hubungan Australia dan Belanda yang memanas akibat adanya kasus O'Keefe. <sup>126</sup>

Di Singapura sendiri kasus O'Keefe menjadi pembicaraan yang hangat oleh masyarakatnya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya berita mengenai kasus O'Keefe di halaman depan beberapa surat kabar di Singapura. Ditambah juga adanya pernyataan dari Mr.A.C. Simmons mantan anggota AIF dan direktur pengelola surat kabar Singapura *Free Press* dan *Straits Times*, yang mengatakan bahwa reaksi pertama terhadap pidato Mr Calwell mengenai kasus O'Keefe adalah bentuk penghinaan dan rasa sentimen terhadap Asia. Hal itu disampaikan oleh Mr.A.C.Simmons secara langsung, yang isinya sebagai berikut:

“...Asia will judge Calwell, and perhaps Australia, by his actions and utterances. Calwell cannot change Australia's geographical position, nor Australia's need for good relations with Asia...”<sup>127</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Mr. A.C.Simmons tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat Asia sangat kecewa terhadap apa yang dikatakan Calwell. Hal itu didasarkan oleh pernyataan bahwa masyarakat Asia akan menghakimi Calwell dan Pemerintah Australia berdasarkan tindakan dan ucapannya. Ditambahkan juga oleh Mr. Simmons bahwa Calwell tidak dapat mengubah posisi geografis

---

<sup>126</sup> National Archive of Australia Collection, “Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. “CALWELL SAYS O'KEEFE ARE “STOOGES” OF DUTCH, Melbourne Argus, 11-2-1949” “S2/3418”, Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au)., diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

<sup>127</sup> *Ibid.*

Australia, maupun kebutuhan Australia untuk melakukan hubungan baik dengan Asia.

Respon juga muncul di Malaysia terhadap kasus O'Keefe yang berasal dari ketua "*Malay Nasionalist Party*", yang bernama Taha Kalu di koran *Melbourne Herald* yang dipublikasikan oleh Koran Merdeka, yang isinya sebagai berikut: " Kami akan mengadakan rapat khusus untuk membitjarakan soal pengusiran orang-orang Indonesia dari Australia. Ini kali kami akan bertindak".<sup>128</sup> Berdasarkan pernyataan dari Taha Kalu tersebut, dapat dijelaskan bahwa kasus O'Keefe telah menjadi masalah yang serius dan terus diperbincangkan oleh masyarakat Asia.

Respon terhadap kasus O'Keefe juga ditanggapi di Indonesia. Hal tersebut didasarkan pemberitaan dari koran Merdeka yang terbit tanggal 11 Februari 1949. Hal tersebut berhubungan dengan munculnya berita dari Australia mengenai kemungkinan Mrs. O'Keefe akan dikeluarkan dari Australia. Hal itu memunculkan respon dari Sultan Hamid II, kepala daerah Kalimantan Barat, berdasarkan pernyataannya yang disampaikan kepada kantor berita Australia "Aneta" di Jakarta, yang isinya sebagai berikut:

"...bahwa djika berita ini benar adanja, hal ini akan menjebabkan warga2 negara Australia disuruh keluar dari Kalimantan Barat. Sultan Hamid II mengharap, supaya negara2 bagian jang lain akan bertindak sedemikian rupa..."<sup>129</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Sultan Hamid II tersebut, dapat dijelaskan bahwa Sultan Hamid II mengancam pihak Australia jika mengusir keluarga O'Keefe dari Australia. Sultan Hamid II juga memastikan bahwa semua warga Australia tidak akan diterima di Kalimantan Barat dan berharap wilayah Indonesia lainnya akan mengikuti tindakannya itu.

Selain itu, terdapat juga pernyataan yang berasal dari Perwakilan Indonesia di Singapura, yang bernama Dr.Oetoyo dalam koran "*Melbourne Herald*" di Singapura, yang isinya sebagai berikut:

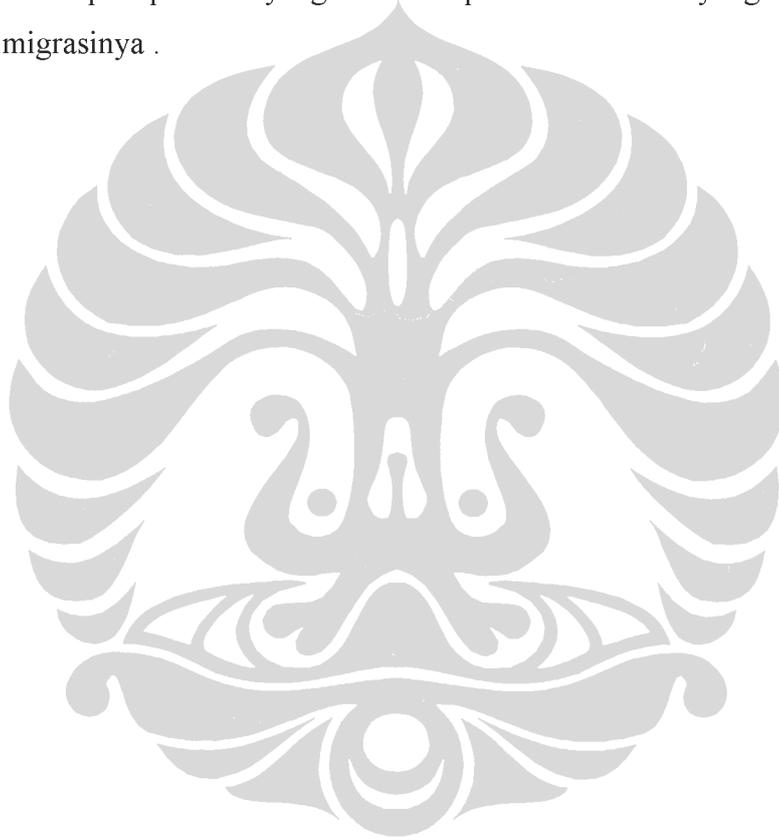
---

<sup>128</sup> Surat Kabar Merdeka ( Suara Rakyat Republik Indonesia), Tentang pengusiran keluarga O'Keefe dari Australia, Djakarta, Kemis, 3 Pebruari 1949, 4 Rabiul Achir 1368 Edisi Malam No.949, Tahun ke-V, Tahun Republik IV, hlm. 4.

<sup>129</sup> \_\_\_\_\_, Menteri Calwell kontra Legasi Belanda-Sultan Hamid II antjam Australia, Djakarta, Djum'at, 11 Pebruari 1949, 12 Rabiul Achir 1368 Edisi Malam No.949, Tahun ke-V, Tahun Republik IV, hlm.1.Lihat selengkapnya pada lampiran 18.

*"...Backed by the righteous indignation of the Australian public, the Australian Government will surely veto the inhuman decision of their Immigration Minister..."*<sup>130</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Dr. Oetoyo tersebut menerangkan bahwa pemimpin Indonesia pada saat itu memperhatikan kasus O'Keefe yang terjadi di Australia. Hal itu dibuktikan dari pernyataan bahwa ia mengetahui munculnya kemarahan dari masyarakat Australia berkenaan dengan kebijakan deportasi yang dilakukan terhadap Mrs. O'Keefe dan anak-anaknya. Ditambahkan juga bahwa Pemerintah Indonesia percaya Pemerintah Australia akan melakukan veto terhadap keputusan yang tidak berperikemanusiaan yang dibuat oleh menteri imigrasinya .



---

<sup>130</sup> National Archive of Australia Collection,"Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. HITCH OVER MRS.O'KEEFE- TO DUTCH, SHE'S BRITISH -Doubt On Powers", Melbourne Herald, 2-2-1949,S2/3418, Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au)., diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

## BAB 4

### DAMPAK KASUS O'KEEFE TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI AUSTRALIA

#### 4.5 Hubungan Masyarakat Australia dengan Pemerintah

Kebijakan deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap kasus O'Keefe telah menyebabkan hubungan antara masyarakat dan Pemerintah Australia memburuk. Banyak masyarakat Australia yang benci terhadap sikap Pemerintah terutama Calwell pada saat kasus O'Keefe berlangsung. Hal itu didasarkan dengan munculnya julukan bagi Calwell sebagai seorang tirani (*Tyrannical man*).<sup>131</sup> Kebijakan imigrasi yang dibuat oleh Calwell berhasil menimbulkan kemarahan bagi publik Australia atas perlakuan nya yang tidak simpatik dan tidak adil terhadap para imigran kulit berwarna. Salah satu pendukung Mrs. O'Keefe menyebutkan bahwa pemerintahan Calwell bersifat arogan dan tidak berperikemanusiaan. Hal itu didasarkan oleh adanya surat dari Mr. Macken (salah satu pendukung Mrs.O'Keefe) kepada Perdana Menteri Australia Mr.Chifley, yang isinya sebagai berikut, "...Mr. Calwells arrogant and inhumane administration in the Case.."<sup>132</sup> Berdasarkan surat dari Mr. Macken tersebut, dapat dijelaskan bahwa pandangan masyarakat Australia pada saat itu sudah sedemikian marah terhadap sikap Menteri Imigrasi Australia, yaitu Mr. Calwell. Hal tersebut didasarkan oleh adanya pernyataan bahwa pemerintahan Calwell bersifat arogan dan tidak berperikemanusiaan. Ditambahkan juga bahwa Mr. Macken yang simpati terhadap kasus O'Keefe mengancam Perdana Menteri Chifley, bahwa ia tidak akan memilih Partai Buruh pada Pemilihan Umum nanti. Hal itu didasarkan pada pernyataannya yang mengatakan, "...but now the O'Keefe case has caused me to swear to vote against labor as a lesson to the party..."<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. "O'KEEFE ORDER SEEN A BLOW TO GOODWILL Grounds 'Not Economic' "S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

<sup>132</sup> National Archive of Australia Collection, " Deportations from Australia – Mrs O'Keefe and eight children" 1949– 50A1838, 1477/2/11. MR.F.Macken. to Prime Minister Canberra. 110 George Street, Parramatta. 6.2.49" p. 51, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat,Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.19

<sup>133</sup> *Ibid.*

Dampak yang ditimbulkan oleh kasus O'Keefe bukan hanya berdampak pada hubungan masyarakat dengan Pemerintah Australia saja. Kasus O'Keefe berdampak juga terhadap hubungan pihak Gereja atau tokoh agamawan terhadap Pemerintah Australia. Hal tersebut diawali dengan munculnya dukungan yang berasal dari seorang moderator Gereja Presbyterian (Rt Rev AS. Houston). Mr. Houston menyatakan bahwa tindakan deportasi yang dilakukan Pemerintah Australia terhadap keluarga O'Keefe bertentangan dengan tujuan dari kebijakan Australia Putih, yang diklaim sebagai kebijakan imigrasi yang didasarkan atas ekonomi daripada ras. Dukungan dari pihak Gereja Australia tersebut dilatarbelakangi oleh adanya permintaan bantuan dari pihak keluarga O'Keefe terhadap pihak Gereja. Tindakan pihak gereja untuk menolong keluarga O'Keefe dengan cara menelepon Menteri Imigrasi yaitu Calwell atas nama *Archibishop* Katolik Roma dari Melbourne (Dr Mannix). Akan tetapi, permintaan dari pihak gereja ditolak oleh Mr Calwell yang mengatakan bahwa permohonan untuk penangguhan hukuman deportasi keluarga O'Keefe tidak bisa dilaksanakan. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Mr. Calwell kepada koran di Australia, yang isinya sebagai berikut:

*"...It is now alleged by the Herald that Archbishop Mannix has unsuccessfully pleaded with me to allow Mrs. O'Keefe and her children to remain. This is a gross untruth. There has been no conversation or communication from Archbishop Mannix to myself or to the department on this subject nor do I expect any..."*<sup>134</sup>

Dari pernyataan Mr. Calwell tersebut, dapat dijelaskan bahwa permintaan penangguhan dari pihak Gereja disambut dingin oleh Calwell dengan berusaha menyanggah hal tersebut. Hal itu disebabkan adanya pandangan dari Calwell bahwa dengan munculnya permintaan penangguhan hukuman bagi keluarga O'Keefe dari Uskup Agung Mannix telah berhasil membuat Pemerintah menyetujuinya. Bagi Calwell hal tersebut adalah sebuah ketidakbenaran yang kotor. Ditambahkan juga bahwa Pemerintah belum menerima ataupun berkomunikasi dengan pihak Uskup Agung Mannix.

Penyanggahan dari Calwell tersebut ditanggapi oleh pihak Gereja yang diwakili oleh *Monsignor* Fox yang isinya sebagai berikut:

*"...Mr and Mrs. O'Keefe called to see the Archbishop and requested him to speak with the minister for Immigration on their behalf. the Archbishop them asked me to get in*

---

<sup>134</sup> "O'Keefe Order Seen A Blow To Goodwill", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*

*touch with Mr. Calwell. I telephoned the Minister and asked him about the possibility of Mrs. O'Keefe and her children remaining in Australia. He said they would have to go but he would extend the time of their departure until the end of February..*<sup>135</sup>

Berdasarkan komentar tersebut, dapat dijelaskan bahwa pihak Gereja membenarkan adanya hubungan komunikasi dengan pihak Calwell. Hal tersebut didasarkan adanya pernyataan bahwa pihak Uskup Agung menelepon Menteri imigrasi dan bertanya tentang kemungkinan Mrs O'Keefe dan anak-anaknya untuk tetap tinggal di Australia. Ditambahkan juga adanya pernyataan dari Calwell bahwa keluarga O'Keefe harus pergi. Akan tetapi, Calwell akan memperpanjang waktu keberangkatan keluarga O'Keefe sampai akhir Februari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa telah terjadi perselisihan antara pihak Gereja dengan Pemerintah Australia akibat kasus O'Keefe.

Penolakan Mr Calwell terhadap permohonan pribadi dari Dr Mannix agar Mrs O'Keefe dan keluarganya diizinkan untuk tinggal di Australia, mendapat respon dari masyarakat Australia bernama Mr. Williams. Dalam responnya ia menyatakan bahwa pandangan masyarakat Australia pada kasus O'Keefe sudah berubah mengenai kelompok kelas dalam kebijakan imigrasi yang dibuat oleh Pemerintah Australia terhadap imigran asing. Hal itu didasarkan oleh pernyataan dari Mr. Williams sendiri bahwa masyarakat Australia harus bisa menghadapi kenyataan karena Australia tidak bisa secara terus menerus hanya untuk kelompok ras tertentu. Ditambahkan juga bahwa ia secara pasti menentang diskriminasi rasial di Australia, karena perintah deportasi dalam kasus O'Keefe akan memiliki dampak internasional yang serius. Mr. Williams juga berpandangan bahwa kebijakan imigrasi Australia harus direvisi dan secara logis bagi Pemerintah untuk mengizinkan anak-anak O'Keefe tetap tinggal sampai pendidikannya di Australia selesai disertai dengan ibunya untuk tetap menjaganya.<sup>136</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Mr. William tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat Australia yang sebelumnya menentang datangnya imigran Asia di negaranya berubah menyetujui datangnya imigran Asia ke Australia, karena didukung oleh faktor munculnya kesadaran bahwa masyarakat Australia sangat memerlukan imigran Asia. Disatu sisi mereka

---

<sup>135</sup> "O'Keefe Order Seen A Blow To Goodwill", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.*

<sup>136</sup> *Ibid.*

menentang imigran Asia, tetapi disisi lain mereka sangat membutuhkan tenaga serta jumlah penduduk agar dapat meningkatkan ekonomi negaranya.<sup>137</sup> Secara umum, terjadi perubahan sikap masyarakat Australia, yang sebelum kasus O'Keefe muncul masih melekat sikap 'paranoid' terhadap imigran Asia. Pada saat kasus O'Keefe muncul, sikap paranoid tersebut secara perlahan mulai hilang.

#### 4.6 Hubungan Luar Negeri antara Australia dan Belanda

Dampak kasus O'Keefe di Australia telah memunculkan juga masalah hubungan luar negeri antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Belanda. Hal itu didasarkan dengan adanya dugaan<sup>138</sup> dukungan dari Pemerintah Belanda terhadap kasus O'Keefe. Hal itu berdasarkan dari surat antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Belanda, yang isinya sebagai berikut:

*" I again discussed with Hasselman (Netherlands legation) the case of Mrs.O'Keefe. I told him that the position as we as it, was that no official communication from the commonwealth government to the legation was required at the present time. The commonwealth viewpoint was that it had warned Mrs. O'Keefe that she is to leave Australia by a certain date and had put the onus on her to make her own arrangement to leave. Is she had not left voluntarily by the deadline date, the government would issue a deportation order against her. Having done so, the government would then, in the ordinary course of events, notify the Netherlands legation officially that Mr. O'Keefe was under the sentence of deportation , and ask the legation to grant her a visa or whatever entry permit might be appropriate , since Mrs. O'Keefe was in the same position as the other Indonesian refugees who had been admitted to Australia during the war who had ultimately been returned to Indonesia with passports and other formalities waived. If the dutch should decline to give Mrs. O'Keefe permission to enter Indonesia, she would nevertheless be deported somewhere. I questioned Hasselman about the part played by the Netherlands consulate in Melbourne in the proceedings up to date, and made it clear to him that, in the view of the Australian authorities the consulate had played some part in discouraging Mrs. O'Keefe from applying for a visa and had in fact helped to arrange Mrs. O'Keefe's marriage. This, taken in conjunction with Sultan Hamid's statement , was responsible for creating the impression that the Dutch were using Mrs. O'Keefe as a stooge to embarrass the Australian government..."*<sup>139</sup>

<sup>137</sup> Stevens, F.S.ed, *Racism: The Australian Experience a Study Of Race Prejudice in Australia. Vol.3 Colonialism (Chapter. 11. In Defence of Australia's Policy Towards Non-White Immigration oleh John Ray)*, Australia and New Zealand Book Company: Sydney, 1972, hlm.238.

<sup>138</sup> Dugaan tersebut berasal dari isi pidato Calwell di Parlemen Australia pada tanggal 10 Februari 1949, yang telah menuduh Pemerintah Belanda "memainkan permainan rumit (*playing a tricky game*)" mengenai masalah repatriasi warga negara dan pembayaran utang. National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. "CALWELL SAYS O'KEEFE ARE "STOOGES" OF DUTCH, Melbourne Argus, 11-2-1949" "S2/3418", Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

<sup>139</sup> " Deportations from Australia – Mrs O'Keefe and eight children", [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit*.

Berdasarkan isi surat tersebut menerangkan bahwa alasan munculnya dugaan dari Pemerintah Australia terhadap Pemerintah Belanda, karena munculnya dukungan<sup>140</sup> dari Pemerintah Belanda yang diwakili oleh konsulatnya di Australia terhadap kasus O'Keefe. Hal tersebut didasarkan juga dengan pernyataan dari Sultan Hamid II, yang menyatakan bahwa Pemerintah Belanda ingin mempermalukan Pemerintah Australia dalam kasus O'Keefe. Akan tetapi, dugaan tersebut berusaha ditampik oleh pihak Pemerintah Belanda yang diwakili oleh Hasselman sebagai Konsulat Belanda di Australia. Hasselman mengatakan bahwa telah memahami benar masalah Mrs. O'Keefe sebenarnya tidak dapat diterapkan untuk mendapatkan visa atau izin masuk. Hasselman juga menolak bahwa konsulat Belanda di Melbourne telah melakukan sesuatu untuk mencegah Mrs. O'Keefe dideportasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa munculnya kasus O'Keefe membuat hubungan luar negeri antara Australia dan Belanda mengalami sedikit masalah. Namun demikian, Pemerintah Belanda sendiri yang diwakili oleh konsulatnya di Melbourne mengakui bahwa ia tidak mendukung Mrs. O'Keefe agar tidak dideportasi oleh Pemerintah Australia.

Penolakan atas tuduhan dari Pemerintah Australia terhadap konsulat Belanda, didasarkan oleh pernyataan dari Hasselman sendiri yang terdapat di surat Pemerintah Australia tersebut. Berdasarkan isi surat tersebut, ia menerangkan bahwa penolakan dari Pemerintah Belanda terhadap tuduhan yang dibuat oleh Pemerintah Australia mengenai kasus O'Keefe menjadi hal yang cukup serius terhadap hubungan kedua negara. Hal tersebut dibuktikan dari pernyataan Hasselman bahwa serangan atas pernyataan Calwell menjadi hal yang serius dan penting bagi negaranya daripada kasus O'Keefe. Ditambahkan juga

---

<sup>140</sup> Munculnya kecurigaan dari pihak Pemerintah Australia terhadap pihak konsulat Belanda terhadap kasus O'Keefe, karena adanya pendapat bahwa Pemerintah Belanda selalu membantu Mrs. O'Keefe dan anak-anaknya selama tinggal di Australia dalam bentuk memberikan uang pensiun bagi keluarga O'Keefe. Ditambah juga adanya alasan bahwa salah satu anak Mrs. O'Keefe yang bernama Ann Jacob, berusia 17 tahun bekerja dengan pihak Konsulat Belanda. Argumen tersebut berasal dari pihak Pemerintah Australia yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya dalam laporan dari Koran *Reuter* di kota Melbourne, pada tanggal 28 Januari 1949. National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. "Calwell Asked To Delay Deportation SOLICITORS APPLICATION" Extract Sydney Daily Telegraph Tuesday, 15-2-1949. "S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

bahwa Hasselman mengaku dirinya tidak senang pada tindakan Pengadilan Tinggi Australia terhadap kasus O'Keefe, yang menurutnya akan mengakibatkan publisitas semakin besar mengenai Pemerintah Belanda yang dituduh membiayai perjuangan hukum keluarga O'Keefe agar tidak dideportasi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, adanya dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Belanda dan Australia untuk memulangkan keluarga O'Keefe ke Indonesia menjadi bukti bahwa Pemerintah Belanda sendiri mendukung kebijakan deportasi terhadap Mrs. O'Keefe.<sup>141</sup>

Berdasarkan laporan dari koran *Canberra Times* bahwa terdapat perdebatan yang sengit antara Dr Evatt yang menjawab pertanyaan dari Mr. Harisson (pihak Oposisi) di Parlemen Australia mengenai kasus O'Keefe dan hubungannya dengan pihak Belanda.<sup>142</sup> Wakil pemimpin Oposisi (Mr Harisson) membuka perdebatan dengan mengajukan pertanyaan serangan terhadap Dr Evatt. Dalam perdebatan tersebut terdapat sikap hati-hati antara pemerintah Australia terhadap Pemerintah Belanda mengenai masalah O'Keefe. Hal ini ditunjukkan pada sikap pemerintah Australia yang diwakili oleh Jaksa Agung dan Menteri Imigrasi dalam membuat pidato atau pernyataan mengenai pen deportasian kasus O'Keefe, yang bersikap hati-hati agar tidak diprotes oleh pihak internasional maupun pemerintah Belanda terhadap kasus tersebut. Ditambahkan juga, dari perdebatan tersebut bahwa terdapat dua pandangan yang berbeda antara pihak oposisi yaitu Mr.Harrison dengan pihak pemerintah yang diwakili oleh Dr. Evatt mengenai pengaruh pihak Belanda terhadap penyelesaian kasus O'Keefe.<sup>143</sup>

Akibat masalah tersebut, Pemerintah Australia akhirnya mulai menghapus semua kesalahpahaman antara hubungan Australia dengan Pemerintah Belanda berkenaan dengan kasus O'Keefe. Menteri Luar Negeri Australia pada saat itu mulai menginformasikan di *House of Representative*, bahwa pihaknya tidak sepakat dengan pernyataan yang dibuat Menteri Imigrasi (Arthur Calwell) mengenai hubungan Australia dengan Pemerintah Belanda. Adanya isu yang

---

<sup>141</sup> “ *Deportations from Australia – Mrs O'Keefe and eight children*”, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), *loc.cit.* lihat selengkapnya pada lampiran 16.

<sup>142</sup> National Archive of Australia Collection “ *Department of Immigration File Of Papers*” 49/2/385. Subject: (Mrs) O'Keefe A. Maas. 3418.Canberra Times, 12-2-1949. “ *OPPOSITION CHALLENGED ON IMMIGRATION*”, 12-2-1949. Style Sheet. [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), diunduh pada Hari Jumat,Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB.

<sup>143</sup> *Ibid.*

dibuat oleh Menteri Imigrasi Australia bahwa Belanda telah mengadakan konspirasi dalam hubungannya dengan kasus O'Keefe dibantah oleh pihak Pemerintah dengan mengatakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Calwell adalah pandangan pribadinya sendiri bukan berasal dari pandangan Pemerintah Australia secara umum.<sup>144</sup>

#### **4.7 Dinamika Politik antara Pemerintah Buruh dan Pihak Oposisi (Liberal) Terhadap Kasus O'Keefe**

Kasus O'keefe telah menimbulkan perdebatan di Parlemen Australia antara pihak Oposisi dari Partai Liberal yang diwakili oleh Mr. Robert Gordon Menzies<sup>145</sup> dengan pihak Pemerintah Buruh. Hal tersebut didasarkan oleh berita dari koran *Sydney Morning Herald* tanggal 18 Februari 1949, yang menyatakan bahwa pihak Oposisi secara signifikan menyindir pihak Pemerintah terutama terhadap tindakan Perdana Menteri Chifley yang tidak ikut ambil bagian dalam menjernihkan masalah kasus O'Keefe dalam perdebatan di Parlemen. Dikatakan juga oleh pihak Oposisi bahwa Mr. Chifley sengaja membiarkan konflik antara Dr. Evatt dan Menteri Imigrasi Calwell terhadap kasus O'Keefe yang berhubungan dengan pihak Belanda agar menjadi berlarut-larut.<sup>146</sup> Hal tersebut diterangkan dalam tulisan koran *Sydney Morning Herald*, yang isinya sebagai berikut:

*"...Mr. Menzeis said he could not imagine anything worse for Australian relations with a neighbouring power than to have such a conflict " left in the air". The inevitable inference from the fact that Mr. Chifley did not speak was that he was not in a position to repudiate the charges Mr. Calwell had made against the Dutch and therefore supported them. Therefore, the Australian Government charged the Dutch Authorities in the*

<sup>144</sup> National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. O'KEEFE FAMILY", Hansard Tuesday, 15/2/1949. Extract Sydney Daily Telegraph Tuesday, 15-2-1949, S2/3418 Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30 WIB.

<sup>145</sup> Robert Gordon Menzies (1894-1978) adalah salah satu pemimpin konservatif dari Partai Liberal pada tahun 1943. Menzies adalah salah satu Perdana Menteri Australia yang paling lama menjabat dari tahun 1949-1966. John Lack, dan Jacqueline Templeton, *Sources of Australian Immigration History Volume 1: 1901-1945 (OPPOSITION RESPONSE TO LABOR'S IMMIGRATION POLICY)* (1945) Commonwealth Parliamentary Debates, Vol.184, pp.4976-80, House of Representatives, 29 August 1945), Melbourne: History Department The University of Melbourne, 1989, hlm. 265.

<sup>146</sup> National Archive of Australia Collection " Department of Immigration File Of Papers" 49/2/385. Subject: (Mrs) O'Keefe A. Maas. 3418. Extract Syney Morning Herald," CLASH OF VIEWS, SAYS MENZIES", Friday, 18-2-1949. Style Sheet. [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB).

*Netherlands East Indies with misconduct. Breach of faith, and the other offences which Mr. Calwell had mentioned. that was a deplorable state of affairs...*<sup>147</sup>

Berdasarkan berita yang ditulis dalam Koran Sydney Morning Herald, dapat dijelaskan bahwa pihak Oposisi merasa pihak Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap masalah O'Keefe dan terkesan tidak peduli terhadap hubungan Australia dengan pihak Belanda. Hal itu berdasarkan pernyataan Menzies yang mengatakan bahwa pihak Oposisi tidak bisa membayangkan hal yang lebih buruk mengenai hubungan Australia dengan Belanda seperti konflik yang terjadi antara Calwell dan Evatt yang disebut "*left in the air*". Kesimpulan tersebut berdasarkan fakta bahwa Chifley tidak dalam posisi untuk menolak dakwaan terhadap Calwell yang telah membuat pernyataan tuduhan terhadap Belanda. Oleh karena itu, Pemerintah Australia membebaskan kasus O'Keefe berdasarkan kesalahan Belanda. Hal tersebut bagi pihak Oposisi sebagai bentuk pelanggaran kepercayaan terhadap hubungan Australia dengan pihak Belanda.

Pernyataan dari pihak Oposisi ditanggapi langsung oleh pihak Pemerintah terutama Calwell dalam Perdebatan di Parlemen. Berdasarkan laporan dari *Canberra Times* tanggal 12 Februari 1949, yang menerangkan bahwa diantara perdebatan yang terjadi antara kedua belah pihak di parlemen, Mr Calwell mengeluarkan sebuah pernyataan yang menantang pihak oposisi dalam perubahan terhadap Undang-Undang imigrasi. Bahwa anggota Oposisi menurut Calwell cukup berhak memajukan rancangan Undang-Undang secara pribadi sebagai anggota Parlemen untuk mengubah hukum imigrasi di Australia. Jika hal tersebut tidak dilakukan pihak Oposisi bisa memindahkan sebuah mosi tidak percaya dalam penanganan administrasi Kebijakan Australia Putih. Pada saat perdebatan masih berlangsung Calwell mengeluarkan sebuah ucapan "...*You want a black Australia...*" terhadap pihak Oposisi, pada saat ia kembali duduk di kursi dalam perdebatan di Parlemen.<sup>148</sup>

Tindakan Calwell tersebut dalam kasus O'Keefe menimbulkan konflik di Parlemen Australia. Pihak oposisi menganggap Calwell bertindak 'tanpa perikemanusiaan'.<sup>149</sup> Secara jelas, konflik dalam Parlemen tersebut menunjukkan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

<sup>148</sup> "Opposition Challenged On Immigration", [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), *loc.cit.*

<sup>149</sup> A.C Palfreeman, *The Administration of the White Australia Policy*, *op.cit.*, hlm.20-21.

telah munculnya dua pandangan yang berbeda, di satu pihak mewakili *White Australia* yang telah menjadi etos nasional Australia, sedangkan di pihak lain mewakili pandangan baru yang dibuat oleh PBB mengenai hak asasi manusia.<sup>150</sup> Dalam konflik tersebut Calwell menempatkan dirinya sebagai salah satu politisi yang berpendirian kuat dengan kebijakan *White Australia* nya. Sebagian besar media massa menjadikan Calwell sebagai sasaran kritik. Pada harian *Sun*, tanggal 20 September 1949, menjelaskan secara jelas bahwa konflik tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan Calwell sebagai politisi di Parlemen sedang dipertaruhkan. Hal tersebut disebabkan sebagian anggota Parlemen menganggap bahwa tindakan imigrasi yang dilakukan Calwell tidak adil dan berdampak sangat buruk bagi masyarakat Australia.

Pihak Oposisi mengeluarkan keberatannya terhadap kebijakan deportasi yang dilakukan oleh Pemerintah Buruh terhadap imigran Asia melalui sebuah editorial di koran Australia, yang isinya sebagai berikut:

*“... On grounds of national self expression and morality, but it emphasized above all the “enlightened self-interest” of Australians. We... need Asian migrants to increase our understanding of neighbouring countries, and we need to promote their confidence in us...”*<sup>151</sup>

Berdasarkan isi dari editorial pihak Oposisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pihak Oposisi berpendapat Australia mau tidak mau harus menjadi seorang perwakilan dari kehidupan Barat di Asia serta untuk berperan secara efektif. Pihak Oposisi menyimpulkan, Australia telah mengakui sifat kemanusiaan yang "biasa" dengan orang Asia. Hal tersebut dinyatakan oleh pihak Oposisi atas dasar ekspresi diri nasional dan moralitas, yang menekankan suatu pencerahan kepentingan diri sendiri dari Australia. ditambahkan juga bahwa masyarakat Australia memerlukan imigran Asia untuk meningkatkan pemahaman Australia mengenai negara-negara tetangga Asia serta perlunya mempromosikan kepercayaan Negara Asia terhadap Australia.

Bersamaan dengan munculnya kasus O’Keefe, pada akhir tahun 1940-an, Pemerintah Australia menempatkan dirinya pada barisan depan negara-negara yang bersekutu dengan kekuatan moderat nasionalisme Asia. Hal tersebut disebabkan kehadiran Australia dalam membuat kebijakan luar negerinya dan

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm.96-99.

<sup>151</sup> H.I.London, *Non White Immigration and The “White Australia” policy*, op.cit. hlm. 157.

terutama pembelaannya terhadap aspirasi nasional Indonesia.<sup>152</sup> Sikap dari Pemerintah tersebut mendapat respon yang negatif dari pihak Oposisi mengenai kebijakannya terhadap Indonesia. Mereka menyalahkan Pemerintah karena mengecewakan Belanda, sekutunya selama perang, dan menyoroti kekhawatiran terhadap prasangka dalam masyarakat Australia sendiri. Pihak Oposisi menghujat<sup>153</sup> kebijakan pemerintah karena mengusir orang kulit putih dari Hindia Belanda dan seluruh Benua Asia. Dalam debat penting mengenai masalah luar negeri pada Bulan Februari tahun 1949, Percy Spender dari pihak Oposisi, menggunakan tanggapannya secara langsung. Ia mengatakan, pemerintah Buruh “berbuat segala-galanya” untuk merusak “Kebijakan Australia Putih” seperti yang diyakini oleh partainya.<sup>154</sup> Berdasarkan tanggapannya tersebut, dapat dikatakan bahwa pihak Oposisi dari partai koalisi Liberal dan *Country Party* masih berpegang teguh terhadap Kebijakan Australia Putih sama dengan Pemerintah Australia.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai banyaknya respon dari masyarakat Australia yang mendukung perjuangan O’Keefe dalam pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak Koran *Sydney Daily Telegraph*. Hal tersebut mendapatkan perhatian oleh pihak Pemerintah, yang diwakili oleh Mr. Daly yang menyebutkan beberapa nama yang turut menyumbang perjuangan keluarga O’Keefe. Adapun nama yang menjadi perhatian dari Pemerintah baik warga Australia *British Subject* maupun imigran asing, yaitu J. Cassidy, J.O’Cramer, Dr. Maguire, Ah Fat, Lee Jan Sing, William Liu, Son Hoo Lock, Lee Moon, Sun Hon, Lee park, and Darby Munro.<sup>155</sup> Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Calwell, yang isinya sebagai berikut:

*“ I cannot say which of the oriental gentleman mentioned are liable to be repatriated at any moment, as the honorable member has suggested, because they were war-time evacuees. Some of them are natural-born Australians, but I suspect that a number of the*

<sup>152</sup> Susan Chritchley (ed.), Hubungan Australia dengan Indonesia (faktor Geografi, Politik, dan Strategi Keamanan), Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 14.

<sup>153</sup> Partai Liberal sebagai pihak Oposisi pada saat itu mempunyai peluang untuk menggunakan HoR yang bermaksud untuk menghancurkan citra dan kredibilitas Pemerintah. Hal tersebut dilakukan untuk konsumsi luar parlemen, yaitu para pemilih dan daerah pemilihan dengan harapan agar para pemilih mau mengubah pilihannya pada pemilu mendatang. Hal itulah yang dilakukan Partai Liberal sebagai pihak Oposisi pada saat kasus O’Keefe berlangsung agar mendapatkan dukungan dari para pemilih pada Pemilihan Umum yang akan digelar pada tahun 1949. Zulkifli Hamid, Sistem Politik Pemerintahan Australia, Bandung: LIP FISIP UI dan Rosda Karya, 1999, hlm. 74.

<sup>154</sup> Susan Chritchley (ed.), *op. cit.*, hlm. 15.

<sup>155</sup> National Archive of Australia Collection. Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385, Rep 9/3/49.. S2/3418 Style Sheet. [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

*people who subscribed to the fund did so for political reasons. I cannot interfere with their rights in that regard. Dr. Maguire, Mr. Cassidy and Councillor Cramer are three such persons. They are members of the executive of the Liberal party, and have used their position for political propaganda. I do not know why Darby Munro wants to get into more trouble than he has been in lately by association with a fund of this sort. I have also noticed in the list of subscribers the name of a gentleman who is an alien. I refer to Eugene Goossens Orchestra. Although he has not been foolish enough to allow his name be used in this matter. I have quite an interesting story to tell, if the House will the subscription list does not contain Telegraph would have liked to include Liberal party were invited to subscribe and, to their credit, they refused to do so. I am informed also that the Daily Telegraph would have liked to include A number of leading members of the Liberal party were invited to subscribe and, to their credit, they refused to do so. I am informed also that the Daily Telegraph made an attempt to use the Communist party and other parties in the O'Keefe case. However, the affair was political stunt from the beginning. Does not matter how many names were the subscription list and whether the subscribers were natural-born British subjects, naturalized subjects or aliens, because this Government will do its duty in carrying out the immigration laws.*"<sup>156</sup>

Berdasarkan pernyataan Calwell tersebut, dapat dijelaskan bahwa diantara pihak yang ikut menyumbang perjuangan O'Keefe mempunyai maksud politik didalamnya. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Calwell sendiri bahwa beberapa dari para penyumbang baik yang lahir di Australia maupun warga asing dalam perjuangan O'Keefe melakukannya untuk alasan politik. Disebutkan juga bahwa nama Dr Maguire, Mr Cassidy dan *Councillor* Cramer tiga orang tersebut adalah anggota Eksekutif dari partai Liberal, dan telah menggunakan posisinya untuk propaganda politik. Ditambahkan juga bahwa dua orang yang ikut menyumbangkan dana dalam perjuangan O'Keefe, yang bernama Darby Munro dan Eugene Goossens Orchestra adalah seorang warga Australia kulit putih yang pro terhadap imigran asing. Calwell juga mengungkapkan bahwa ia diberitahu oleh seseorang bahwa pihak *Daily Telegraph* telah mengundang sejumlah anggota terkemuka partai Liberal untuk ikut menyumbang dalam penggalangan dana tersebut. Akan tetapi, sebagian dari anggota Partai Liberal menolak untuk melakukannya. Ditambahkan juga oleh Calwell bahwa pihak *Daily Telegraph* mencoba menggunakan Partai Komunis Australia dan pihak lain dalam menolong kasus O'Keefe. Calwell pun menambahkan bahwa ia tidak begitu peduli terhadap nama-nama penyumbang dalam daftar pengumpulan dana, apakah seorang *British Subject* ataupun imigran asing yang telah dinaturalisasi, karena pihak Pemerintah akan tetap melakukan tugasnya dalam melaksanakan hukum imigrasi di Australia.

Dampak lain yang ditimbulkan oleh kasus O'Keefe terhadap Pemerintah terutama Calwell sebagai Menteri imigrasi telah memunculkan kecemasan bagi

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

pihak Pemerintah Australia. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Calwell, yang isinya sebagai berikut:

*“... the White Australia policy is now threatened for the first time. In recent months the nation has seen what damage can be done to a Universally held principle by sentimental political agitators, Communists, and stunting newspapers. I am being represented as a heartless monster. Who administers a repressive policy without pity or compassion. I now give the assurances that so long as the Labour Party remains in power there will be no watering down of the White Australia Policy...”*<sup>157</sup>

Pernyataan dari Calwell tersebut dapat dijelaskan bahwa setelah adanya kasus O’Keefe, Calwell mulai merasakan adanya ancaman terhadap eksistensi Kebijakan Australia Putih di Australia untuk pertama kalinya. Calwell merasa bahwa dalam beberapa bulan terakhir berjalannya kasus O’Keefe. Ia melihat bahwa terdapat usaha penghancuran terhadap prinsip universal yang dibuat oleh rasa sentimen para penghasut politik, para kaum Komunis, dan para wartawan surat kabar. Ditambahkan juga bahwa akibat kasus O’Keefe tersebut nama baik Calwell menjadi tercoreng, karena sering direpresentasikan sebagai monster tidak berperasaan yang melaksanakan kebijakan yang represif tanpa belas kasihan atau rasa iba. Pernyataan dari Calwell tersebut juga menunjukkan sikap keras kepala dan takut dari Calwell terhadap kasus O’Keefe. Hal itu ditandai oleh pernyataan Calwell bahwa ia memberikan jaminan selama Partai Buruh tetap berkuasa dalam pemerintahan tidak akan ada yang menurunkan Kebijakan Australia Putih di Australia.

#### **4.7.1 Kekalahan Partai Buruh dalam Pemilihan Umum Tahun 1949**

Pada saat sebelum diadakannya Pemilu tahun 1949, terjadi peristiwa besar dalam tubuh<sup>158</sup> Partai Buruh, yaitu adanya pertentangan antara pihak sayap kanan

---

<sup>157</sup> National Archive of Australia Collection, “ Department of Immigration File Of Papers” 49/2/385. Subject: (Mrs) O’Keefe A. Maas. 3418. Melbourne Argus, ” WHITE AUSTRALIA POLICY THREATENED”. Calwell’s fears on O’Keefe ruling, 24 -3-1949, Style Sheet, [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB.

<sup>158</sup> Dari semua partai di Australia, Partai Buruh adalah satu-satunya partai yang secara jelas membedakan anggotanya berdasarkan faksi. Faksi dalam ALP dibagi atas 3 kelompok faksi, yaitu kiri, kanan, dan tengah. Faksi sosialis kiri masih

dan Sayap kiri Partai Buruh. Hal itulah yang menjadi penyebab kekalahan Partai Buruh dalam Pemilihan Umum. Akibat pertentangan tersebut terjadi semacam bentuk demonstrasi dari para penambang yang tergabung dalam anggota sayap kiri Partai Buruh dengan pihak Pemerintah yaitu Menteri Tenaga Kerja, yang mewakili pihak sayap kanan Partai Buruh. Demonstrasi tersebut bermula pada saat Menteri Tenaga Kerja mulai memberlakukan *the Freezing of Union Fund Legislation*, yang merugikan pihak Buruh penambang. Ditambah juga tindakan Pemerintah dalam menyelesaikan demonstrasi terkesan kejam dengan memasukkan sejumlah pemimpin Serikat Buruh yang dikenal sebagai “*Groupers*” ke penjara. Akibat peristiwa tersebut terjadi perpecahan dalam tubuh Partai Buruh sendiri, yang menimbulkan kemarahan dari pihak sayap kiri Partai Buruh terhadap sayap kanan Partai Buruh<sup>159</sup> Hal tersebut memunculkan pernyataan dari pihak Oposisi yang diwakili oleh Menzies bahwa peristiwa pemogokan tersebut merupakan bagian dari "ancaman komunis" di Australia. Pernyataan tersebut menjadi isu yang menonjol dalam kampanye Pemilu yang dilakukan Partai Liberal pada tahun 1949. Akibat hal tersebut, Pemerintah Buruh dalam suatu referendum kehilangan suara pemilih di tiga negara bagian dari enam Negara bagian Australia, dengan akumulasi dari 2.370.009 orang turun menjadi 2.317.927 orang yang memilih.<sup>160</sup>

Memasuki kampanye Pemilu tahun 1949, citra Partai Buruh sebagai pembuat kebijakan<sup>161</sup> yang bersifat nasional sedang melemah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat kurang memperoleh dukungan dari dalam partai sendiri.

---

mendominasi, maka pada masa selanjutnya faksi ini harus melihat kenyataan bahwa mereka tidak mampu menambah “jumlah” kelompoknya di parlemen. Faksi tengah telah membentuk kelompok terbesar dalam partai, sementara faksi kanan tetap merupakan minoritas. Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm.216.

<sup>159</sup> Frank Crowley, *A Documentary History Of Australia Volume 5: Modern Australia 1939-1970*, (“*Australian Shipping Line Established*”, *Communist Review*, Sydney, September 1949, pp.259-61), Melbourne: Wren Publishing, Pty.Ltd, 1973, hlm.207-209.

<sup>160</sup> Gordon Greenwood, dan Norman Harper (*ed*), *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>161</sup> Kekalahan Partai Buruh dalam Pemilihan Umum tahun 1949, disebabkan juga oleh gagalnya Pemerintah Buruh melaksanakan kebijakan pasca perang. Ditambah juga pada saat presentasi *platform* Pemilu Federal Australia tahun 1949 dimulai, Pemerintah Australia pada saat itu banyak ditentang oleh para pemimpin Parlemen melalui hak prerogatifnya, yang menjadikan Pemilu tersebut berlangsung secara kompleks. *Platform* dari Partai Buruh mulai mengalami kegoncangan, karena desakan dari masyarakat disertai adanya tujuan untuk mendapatkan pemilih agar kekuasaan Pemerintah Buruh berlanjut. James Jupp, *op.cit.*, hlm.108-115.

Pihak Oposisi dari Partai Liberal dan *Country Party*, mempersoalkan berbagai kebijakan Pemerintah Buruh antara lain program kesejahteraan sosial, dan perluasan distribusi pasukan Australia pada masa perang. Selain itu, pihak Oposisi mengangkat masalah keberadaan unsur komunis dalam Partai Buruh, yang akan berpengaruh dalam Kebijakan Australia pada masa Perang Dingin.<sup>162</sup>

Respon luar negeri yang buruk terhadap Calwell dari beberapa media di luar negeri turut menjadi faktor kekalahan Partai Buruh dalam Pemilu tahun 1949. Respon tersebut muncul karena kebijakan deportasi yang dilakukan Calwell secara brutal terhadap imigran asal Asia termasuk O'Keefe. Seperti yang terjadi di Malaysia yang merupakan Negara persemakmuran Inggris sama dengan Australia juga pernah mendapat perlakuan deportasi terhadap nelayannya pada tahun 1947. Kasus deportasi tersebut memunculkan Kemarahan dari pihak Malaysia terhadap rasa superioritas kulit putih Eropa di Australia. Hal tersebut telah mengakibatkan masyarakat di seluruh dunia menentang Kebijakan Australia Putih di Australia.<sup>163</sup> Keadaan tersebut, menyebabkan kekalahan Partai Buruh dalam Pemilu, dan membawa Partai Buruh pada posisi sebagai pihak Oposisi untuk jangka waktu yang panjang, yaitu selama 23 tahun (1949-1972).<sup>164</sup> Kekalahan Partai Buruh dalam Pemilu tahun 1949, menunjukkan sebuah perubahan dalam kesadaran demokrasi bagi masyarakat Australia. Dimana rakyat Australia pada saat itu telah memutuskan bahwa rasisme tidak dapat hidup subur di Australia yang mengagungkan nilai-nilai demokratis.

#### **4.8 *Wartime Refugee Removal Act* Tahun 1949**

Dampak kasus O'Keefe terhadap kebijakan imigrasi Australia ditandai oleh keputusan dari pihak Pengadilan Tinggi Australia yang telah mengizinkan Mrs.O'Keefe dan keluarganya tetap tinggal di Australia. Hal tersebut menyebabkan munculnya wacana dari Pemerintah untuk merubah Undang-Undang imigrasi Australia terutama terhadap imigran kulit berwarna sebelumnya.

---

<sup>162</sup> D.F. Woodward, Andrew parkin, dan John Summers (Eds), *Government, Politics, and Power in Australia (The Australian Labor Party)*, Edisi ke-5, Melbourne: Longman Cheshire, 1987, hlm.155.

<sup>163</sup> H.I.London, *op.cit.*, hlm. 182-183.

<sup>164</sup> Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm.194.

Hal tersebut berdasarkan pernyataan dari Calwell di koran *Melbourne Argus* tanggal 24 Maret 1949, yang menerangkan bahwa setelah adanya keputusan dari Pengadilan Tinggi terhadap kasus O'Keefe telah mengakibatkan adanya rencana dibuatnya kebijakan baru terhadap para penduduk non-Eropa di Australia. Rencana kebijakan baru tersebut akan menerangkan ketetapan terhadap imigran kulit berwarna jika mereka telah tinggal selama lima tahun atau lebih mereka secara tidak langsung mendapatkan hak untuk menjadi penduduk tetap di Australia.<sup>165</sup> Pernyataan dari Calwell tersebut ditegaskan kembali oleh pihak media Australia yang memberitakan kasus O'Keefe, yang isinya sebagai berikut:

*"...An important effect of the High Court decision is that every non European who was admitted to Australia on a certificate of exemption, and who has resided here for five years or longer, cannot now be compulsorily repatriated..."*<sup>166</sup>

Berdasarkan artikel dari media Australia tersebut, dapat dijelaskan bahwa dampak penting dari putusan Pengadilan Tinggi terhadap kasus O'Keefe adalah bahwa setiap warga non Eropa yang masuk ke Australia yang telah mempunyai sertifikat pembebasan, dan yang telah tinggal selama lima tahun atau lebih lama, pada masa sekarang tidak bisa dipaksa untuk dipulangkan (deportasi). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa munculnya kasus O'Keefe telah membuat Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kebijakan Imigrasi yang lama.

Pada tanggal 31 Maret 1949, Calwell di dalam parlemen di Canberra mulai melakukan revisi dan mengubah Undang-Undang imigrasi tahun 1949. Hal tersebut berdasarkan pembacaan rancangan Undang-Undang imigrasi baru oleh Calwell, yang isinya sebagai berikut:

*"The effect of the majority judgment of the High Court in the case of Mrs. O'Keefe is that if a person is admitted to Australia without being subjected at the time of entry to any of the tests laid down in Section 3 of the Immigration Act he is not a prohibited immigrant. In such circumstances a person cannot lawfully be given a certificate of exemption authorising him to remain in the Commonwealth unless he has been subjected to, and failed to pass, a dictation test under Section 5(2) of the Act. Under that*

---

<sup>165</sup>," White Australia Policy Threatened", [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), *loc.cit.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

*Section the test can only be applied within five years from the date of a person's arrival in Australia...*<sup>167</sup>

Dari pernyataan Calwell tersebut, dapat dijelaskan bahwa dibuatnya Undang-Undang imigrasi baru tersebut didasarkan oleh keputusan Pengadilan Tinggi Australia terhadap kasus O'Keefe. Adapun perubahan dalam Undang-Undang imigrasi yang direvisi pada bagian 3 dari Undang-Undang imigrasi sebelumnya mengenai imigran ilegal. Dalam revisi<sup>168</sup> tersebut diterangkan bahwa seseorang imigran tidak dapat secara sah mendapatkan sertifikat pembebasan untuk tetap berada di wilayah Australia, kecuali imigran tersebut telah menjadi obyek imigrasi dan telah gagal untuk lulus tes dikte sesuai dengan bagian Undang-Undang bagian 5 (2). Perubahan dalam Undang-Undang baru tersebut juga menyatakan bahwa tes dikte hanya dapat dilakukan bagi imigran yang sudah lima tahun berada di Australia.

Dalam Undang-Undang imigrasi baru tersebut juga dijelaskan bahwa didasarkan pada argumen dari pihak Pengadilan Tinggi mengenai Sertifikat Pembebasan yang tidak berjalan efektif. Maka Pemerintah mulai menetapkan bahwa imigran yang sudah lebih dari lima tahun tinggal di Australia tidak dapat mengikuti tes dikte dan tidak bisa dinyatakan sebagai imigran ilegal. Namun, hal tersebut terdapat pengecualian bagi orang terlantar dan imigran yang tinggal di Australia kurang dari lima tahun diharuskan untuk mengikuti tes dikte. Jika dalam tes dikte tidak lulus para imigran tersebut diharuskan untuk segera keluar dari Australia.<sup>169</sup> Ditambahkan juga bahwa penilaian dalam Undang-Undang imigrasi baru tersebut telah mempengaruhi prosedur administrasi di Departemen imigrasi Australia bagi imigran kulit berwarna. Prosedur baru tersebut telah menyulitkan

---

<sup>167</sup> Cabinet Submission by Calwell, "PROPOSED AMENDMENT OF THE IMMIGRATION ACT", Agendum 1580 CANBERRA, 31 March 1949, <http://www.info.dfat.gov.au>, diunduh pada hari Senin, Tanggal 24 Mei 2010 Pukul 14.45 WIB

<sup>168</sup> Undang-Undang imigrasi tahun 1949 yang direvisi tersebut juga membahas mengenai keputusan kewarganegaraan bagi para pengungsi dan pelaut asal Asia. Undang-Undang baru tersebut lebih banyak menerangkan tentang peraturan yang mengatur pemulangan para imigran asal Asia sebagai pengungsi dari bulan Juni tahun 1947. "PROPOSED AMENDMENT OF THE IMMIGRATION ACT", <http://www.info.dfat.gov.au>, *loc.cit.*

<sup>169</sup> "Proposed Amendment Of The Immigration Act", <http://www.info.dfat.gov.au>, *loc.cit.*

para imigran kulit berwarna untuk melakukan administrasi warga Negara di Australia.<sup>170</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang imigrasi baru tersebut masih bersifat ketat terhadap imigran non Eropa.

Adapun bagian yang direvisi dalam Undang-Undang imigrasi dan *War Time Refugee Removal Act* tahun 1949, adalah sebagai berikut:

*“ 11. The matter which is one of urgency has been discussed with the Attorney-General's Department and that Department is of the opinion that this can be achieved by an amendment of the Immigration Act on the following lines-(i) Section 4 of the Act to be amended to provide that certificates may be validly issued in future without first applying a dictation test; and (ii) the inclusion of a new clause declaring that certificates already issued should be deemed to have been issued under the Act as proposed to be amended. The views of Counsel in regard to the matter will be obtained before the amending legislation is drafted.*

*12. Recommendation Recommended that- (i) subject to legal advice, I be authorised to introduce during the forthcoming session of Parliament a Bill to amend the Immigration Act which will validate the position both as regards certificates of exemption already granted and those which may be issued in future; and (ii) in the event of advice being received that legislation under (iii) above would be of doubtful validity, particularly as regards its retrospective features, be authorised to introduce, either as an alternative or as complementary, a special Aliens Act covering wartime evacuees or an amendment of the Aliens Deportation Act to enable action to be taken for the deportation of those aliens who entered the Commonwealth during the war period who are not eligible under existing immigration policy to remain here for permanent residence.”<sup>171</sup>*

Berdasarkan isi dari Undang-Undang imigrasi dan *War Time Refugee Removal Act* tahun 1949, dapat dijelaskan bahwa pada (I) Bagian 4 dari Undang-undang tersebut diubah untuk memberikan sertifikat pembebasan secara sah bagi para imigran di masa mendatang tanpa terlebih dahulu menerapkan tes dikte; dan mulai dimasukkannya usul baru yang menyatakan bahwa sertifikat yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana yang diusulkan oleh pihak Pemerintah untuk diubah. Pada bagian 12 berisi rekomendasi yang dibuat oleh pihak Pemerintah berupa nasihat hukum dari pihak imigrasi yang memiliki wewenang untuk memperkenalkan Undang-Undang imigrasi baru di dalam Parlemen serta secara sepihak dapat mengubah Undang-Undang imigrasi baru secara valid untuk memberikan sertifikat pembebasan bagi imigran yang ingin

---

<sup>170</sup> Proposed Amendment Of The Immigration Act”, <http://www.info.dfat.gov.au>, *loc.cit.*

<sup>171</sup> *Ibid.* Lihat selengkapnya pada lampiran 20.

masuk ke Australia. pada bagian (ii) dijelaskan beberapa ketentuan dalam hal nasihat yang diterima dibawah Undang-Undang imigrasi yang disahkan. Pada bagian terakhir, yaitu (iii) berisikan bahwa Pemerintah memiliki wewenang untuk memperkenalkan, baik sebagai alternatif atau sebagai pelengkap, sebuah Undang-Undang khusus *Aliens Act*, yang meliputi Undang-Undang pengungsi perang atau perubahan dalam *Aliens Deportation Act*. Hal ini secara jelas telah mengaktifkan tindakan deportasi yang akan diambil oleh Pemerintah secara bebas untuk mendeportasi para imigran asing yang masuk ke Australia selama masa Perang yang tinggal di Australia kurang dari lima tahun serta tidak memenuhi syarat berdasarkan kebijakan imigrasi yang ada untuk tetap tinggal di wilayah Australia.

Perubahan Undang-Undang imigrasi yang diperbarui tersebut dapat dikatakan tidak berdasarkan prinsip dasar Kebijakan Australia Putih seperti sebelumnya. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menghapus pelanggaran terhadap kemanusiaan yang ada. Misalnya, adanya peraturan kontroversial mengenai pembatasan terhadap imigran non-Eropa dalam memenuhi syarat tinggal dan memperoleh kewarganegaraannya secara permanen di Australia. Sebelum adanya revisi dalam Undang-Undang kebijakan imigrasi yang baru syarat tinggal bagi imigran non-Eropa untuk tinggal di Australia adalah lima belas tahun. Setelah kebijakan imigrasi tersebut direvisi syarat tinggal bagi imigran non Eropa menjadi lima tahun tinggal di Australia. Hal tersebut didasarkan telah ditemukannya diskriminasi rasial dalam peraturan tersebut. Perubahan Undang-Undang tersebut memungkinkan imigran kulit berwarna untuk memiliki keyakinan diterima sebagai warga negara Australia secara resmi.<sup>172</sup>

Pada tanggal 9 Juni 1949, di *House of Representative*, Canberra, Menteri imigrasi Calwell menyampaikan pidato dengan membaca rancangan Undang-Undang *the Hills for the Immigration Act 1949* dan *the War-time Refugees Removal Act 1949*. Dalam pidatonya Calwell menyatakan bahwa ia yang mengusulkan rancangan Undang-Undang tersebut untuk menjadi Undang-

---

<sup>172</sup> National Archive of Australia Collection, "Department of Immigration File Of Papers" 49/2/385. Subject: (Mrs) O'Keefe A. Maas. 3418. PR.Heydon, Attorney General's Department, Central Office, OFFICE OF THE SECRETARY CANBERRA A.C.T, "PERSONAL AND CONFIDENTIAL", Letter for Mr. Hook, COMMONWEALTH OF AUSTRALIA DEPARTMENT OF IMMIGRATION, 22<sup>nd</sup> April, 1964. Review of non-European policy, Style Sheet, [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009, Pukul 14.05 WIB.

Undang. Namun demikian, masih terlihat maksud dibuatnya Undang-Undang tersebut untuk mendeportasi pengungsi selain O'Keefe yang tinggal di Australia. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam pidato Calwell, yang isinya sebagai berikut:

*"... Unfortunately the decision of the High Court of Australia in the case of the Ambonese woman has, for the time being, restricted the Government's power to deal effect vely with the problem of repatriating these people, and it has become necessary to seek fresh power to enable the policy of the government and, I emphasize , of the Australian people, to be put into effect. That is precisely what the bill seeks to achieve..."*<sup>173</sup>

Berdasarkan pidato dari Calwell tersebut, dapat dijelaskan bahwa alasan dia membuat Undang-Undang imigrasi yang baru tersebut karena keputusan Pengadilan Tinggi Australia terhadap O'Keefe. Ditambahkan juga bahwa Calwell dalam membuat Undang-Undang tersebut bertujuan mencari kekuatan baru dalam mengaktifkan kebijakan pemerintah untuk memulangkan keseluruhan pengungsi yang datang ke Australia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut ditambahkan juga oleh Calwell dalam pidato keduanya di HoR pada tanggal 5 Juli 1949, yang menekankan bahwa dibuatnya Undang-Undang baru tersebut tidak akan ada lagi pengecualian apa pun bagi Pemerintah dalam mendeportasi semua pengungsi perang di Australia termasuk Mrs. O'Keefe sendiri dan akhirnya *the War-time Refugees Removal Act 1949* dan *the Immigration Act 1949* resmi menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Juli 1949.<sup>174</sup> Secara signifikan berdasarkan Undang-Undang imigrasi pengungsi yang baru menerangkan bahwa peraturan tersebut memiliki perbedaan terhadap ketentuan perempuan asing yang menikah dengan orang Australia sebelum Undang-Undang baru diberlakukan dan setelah Undang-Undang baru tersebut telah berlaku. Warga Australia yang menikah sebelum adanya Undang-Undang baru tersebut menerima manfaat dari status lama mereka sebagai seorang "*British Subject*" menjadi warga negara Australia resmi secara otomatis.<sup>175</sup> Namun demikian, dalam pembuatan Kebijakan baru tersebut pihak Pengadilan Tinggi

---

<sup>173</sup> " Department of Immigration File Of Papers", , [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), *loc. cit.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

<sup>175</sup> National Archive of Australia Collection " Department of Immigration File Of Papers" 49/2/385. Subject: (Mrs) O'Keefe A. Maas. 3418. Melbourne Herald," FEDERAL GOVT. ASSURANCE ON MRS.O'KEEFE No Move Until Case Heard", 15/7/1949, H9/2/5/1949. Style Sheet. [www.naa.co.au](http://www.naa.co.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009, Pukul 14.15 WIB).

Australia berbeda pandangan<sup>176</sup> dengan pihak Pemerintah untuk melakukan pengujian terhadap status kewarganegaraan imigran. Secara lebih tegas pihak Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa untuk memiliki kewarganegaraan Australia tidak menghalangi seseorang dari yang pernah menjadi seorang imigran dan pernah akan di deportasi dari Australia. Definisi hukum dari Undang-Undang baru tersebut secara jelas dan ringkas menerangkan bahwa seorang imigran yang ingin menjadi pemukim di Australia berada diluar kekuasaan Pemerintah untuk melakukan kebijakan deportasi.

Tidak lama setelah kebijakan imigrasi baru tersebut disahkan, muncul beberapa kasus yang sama<sup>177</sup> dengan kasus O'Keefe. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus Sersan Gamboa. Pada kasus Gamboa, Mr. Gamboa diharuskan untuk segera meninggalkan Australia, meskipun pada saat itu ia sudah menikah dan memiliki satu anak. Gamboa harus meninggalkan Australia berdasarkan *War Time Refugee Removal Act 1949* yang dibuat oleh Calwell serta didukung oleh Perdana Menteri Ben Chifley berdasarkan Kebijakan Australia Putih. Departemen imigrasi, di bawah kepemimpinan Calwell, berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk memasuki negaranya. Sehingga pada tahun tersebut dapat dikatakan bahwa *Wartime Refugee Removal Act* tahun 1949 mulai ditegakkan. Perundang-undangan yang baru

---

<sup>176</sup> Terdapat dua pandangan yang berbeda dari pihak Pengadilan Tinggi Australia dengan Pemerintah Australia terhadap Undang-Undang kebijakan baru tersebut, yang pertama adalah jika seorang pernah menjadi imigran di Australia, mereka akan tetap dianggap sebagai imigran. Pandangan yang kedua, secara lebih umum bahwa kekuatan Pemerintah untuk mendeportasi berhenti ketika imigran tersebut telah mampu masuk ke dalam lingkungan masyarakat selama lima tahun. Oleh karena itu, jika seorang imigran mendapatkan kewarganegaraan Australia setelah tiga tahun tinggal di Australia. Imigran tersebut berpotensi untuk di deportasi selama dua tahun sisa atau sampai proses penyerapan ke masyarakat Australia dianggap telah terjadi. S, Encel, M, Berry, L, Bryson, M, de Iepervanche, T, Rowse and A, Moran, *Australian Society Introductory Essays*, Fourth Edition, Melbourne: Longman Cheshire Pty, Limited, 1984, hlm. 214-183.

<sup>177</sup> Selain kasus O'Keefe yang menjadi pembicaraan dari masyarakat Australia, terdapat juga kasus mengenai deportasi yang dialami oleh Koon Wing Lau. Dalam kasus Koon Wing Lau melibatkan 43 pengungsi yang berasal dari Hong Kong yang berjuang agar tidak dideportasi setelah adanya perubahan Undang-Undang imigrasi yang dibuat oleh Calwell. Mereka berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang tersebut tidak valid di Australia. Akan tetapi, pihak Pengadilan Tinggi Australia menolak banding yang dilakukan oleh mereka. Namun, sebelas hari sebelum penghakiman antara Koon Wing Lau mulai disidangkan, Pemerintah Buruh kehilangan kekuasaan. Department of Immigration Australia, "TOPIC 3: POWERS TO CONTROL: WHAT ARE THE LIMITS OF THE ALIENS POWER? What rights do 'aliens' have in our legal system? The constitutional heads of power under s 51 - 'naturalisation and aliens' and 'immigration'", Style Sheet, [www.google.co.au](http://www.google.co.au), diunduh pada hari selasa, tanggal 27 April 2010, Pukul 11.00 WIB.

tersebut mengenai deportasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kontrol imigrasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah. Hal itu disebabkan, dengan diberlakukannya kebijakan baru tersebut Pemerintah mendapatkan alasan yang baru untuk mendeportasi imigran asing atau pengungsi dari Australia.

Kasus "Sersan Gamboa" menjadi salah satu kasus terbesar setelah kasus O'Keefe dalam menentang Kebijakan Australia Putih. Kasus tersebut semakin besar pada saat Gamboa membawa masalah tersebut ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut mengakibatkan Australia kehilangan simpatik<sup>178</sup> dari negara-negara di dunia, yang membuat Pemerintahan Buruh kalah dalam Pemilihan Umum bulan Desember tahun 1949.<sup>179</sup> Hal tersebut juga telah menyebabkan kebijakan deportasi tersebut dicabut oleh Pemerintah yang baru yaitu Pemerintahan Liberal yang dipimpin oleh Robert Menzies dengan menunjuk Menteri Imigrasi yang baru, yaitu Mr. Harold Holt pada tahun 1949.<sup>180</sup> Dapat dikatakan bahwa dengan terbentuknya pemerintahan Australia yang baru secara otomatis mengubah iklim kebijakan imigrasi Australia terhadap imigran kulit berwarna terutama terhadap eksistensi Kebijakan Australia Putih di Australia yang selanjutnya terus diperdebatkan.

---

<sup>178</sup> Gejala dukungan internasional yang luas untuk Gamboa selama periode tersebut dilakukan oleh Mr. Malik, seorang delegasi asal Uni Soviet untuk PBB yang membandingkan percobaan Hongaria Kardinal Mindszenty dan pendeta Protestan di Bulgaria dengan kebijakan imigrasi Australia. "Interview with Lorenzo Gamboa, a Filipino national with an Australian wife who was deported from Australia in 1945 as a result of the White Australia Policy (sound recording)", [www.google.co.au](http://www.google.co.au), *loc.cit.*

<sup>179</sup> Pemerintah baru dari Liberal yang dipimpin oleh Robert Menzies dengan Harold Holt sebagai Menteri Imigrasinya memperbolehkan Gamboa diterima di Australia sebagai warga Negara Australia resmi untuk berkumpul dengan anak dan istrinya di kota Queensland. "Interview with Lorenzo Gamboa", [www.google.co.au](http://www.google.co.au), *loc.cit.*

<sup>180</sup> *Ibid.*

## BAB 5

### KESIMPULAN

Dari pembahasan skripsi ini sebelumnya, bahwa dalam sejarahnya dibentuknya Kebijakan Australia Putih didasarkan pada sejarah imigrasi Australia yang telah dimulai setelah emas ditemukan di Australia. Hal tersebut menyebabkan mulai berdatangan imigran asing ke Australia untuk mencari emas dan bertempat tinggal di Australia. Terjadinya perebutan ladang emas oleh para imigran dan penduduk kulit putih Australia menyebabkan Pemerintah Australia mulai membuat satu kebijakan imigrasi yang bersifat nasional yang bernama *Immigration Restriction Act* bersamaan dengan berdirinya Negara Federasi Australia pada tahun 1901, yang isinya melarang imigran asing terutama Cina serta imigran kulit berwarna lainnya untuk datang ke Australia. Undang-Undang tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatannya yang menjadi fokus dalam pemilihan imigran adalah kemampuan bahasanya, namun pada kenyataannya pilihan imigran hanyalah berdasarkan ras mereka. Hal tersebut menandakan bahwa Kebijakan Australia Putih merupakan pembenaran atas kenyataan sosial yang dipengaruhi oleh gagasan rasisme. Keinginan Australia untuk mempertahankan kemurnian rasnya sebagai keturunan *Anglo Saxon* Inggris, telah menjadi alasan rasional bagi Australia untuk melakukan pembatasan imigran non-Eropa. Pemerintah Australia secara lugas memperlihatkan sikapnya yang keras terhadap para imigran kulit berwarna yang berusaha memasuki wilayah Australia. Namun demikian, pada periode berakhirnya Perang Dunia Kedua muncul kasus O'Keefe yang membuat Pemerintah Australia terpaksa melakukan liberalisasi kebijakan imigrasi non-Eropa di negaranya.

Kesimpulan yang saya dapat dari penelitian ini adalah bahwa adanya perubahan dalam Kebijakan Australia Putih dimulai pada saat Perang Dunia Kedua terjadi. Hal tersebut diawali oleh tindakan Pemerintah Australia di bawah Pemerintahan Buruh yang mengizinkan imigran non-Eropa dari Asia untuk datang ke Australia sebagai pengungsi. Akan tetapi, kebijakan tersebut mengakibatkan jumlah pengungsi Asia yang ada di Australia meningkat secara tajam. Hal ini ditandai pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua banyak para pengungsi Asia yang tidak ingin meninggalkan Australia. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Australia secara bertahap mulai memperketat kebijakannya terhadap para pengungsi dengan melakukan deportasi.

Dengan demikian, jelas terlihat adanya perbedaan kebijakan imigrasi dari tahap pertama (sebelum tahun 1901), dengan tahap kedua (setelah tahun 1901). Pada tahap pertama, kebijakan yang dilakukan untuk mencegah serbuan imigran asing bersifat lunak, dengan memberikan pajak yang tinggi untuk masuk oleh Pemerintah pada waktu itu. Sedangkan, pada tahap kedua kebijakan yang dibuat menjadi bersifat keras dengan melakukan tes bahasa dan deportasi sebagai metode yang utama dipakai pada waktu itu.

Diberlakukannya kebijakan deportasi bagi para pengungsi asal Asia memperlihatkan keseriusan Australia dalam memandang isu imigran kulit berwarna sebagai isu yang dapat mengancam stabilitas nasional, regional maupun internasional negaranya. Salah satu kasus yang paling menonjol akibat kebijakan deportasi tersebut adalah kasus O'Keefe dengan adanya pergeseran perspektif masyarakat Australia mengenai Kebijakan Australia Putih terhadap kasus tersebut. Kasus O'Keefe adalah kasus bagi imigran Asia di Australia terhadap sikap atau kebijakan Pemerintah Australia dalam Kebijakan Australia Putih. Adanya dukungan melalui pengumpulan dana yang dilakukan oleh masyarakat Australia dan adanya peran pihak Gereja Roma Katolik Australia untuk membantu perjuangan O'Keefe telah menunjukkan perubahan pandangan masyarakat Australia terhadap imigran kulit berwarna. Kontribusi tersebut secara signifikan menyajikan perbedaan pandangan yang kontras antara masyarakat Australia dan Pemerintah yang diwakili oleh Calwell sebagai Menteri imigrasi pada saat itu. Kemenangan yang didapat oleh Mrs. Annie O'Keefe dari kebijakan deportasi yang dibuat oleh Calwell sebagai sebuah simbol bahwa Kebijakan Australia Putih terhadap orang Asia sudah lemah dan menjadi salah satu perjuangan pencapaian hak orang Asia di Australia.

Hasil penelitian dalam skripsi ini juga menunjukkan bahwa pengaruh kasus O'Keefe terhadap Kebijakan Australia Putih didasari juga oleh adanya beberapa masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Buruh Australia dalam bidang sosial dan politik. Salah satu masalahnya adalah dengan adanya tekanan publik terhadap kasus O'Keefe kepada pemerintah Australia saat itu yang menunjukkan bahwa isu mengenai pembatasan imigran kulit berwarna telah menjadi isu penting yang berkaitan erat dengan Pemilihan Umum di Australia. Ditambahkan juga adanya

masalah internal dalam Partai Buruh sendiri akibat adanya kasus O'Keefe. Situasi tersebut telah memberikan peluang bagi pihak Oposisi yaitu Partai Liberal untuk mengambil kebijakan yang tegas mengenai kebijakan imigrasi terhadap kulit berwarna, yang pada akhirnya mendukung kredibilitas pihak Oposisi dalam memenangkan Pemilu tahun 1949. Pengaruh lain yang dapat dilihat adalah dibuatnya kebijakan imigrasi Australia yang mulai direvisi kembali yaitu *The War Time Refugee Removal Act* dan *The Immigration Act 1949*. Kebijakan baru tersebut menunjukkan perubahan karakteristik kebijakan imigrasi yang sebelumnya ketat dengan "Australia Putihnya" terhadap imigran kulit berwarna, menjadi lebih longgar dalam menerima imigran kulit berwarna terutama yang berasal dari Asia. Walaupun, dalam pembuatan kebijakan tersebut oleh Calwell memiliki tujuan agar tidak lagi muncul kasus serupa seperti kasus O'Keefe. Akan tetapi, anggapan Calwell terhadap kebijakan baru tersebut memiliki kekeliruan karena memunculkan kasus yang lebih serius yaitu kasus Gamboa. Secara umum, dapat dikatakan bahwa akibat adanya kasus O'Keefe telah memunculkan sebuah wacana bagi masyarakat Australia apakah Kebijakan Australia Putih harus tetap dibingkai dan terus dipelihara di Australia. Wacana tersebut memiliki makna khusus bagi Australia terutama terhadap eksistensi Kebijakan Australia Putih selanjutnya yang terus diperdebatkan setelah kasus O'Keefe berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip yang Telah Dipublikasikan

Crowley, Frank. 1973. *A Documentary History Of Australia Volume 4: Modern Australia 1901-1939* Melbourne: Wren Publishing, Pty.Ltd.

----- . 1973. *A Documentary History Of Australia Volume 5: Modern Australia 1939-1970*. Melbourne: Wren Publishing, Pty.Ltd.

Gilchrist, J.T dan W.J Murray, ed. *Eye Witness: Selected Documents from Australia's Past*. Rigby Limited, 1968.

“Affidavit of Plaintiff Document No.3. I. Annie Maas O’Keefe of Beach Reserve Shenfield Avenue Bonbeach in the state of Victoria Married Woman make oath and say:- Endorsement on writ Document No.1 in the High Court of Australia principal registry 1949,3 between Annie Maas O’Keefe plaintiff and Arthur Augustus Calwell, Alan Hewitt Priest and the Commonwealth of Australia Defendants”, National Archive of Australia Collection, Transcript Record of Proceedings, J.P. Minogue Carey & Moran, Solicitors, 20 Queen Street, Melbourne, hlm. 6-7, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2010, Pukul 11.15 WIB.)

“Calwell Says O’Keefe Are “Stooges” Of Dutch”, National Archive of Australia Collection, “Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. Melbourne Argus, 11-2-1949’ “S2/3418”, Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

“Deportations from Australia – Mrs O’Keefe and eight children”. National Archive of Australia Collection. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB).

“Endorsement on writ Document No.1 in the High Court of Australia principal registry 1949”, National Archive of Australia Collection, ”,3 between Annie Maas O’Keefe plaintiff and Arthur Augustus Calwell, Alan Hewitt Priest and the Commonwealth of Australia Defendants page 2”, Trevor Rapke, Transcript Record of Proceedings, J.P. Minogue Carey & Moran, Solicitors, 20 Queen Street, Melbourne, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada tanggal 4 Maret 2010, hari Kamis, Pukul 11.15 WIB.)

“Four-Point Move To Deportation Of Mrs.O’Keefe”, National Archive of Australia Collection, “Commonwealth of Australian. Department of Immigration”, FILE OF PAPERS. 49/2/385 Melbourne Sunday, S2/3418 Style Sheet, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

- ” Federal Govt. Assurance On Mrs.O’Keefe No Move Until Case Heard”, National Archive of Australia Collection “ Department of Immigration File Of Papers” 49/2/385. Subject: (Mrs) O’Keefe A. Maas. 3418. Melbourne Herald 15/7/1949, H9/2/5/1949. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat,Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB).
- “High Court Rebuff For Mr. Calwell”, National Archive of Australia Collection, The Sydney Morning Herald”- MARCH,19, 1949. File Department File in Canberra, 21-3-1949, S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.35WIB).
- “Hitch Over Mrs.O’Keefe- To Dutch, She’ S British –Doubt On Powers”, National Archive of Australia Collection,”Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385.Melbourne Herald, 2-2-1949,S2/3418, Style
- “Immigration Restriction Act, Assented to December 23, 1901”. National Archive of Australia Collection, [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada hari senin, tanggal 21 Desember 2009, Pukul.13.15 WIB.
- “Mr. Macken Letter to the Right Hon, J.B. Chifley”.National Archive of Australia Collection. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2009, Pukul 16.05 WIB).
- “ Mrs.Annie Maas O’Keefe & Family Return To The N.E.I”. National Archive of Australia Collection “ Department of Immigration File Of Papers” 49/2/385. Subject: (Mrs) O’Keefe A. Maas. 3418. Commonwealth Migration Officer. to Secretary Dept. of Immigration, Canberra. A.C.T. DEPARTMENT OF IMMIGRATION. 455 COLLINS STREET (Cp. William Street). Melbourne.C.1. 4<sup>th</sup> January, 1949. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat,Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB.)
- “ Mrs Annie O’Keefe, formerly Jacob and eight children – Indonesians – Return to Indonesia”.National Archive of Australia Collection. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Februari 2009, Pukul 15.05 WIB).
- “O’Keefe, Annie Maas – Immigration Act 1901–40”. National Archive of Australia Collection. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 10.15 WIB).
- “O’Keefe Order Seen A Blow To Goodwill Grounds ‘Not Economic’ National

Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. "S2/3418 Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

"O'Keefe Writ-Deportation Fight", National Archive of Australia Collection,"Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. Extract Sydney Morning Herald, 16-2-1949" S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

"O'Keefe Writs Issued In High Court", National Archive of Australia Collection, "Commonwealth of Australian. Department of Immigration. FILE OF PAPERS. 49/2/385. Extract Sydney Daily Telegraph, Morning Herald, 16-2-1949, S2/3418, Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB).

"Opposition Challenged On Immigration", 12-2-1949. National Archive of Australia Collection "Department of Immigration File Of Papers" 49/2/385. Subject: (Mrs) O'Keefe A. Maas. 3418. Canberra Times, 12-2-1949. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05 WIB).

"Secret Ruling on Non European". National Archive of Australia Collection. 20 January 1949, Tasman Heyes, Secretary Department of Immigration Memo to The Secretary of External Affairs. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 8 Mei 2009, Pukul 14.00WIB).

"White Australia Policy Threatened" Calwell's fears on O'Keefe ruling. National Archive of Australia Collection. Melbourne Argus. 24 -3-1949", Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret of 2010, Pukul 15.30WIB).

### **Surat Kabar**

Surat Kabar Merdeka ( Suara Rakyat Republik Indonesia), 3 Februari 1949.

-----, 11 Februari 1949.

### **Buku :**

Bagaric, Mirko, Kim Boyd, Penny Dimopoulos, Sue Tongue dan John Vrachnas. *Migration and Refugee Law in Australia: Cases and Commentary*. Cambridge University Press, 2005.

Barnard, Marjorie. *A History of Australia*. New York: Frederick A. Praeger publishers, 1966.

Birell, Robert dan Tanya Birell. *Australian Studies an Issue of People: Population*

- and Australian Society Second Edition*. Melbourne: Longman Cheshire, 1987.
- Blainey, Geoffrey. *All or Australia*. Adelaide: National Library of Australia, 1984.
- Bolton, Geoffrey. *The Oxford History of Australia, Volume 5*. NSW: Oxford University Press, 1990.
- Clark, Manning. *A Short History of Australia*. Sydney: Mentor, 1963.
- Collins, Jack. *Migrant Hands in a Distant Land: Australia Postwar Immigration*. NSW: Pluto Press Australia, 1988.
- Critchley, Susan. *Hubungan Australia dengan Indonesia (Faktor Geografi, Politik, dan Strategi Keamanan)*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Departement of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs. *Australia and Immigration 1788 to 1988*. Canberra: Australia Government Publishing Service, 1988.
- Encel, S dkk. *Immigrants and Ethnic Groups. Marie de Lepervanche Australian Society Introductory Essays Fourth Edition*. Melbourne: Longman Cheshire, 1984.
- F.S, Stevens, ed. *Racism: The Australian Experience a Study Of Race Prejudice in Australia. Vol.3 Colonialism*. Sydney: Australia and New Zealand Book Company, 1972.
- Gilchrist, J.T dkk, ed. *Eye Witness Selected Documents from Australia's Past*. Adelaide: Rigby Limited, 1968.
- Greenwood, Gordon dan Norman Harper, ed. *Australia in World Affairs 1950-1955*. Sydney: Halstead Press, 1957.
- Hamid, Zulkifli. *Sistem Politik Pemerintahan Australia*. Bandung: LIP FISIP UI dan Rosda Karya, 1999.
- Hardjono, Ratih. *Suku Putihnya Asia (Perjalanan Australia Mencari Jati dirinya)*. Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- *White Tribe of Asia: An Indonesian View of Australia*. Victoria: Hyland House Publishing Pty, Limited, 1993.
- Jupp, James. *Australian Party Politics*. Victoria: Melbourne University Press, 1964.
- Lack, John dan Jaqueline Templeton. *Sources of Australia Immigration History 1901 vol.1*. Victoria: History Departement University of Melbourne, 1988.

- London, H.I. *Northwhite Immigration and The White Australian Policy*. Sydney: Sydney University Press, 1970.
- Lutfi, Tubagus. *Persepsi Australia Tentang Ancaman Indonesia*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1999.
- Markus, Alain. *Australia's Race Relations 1978-1993*. Sidney: Allen & Unwin, 1994.
- McConnochie, Keith dkk. *Race and Racism in Australia*. NSW: Social Science Press, 1989.
- Palfreeman, A.C. *The Administration of The White Australia Policy*. Melbourne University Press, 1967.
- Rivett, Kenneth, ed. *Australia and The Non White Migrant for The Immigration Reform Group*. Victoria: Melbourne University Press, 1975.
- , *Control or Colour Bar?*. Victoria: Melbourne University Press, 1962.
- Schloenhardt, Andreas. *Migrant Trafficking and Regional Security: International Migration and A Thriving Market in Migrant Trafficking Pose Threats to Security in The Asia Pasific Region Forum for Applied Research and Public Policy, Vol.16 No.2*. University Of Tennessee, 2001.
- Sherington, Geoffrey. *Australia Immigrants*. Sydney: George Allen and Unwin, 1982.
- Woodward, D.F, dkk, (eds). *Government, Politics and Power in Australia*. (Edisi ke-5). Melbourne: Melbourne University Press, 1964.
- Willard, Myra. *History of The White Australia Policy 1920*. New York: Augustus M.Kellay Publishers, 1968.
- Yarwood, A.T. *Asia Migration to Australia: The Background to Exclusion 1896-1923*. Melbourne: Melbourne University Press, 1964.

### **Artikel, Hasil Penelitian, dan Karya Ilmiah yang Telah Dipublikasikan**

- Brawley, Sean. "Mrs O'Keefe and the battle for White Australia". Public lecture for the National Archives of Australia, presented in Canberra. 1 June 2006. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 16 Februari 2009, Pukul 10.30 WIB).

Norman, Albert E. "This World...Mrs. O'Keefe Spurs an Alliance". Australasian News Chief of the Christian Science Monitor 12 April 1949. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Rabu , Tanggal 1 April 2009, Pukul 14.15 WIB).

Sornarajah, M. "Deportation Of Aliens And Immigrants From Australia. The International and Comparative Law Quarterly", Vol.34, No.3 (Jul., 1985), pp. 498-521, published Cambridge University Press, British Institute of International and Comparative Law, Style Sheet, [www.jstor.com](http://www.jstor.com), (diunduh pada hari Senin, tanggal 26 April 2010, Pukul 15.15 WIB. )

### **Sumber Internet**

Australian Government Solicitor. "Detention by The Executive History and Constitutional Issues". Style Sheet. [www.ags.gov.au](http://www.ags.gov.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 25 Mei 2009, Pukul 15.05 WIB).

Blackburn, Kevin. "Disguised anti-Colonialism: protest against the White Australia Policy in Malaya and Singapore, 1947-1962". Australian Journal of International Affairs, Vol.55, No.1, pp.101-117, 2001. Style Sheet. [www.google.co.au](http://www.google.co.au), (diunduh pada Hari Selasa, Tanggal 26 Mei 2009, Pukul 15.15 WIB).

Department of Immigration and Ethnic Affairs Fact Sheet 30. "Fifty Years of Post War Migration". Style Sheet. [www.google.co.au](http://www.google.co.au), (diunduh pada Hari Senin, Tanggal 25 Mei 2009, Pukul 16.05 WIB).

Department of Internal Affairs of Australia. "The Australian Commissioner for Malaya to Secretary". Department Despatch No.27, Canberra. Style Sheet. [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), (diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2009, Pukul 15.05 WIB).

The Fairfax Photo Library. "Australian Story: The Annie O'Keefe Story". The Sunny Australia; Making History Models Secondary Units Investigating People and Issues in Australia After World War II. Style Sheet. [www.google.co.au](http://www.google.co.au), (diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2009, Pukul 17.00 WIB).

The Sunny Australia?, "The Annie O'Keefe Story", Making History-Middle Secondary Units (Investigating People and Issues in Australia after World War II), page. 27, [www.google.co.au](http://www.google.co.au), (diunduh pada Hari Minggu, tanggal 28 Februari 2010, Pukul 09.15 WIB.)

York, Barry. "Interview With Lorenzo gamboa, a Filipino National with an Australian Wife Who Was Deported from Australia in 1945 as a Result of The White Australian Policy". National Library of Australia Collection.

Style Sheet. [www.nla.co.au](http://www.nla.co.au), (diunduh pada Hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2009, Pukul 16.25 WIB).

“ Abolition of The White Australia”. Policy Fact Sheet.

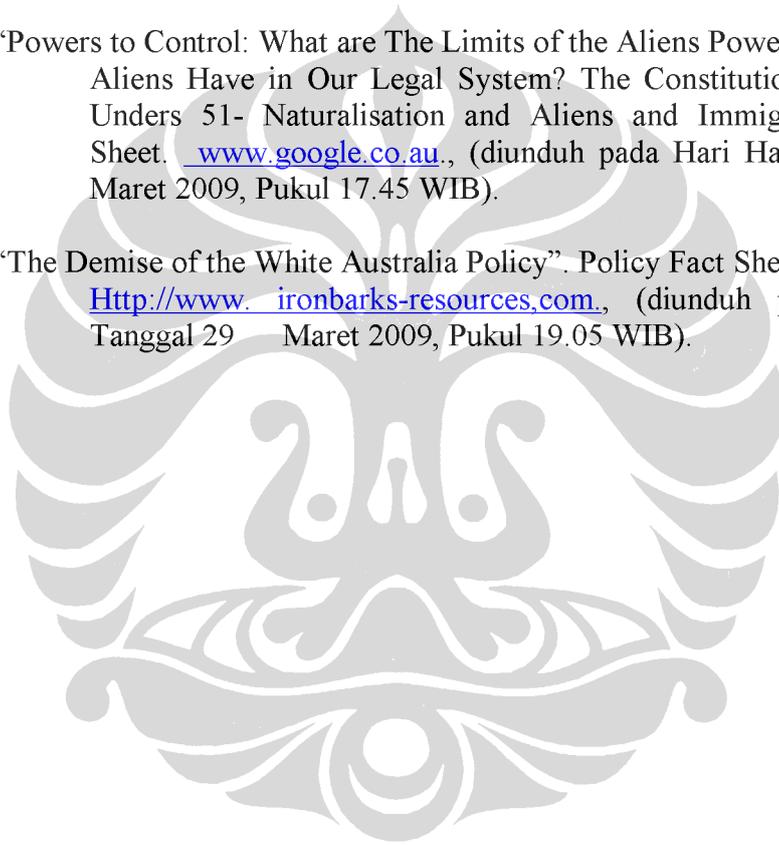
[Http://www.minister.immi.gov.au](http://www.minister.immi.gov.au), (diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Februari 2009, Pukul 11.05 WIB).

“ Immigration to Australia During the 20<sup>th</sup> Century- Historical Impacts on Immigration Intake Population Size and Population Composition- A Twelve”. Policy Fact Sheet, [www.google.co.au](http://www.google.co.au), (diunduh pada Hari Hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2009, Pukul 17.30 WIB).

“Powers to Control: What are The Limits of the Aliens Power?, What Rights do Aliens Have in Our Legal System? The Constitutional Heads of Power Unders 51- Naturalisation and Aliens and Immigration”. Policy Fact Sheet. [www.google.co.au](http://www.google.co.au), (diunduh pada Hari Hari Kamis, Tanggal 5 Maret 2009, Pukul 17.45 WIB).

“The Demise of the White Australia Policy”. Policy Fact Sheet,

[Http://www.ironbarks-resources.com](http://www.ironbarks-resources.com), (diunduh pada Hari Minggu, Tanggal 29 Maret 2009, Pukul 19.05 WIB).



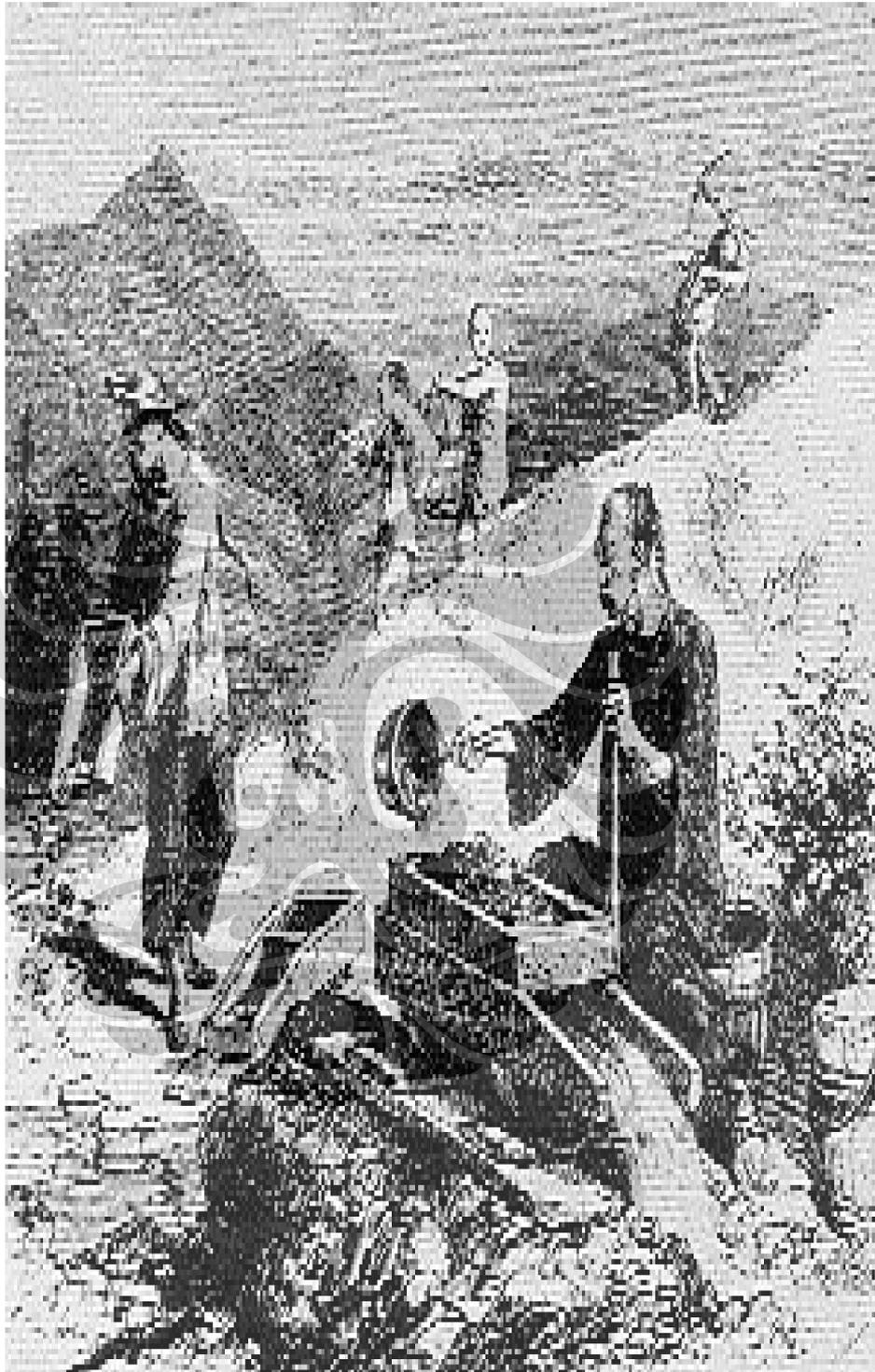
## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Penemuan Emas di Australia



Sumber: [http://en.wikipedia.org/wiki/Australian\\_gold\\_rushes](http://en.wikipedia.org/wiki/Australian_gold_rushes)., diunduh pada hari Selasa, tanggal 6 April 2010, Pukul 10.25 WIB.

**Lampiran 2** ilustrasi cara bekerja orang-orang Cina di ladang emas



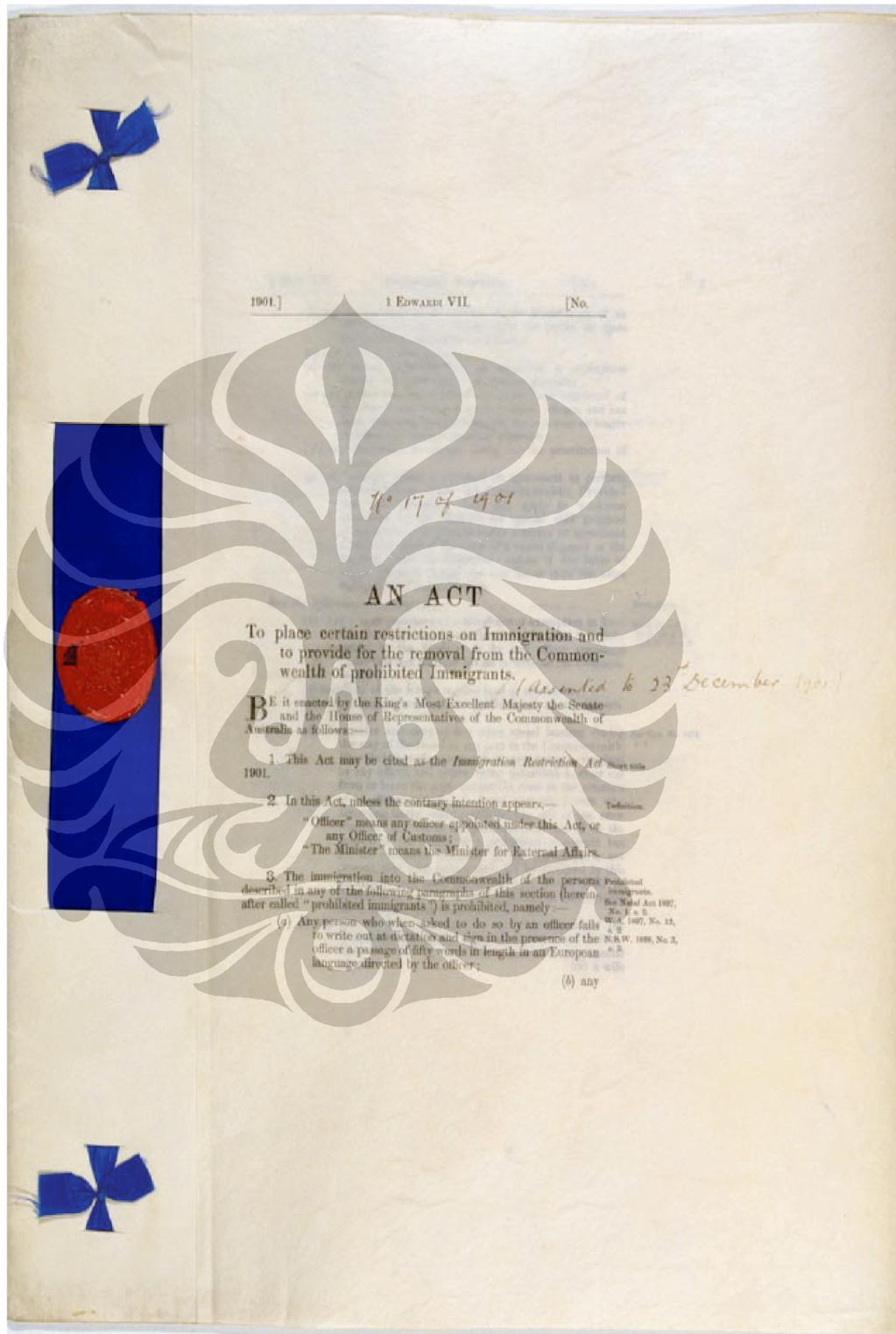
Sumber: <http://members.ozemail.com.au/~natinfo@ozemail.com.au/lambing.htm>, diunduh pada hari Senin, Tanggal 5 April 2010, Pukul 09.15 WIB.

**Lampiran 3** Lencana *White Australia*



Sumber: [http://en.wikipedia.org/wiki/White\\_Australia\\_policy](http://en.wikipedia.org/wiki/White_Australia_policy), diunduh pada hari Senin,  
Tanggal 5 April 2010, Pukul 10.30 WIB

Lampiran 4 *Immigration Restriction Act 1901*



Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada hari Senin, Tanggal 21 Desember 2009, Pukul 13.00 WIB.

- (b) any person likely in the opinion of the Minister or of an officer to become a charge upon the public or upon any public or charitable institution;
- (c) any idiot or insane person;
- (d) any person suffering from an infectious or contagious disease of a loathsome or dangerous character;
- (e) any person who has within three years been convicted of an offence, not being a mere political offence, and has been sentenced to imprisonment for one year or longer therefor, and has not received a pardon;
- (f) any prostitute or person living on the prostitution of others;
- (g) any persons under a contract or agreement to perform manual labour within the Commonwealth: Provided that this paragraph shall not apply to workmen exempted by the Minister for special skill required in Australia or to persons under contract or agreement to serve as part of the crew of a vessel engaged in the coasting trade in Australian waters if the rates of wages specified therein are not lower than the rates ruling in the Commonwealth.

But the following are excepted:—

- (b) Any person possessed of a certificate of exemption in force for the time being in the form in the Schedule signed by the Minister or by any officer appointed under this Act whether within or without the Commonwealth;
- (i) members of the King's regular land or sea forces;
- (j) the master and crew of any public vessel of any Government;
- (k) the master and crew of any other vessel landing during the stay of the vessel in any port in the Commonwealth: Provided that the master shall upon being so required by any officer, and before being permitted to clear out from or leave the port, muster the crew in the presence of an officer; and if it is found that any person, who according to the vessel's articles was one of the crew when she arrived at the port, and who would in the opinion of the officer be a prohibited immigrant but for the exception contained in this paragraph, is not present, then such person shall not be excepted by this paragraph, and until the contrary is proved shall be deemed to be a prohibited immigrant and to have entered the Commonwealth contrary to this Act.
- (l) any person duly accredited to the Government of the Commonwealth by the Imperial or any other Government or sent by any Government on any special mission;
- (m) a wife

Exemptions.

Natal, ib. s. 21.  
W. A. ib. s. 21.  
N. S. W. ib. s. 2.

See Vict. No. 1072.

(w) a wife accompanying her husband if he is not a prohibited immigrant, and all children apparently under the age of eighteen years accompanying their father or mother if the father or mother is not a prohibited immigrant; but so that the exceptions in this paragraph shall not apply if suspended by proclamation; and such suspension may be of general application or limited to any cases or class of cases;

(x) Any person who satisfies an officer that he has formerly been domiciled in the Commonwealth or in any colony which has become a State.

4. A certificate of exemption shall be expressed to be in force for a specified period only, and may at any time be cancelled by the Minister by writing under his hand.

Upon the expiration or cancellation of any such certificate, the person named therein may, if found within the Commonwealth, be treated as a prohibited immigrant offending against this Act:

Provided that in the case of a person entering the Commonwealth from any vessel under this section no penalty shall attach to the vessel or its master owners or charterers.

5. (1) Any immigrant who evades an officer or who enters the Commonwealth at any place where no officer is stationed may if at any time thereafter he is found within the Commonwealth be asked to comply with the requirements of paragraph (a) of section three, and shall if he fails to do so be deemed to be a prohibited immigrant offending against this Act.

(2) Any immigrant may at any time within one year after he has entered the Commonwealth be asked to comply with the requirements of paragraph (a) of section three, and shall if he fails to do so be deemed to be a prohibited immigrant offending against this Act.

6. Any prohibited immigrant within the meaning of paragraph (a) only of section three may if thought fit by an officer be allowed to enter the Commonwealth or to remain within the Commonwealth upon the following conditions—

(a) He shall on entering the Commonwealth or on failing to comply with the requirements of that paragraph deposit with an officer the sum of One hundred pounds.

(b) He shall within thirty days after depositing such sum obtain from the Minister a certificate of exemption in the form of the Schedule, or depart from the Commonwealth, and thereupon the deposit shall be returned; but otherwise the deposit or any part thereof may be forfeited and he may be treated as a prohibited immigrant offending against this Act.

Provided

*Certificate of exemption.*

*Immigrants evading the officers or found within the Commonwealth.*

*Entry permitted on certain conditions. See Natal (L. S. 1) W.A. (L. S. 57) N.S.W.—(L. S. 2)*

Provided that in the case of a person entering the Commonwealth from any vessel under this section no penalty shall attach to the vessel or its master owners or charterers.

Unlawful entry of prohibited immigrants.

7. Every prohibited immigrant entering or found within the Commonwealth in contravention or evasion of this Act shall be guilty of an offence against this Act, and shall be liable upon summary conviction to imprisonment for not more than six months, and in addition to or substitution for such imprisonment shall be liable pursuant to any order of the Minister to be deported from the Commonwealth.

Unlawful entry of prohibited immigrants. See Natal (h. s. 4); W.A. (h. s. 4); N.S.W. (h. s. 4).

Provided that the imprisonment shall cease for the purpose of deportation, or if the offender finds two approved sureties each in the sum of Fifty pounds for his leaving the Commonwealth within one month.

8. Any person who is not a British subject either natural born or naturalized under a law of the United Kingdom or of the Commonwealth or of a State, and who is convicted of any crime of violence against the person, shall be liable, upon the expiration of any term of imprisonment imposed on him therefor, to be required to write out at dictation and sign in the presence of an officer a passage of fifty words in length in an European language directed by the officer, and if he fails to do so shall be deemed to be a prohibited immigrant and shall be deported from the Commonwealth pursuant to any order of the Minister.

Certain persons may be deported.

9. The master, owners, and charterers of any vessel from which any prohibited immigrant enters the Commonwealth contrary to this Act shall be jointly and severally liable to a penalty not exceeding One hundred pounds for each prohibited immigrant so entering the Commonwealth.

Penalty on masters and owners of ships.

Provided that in the case of an immigrant of European race or descent no penalty shall be imposed under this section on any master owner or charterer who proves to the satisfaction of the Court that he had no knowledge of the immigrant being landed contrary to this Act, and that he took all reasonable precautions to prevent it.

Natal (h. s. 4); W.A. (h. s. 4); N.S.W. (h. s. 4).

10. (1) The Minister, or any Collector of Customs specially empowered by him, may by writing under his hand authorize any officer to detain any vessel from which any prohibited immigrant has, in the opinion of the officer, entered the Commonwealth contrary to this Act; and the vessel may then be detained either at the place where she is found, or at any place to which the Minister or Collector may order her to be brought. The Minister or such Collector shall forthwith give notice to the owner or agent of the vessel of the detention of such vessel.

Detention of vessel. See Vol. No. 1072 s. 14.

(2) For

(lanjutan)

(2) For the purposes of the detention and other lawful dealing with the vessel the officer so authorized shall be entitled to obtain such writ of assistance or other aid as is provided under any law relating to the Customs with respect to the seizure of vessels or goods.

Powers of detaining officer.

(3) The detention shall be for safe custody only, and shall cease if a bond with two sufficient sureties to the satisfaction of the Minister or the collector be given by the master owners or charterers of the vessel for the payment of any penalty which may be adjudged under this Act to be paid for the offence or default.

Detention to cease if bond given.

(4) If default is made in payment of any such penalty, the officer may seize the vessel; and the like proceedings shall thereupon be taken for forfeiting and condemning the vessel as in the case of a vessel seized for breach of any law relating to the Customs, and the vessel shall be sold.

Seizure of vessel on default.

(5) The proceeds of the sale shall be applied first in payment of the penalty and of all costs incurred in and about the sale and the proceedings leading thereto, and the balance shall be paid to the owners or other persons lawfully entitled to the vessel before condemnation and sale.

Application of proceeds.

11. No contract or agreement made with persons without the Commonwealth for such persons to perform manual labour within the Commonwealth whereby such persons become prohibited immigrants within the meaning of paragraph (g) of section three shall be enforceable or have any effect.

Contracts for manual labour when enforceable.

12. (1) Any person who in any way wilfully assists any other person to contravene or attempt to contravene any of the provisions of this Act, or makes or authorizes any contract or agreement the performance of which would be a contravention of this Act, shall be guilty of an offence against this Act.

Assisting persons to contravene Act. See Natal ib. s. 11, N.S.W. ib. s. 10.

(2) Any person who makes or authorizes such contract or agreement shall be liable to the Commonwealth for any expense incurred by the Commonwealth in respect of any immigrant prohibited by reason of the contract or agreement.

13. Any person who is wilfully instrumental in bringing or attempting to bring into the Commonwealth any idiot or insane person contrary to this Act shall, in addition to any other penalty, be liable to the Commonwealth for any expense in respect of the maintenance of the idiot or insane person whilst within the Commonwealth.

Bringing idiots or insane persons into the Commonwealth. See Natal ib. s. 12; W.A. ib. s. 13.

14. Every member of the police force of any State, and every officer, may with any necessary assistance prevent any prohibited immigrant or person reasonably supposed to be a prohibited immigrant, from entering the Commonwealth, and may take all legal proceedings necessary for the enforcement of this Act.

Power to enforce Act. See Natal ib. s. 14; W.A. ib. s. 14; N.S.W. ib. s. 11.

15. Subject

(lanjutan)

15. Subject to any Act relating to the public service, the Governor-General may appoint officers for carrying out this Act, and may prescribe their duties.

Appointment of officers.  
See Statute (h. a. 12);  
W.A. (h. a. 15);  
N.S.W. (h. a. 13).  
Regulations.

16. (1) The Governor-General may make regulations for carrying out this Act and for empowering officers to determine whether any person is a prohibited immigrant.

(2) All such regulations shall be notified in the *Gazette*, and shall thereupon have the force of law.

(3) All such regulations shall be laid before both Houses of the Parliament within thirty days after the making thereof if the Parliament be then sitting, and if not then within thirty days after the next meeting of the Parliament.

17. The Minister shall cause to be made annually a return which shall be laid before Parliament, showing the number of persons refused admission into the Commonwealth on the ground of being prohibited immigrants, the nations to which they belong and whence they came, and the grounds on which admission was refused; the number of persons who passed the test prescribed by paragraph (a) of section three, the nations to which they belong and whence they came; the number of persons admitted to the Commonwealth without being asked to pass the test, the nations to which they belong, and whence they came.

Annual return showing persons refused admission.

18. Where no higher penalty is expressly imposed, a person guilty of any offence against this Act, or against any regulation made thereunder, shall be liable on summary conviction to a penalty not exceeding Fifty pounds, and in default of payment to imprisonment with or without hard labour for any period not exceeding three months.

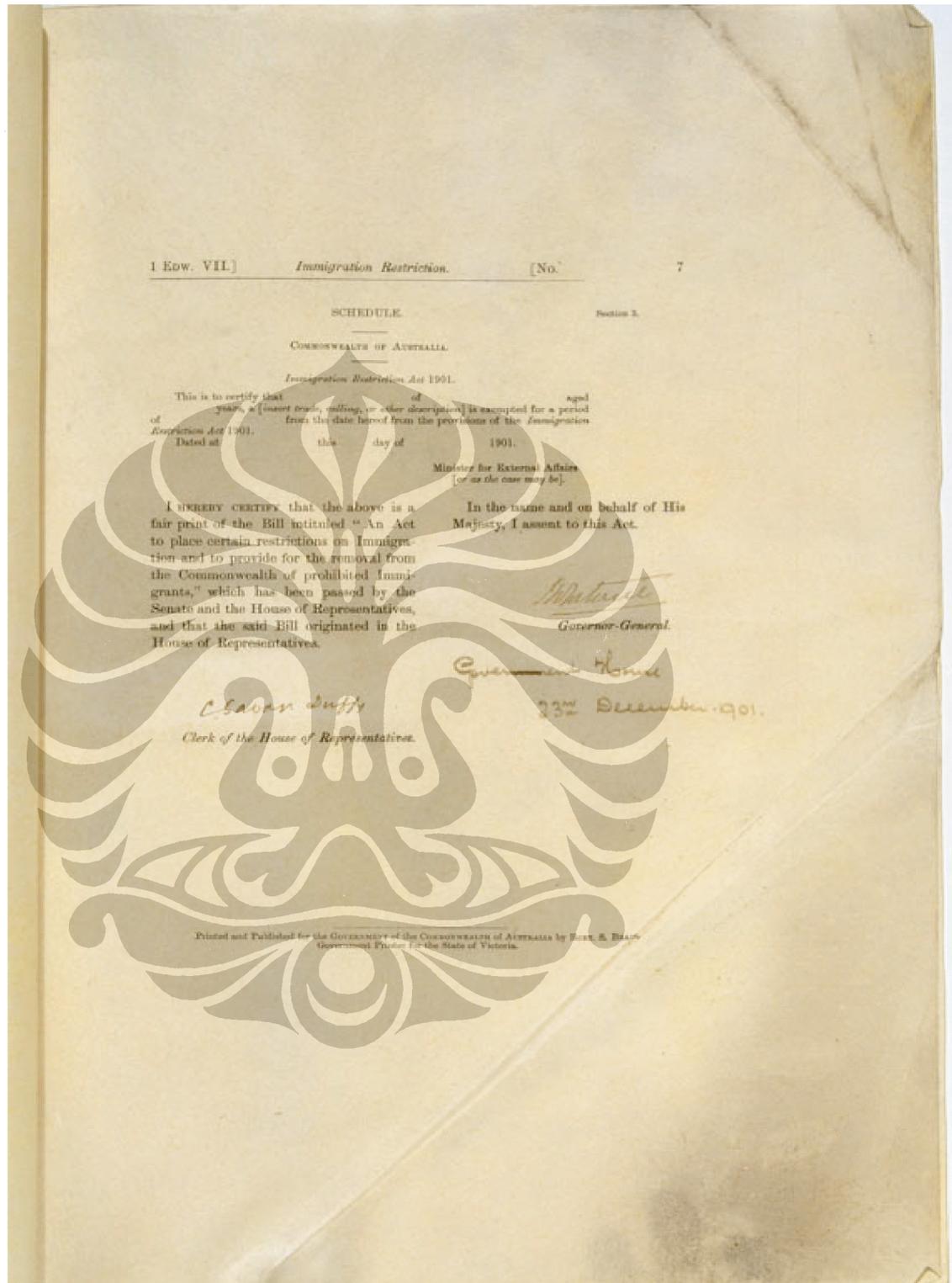
Penalty.

19. This Act shall not apply to the immigration of Pacific Island labourers under the provisions of the Pacific Island Labourers Acts, 1880-1892, of the State of Queensland.

Pacific Island Labourers Acts of Queensland.

SCHEDULE.

(lanjutan)

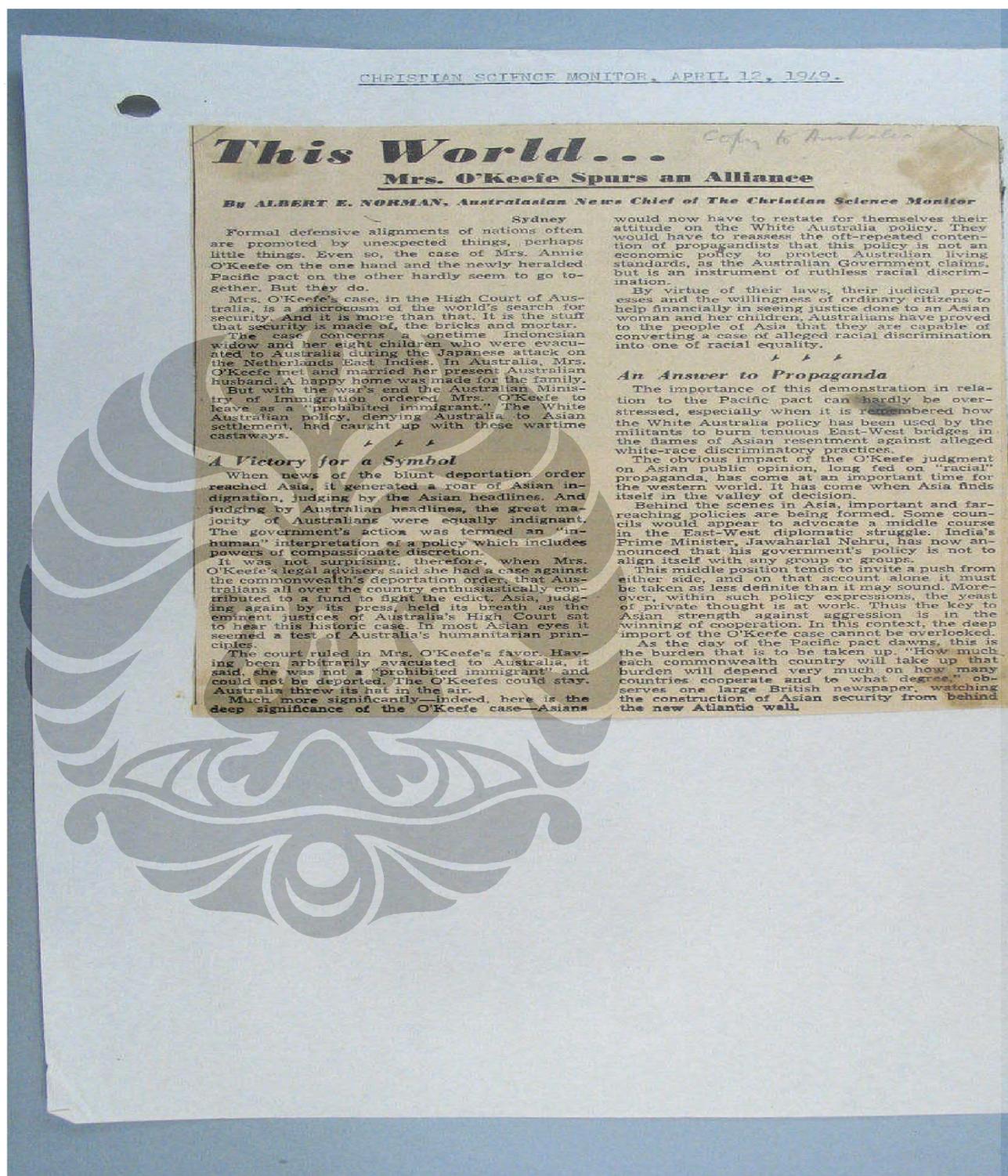


**Lampiran 5** Kedatangan Para Imigran dari Eropa Dalam Program *Assisted Immigration* Tahun 1947



Sumber: <http://www.hyperhistory.org>, diunduh pada hari Senin, Tanggal 5 April 2010, Pukul 12.30 WIB.

Lampiran 6. Artikel dukungan salah satu masyarakat Australia terhadap perjuangan Mrs. Annie O'Keefe.



CHRISTIAN SCIENCE MONITOR, APRIL 12, 1949.

## This World... Mrs. O'Keefe Spurs an Alliance

By ALBERT E. NORMAN, Australasian News Chief of The Christian Science Monitor

Sydney  
Formal defensive alignments of nations often are promoted by unexpected things, perhaps little things. Even so, the case of Mrs. Annie O'Keefe on the one hand and the newly heralded Pacific pact on the other hardly seem to go together. But they do.

Mrs. O'Keefe's case, in the High Court of Australia, is a microcosm of the world's search for security. And it is more than that. It is the stuff that security is made of, the bricks and mortar.

The case concerns a sometime Indonesian widow and her eight children who were evacuated to Australia during the Japanese attack on the Netherlands East Indies. In Australia, Mrs. O'Keefe met and married her present Australian husband. A happy home was made for the family.

But with the war's end the Australian Ministry of Immigration ordered Mrs. O'Keefe to leave as a "prohibited immigrant." The White Australian policy, denying Australia to Asian settlement, had caught up with these wartime castaways.

### A Victory for a Symbol

When news of the blunt deportation order reached Asia, it generated a roar of Asian indignation, judging by the Asian headlines. And judging by Australian headlines, the great majority of Australians were equally indignant. The government's action was termed an "inhuman" interpretation of a policy which includes powers of compassionate discretion.

It was not surprising, therefore, when Mrs. O'Keefe's legal advisers said she had a case against the commonwealth's deportation order, that Australians all over the country enthusiastically contributed to a fund to fight the edict. Asia, judging again by its press, held its breath as the eminent justices of Australia's High Court sat to hear this historic case. In most Asian eyes it seemed a test of Australia's humanitarian principles.

The court ruled in Mrs. O'Keefe's favor. Having been arbitrarily avacuated to Australia, it said, she was not a "prohibited immigrant" and could not be deported. The O'Keefes could stay. Australia threw its hat in the air.

Much more significantly—indeed, here is the deep significance of the O'Keefe case—Asians

would now have to restate for themselves their attitude on the White Australia policy. They would have to reassess the oft-repeated contention of propagandists that this policy is not an economic policy to protect Australian living standards, as the Australian Government claims, but is an instrument of ruthless racial discrimination.

By virtue of their laws, their judicial processes and the willingness of ordinary citizens to help financially in seeing justice done to an Asian woman and her children, Australians have proved to the people of Asia that they are capable of converting a case of alleged racial discrimination into one of racial equality.

### An Answer to Propaganda

The importance of this demonstration in relation to the Pacific pact can hardly be overstressed, especially when it is remembered how the White Australia policy has been used by the militants to burn tenuous East-West bridges in the flames of Asian resentment against alleged white-race discriminatory practices.

The obvious impact of the O'Keefe judgment on Asian public opinion, long fed on "racial" propaganda, has come at an important time for the western world. It has come when Asia finds itself in the valley of decision.

Behind the scenes in Asia, important and far-reaching policies are being formed. Some councils would appear to advocate a middle course in the East-West diplomatic struggle. India's Prime Minister, Jawaharlal Nehru, has now announced that his government's policy is not to align itself with any group or groups.

This middle position tends to invite a push from either side, and on that account alone it must be taken as less definite than it may sound. Moreover, within such policy expressions, the yeast of private thought is at work. Thus the key to Asian strength against aggression is in the winning of cooperation. In this context, the deep import of the O'Keefe case cannot be overlooked.

As the day of the Pacific pact dawns, this is the burden that is to be taken up. "How much each commonwealth country will take up that burden will depend very much on how many countries cooperate and to what degree," observes one large British newspaper, watching the construction of Asian security from behind the new Atlantic wall.

Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Rabu, Tanggal 1 April 2009, Pukul 14.15 WIB.

**Lampiran 7. Foto keluarga O'Keefe**



**John O'Keefe, Annie O'Keefe and five children**

Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 13.15 WIB.

**Lampiran 8. Foto A.A.Calwell**



Arthur Calwell, Minister for Immigration, 1945-49.

Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 13.15 WIB.

**Lampiran 9.** Foto Perdana Menteri J.B.Chifley



Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 13.15 WIB.

**Lampiran 10. Foto Robert Menzies**



Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 13.15 WIB.

Lampiran 11. Contoh Certificate of Exemption

16/54

Book No. 224

Form No. 21. COMMONWEALTH OF AUSTRALIA. No. 005  
Immigration Act 1901-1912 and Regulations.

### CERTIFICATE EXEMPTING FROM DICTATION TEST.

I, William Henry Langford the Collector of Customs for the State of Northern Territory of Australia in the said Commonwealth, hereby certify that Florence Lee Hang Gung hereinafter described, who is leaving the Commonwealth temporarily, will be exempted from the provisions of paragraph (a) of Section 3 of the Act if he returns to the Commonwealth within a period of 3 months from this date.

Date SEP - 6 1916 to W. H. Langford  
Collector of Customs.

DESCRIPTION.	
Nationality <u>Chinese (Quebec born)</u>	Birthplace <u>Darwin</u>
Age <u>16 years</u>	Complexion <u>Pale</u>
Height <u>5 feet 4 inches</u>	Hair <u>Black</u>
Build <u>slight</u>	Eyes <u>dark brown</u>
Particular marks <u>1 scar tip of fore finger left hand (see impression)</u> (For impression of hand see back of this document.)	

PHOTOGRAPHS

Full Face:— Profile:—



Florence Lee Hang Gung



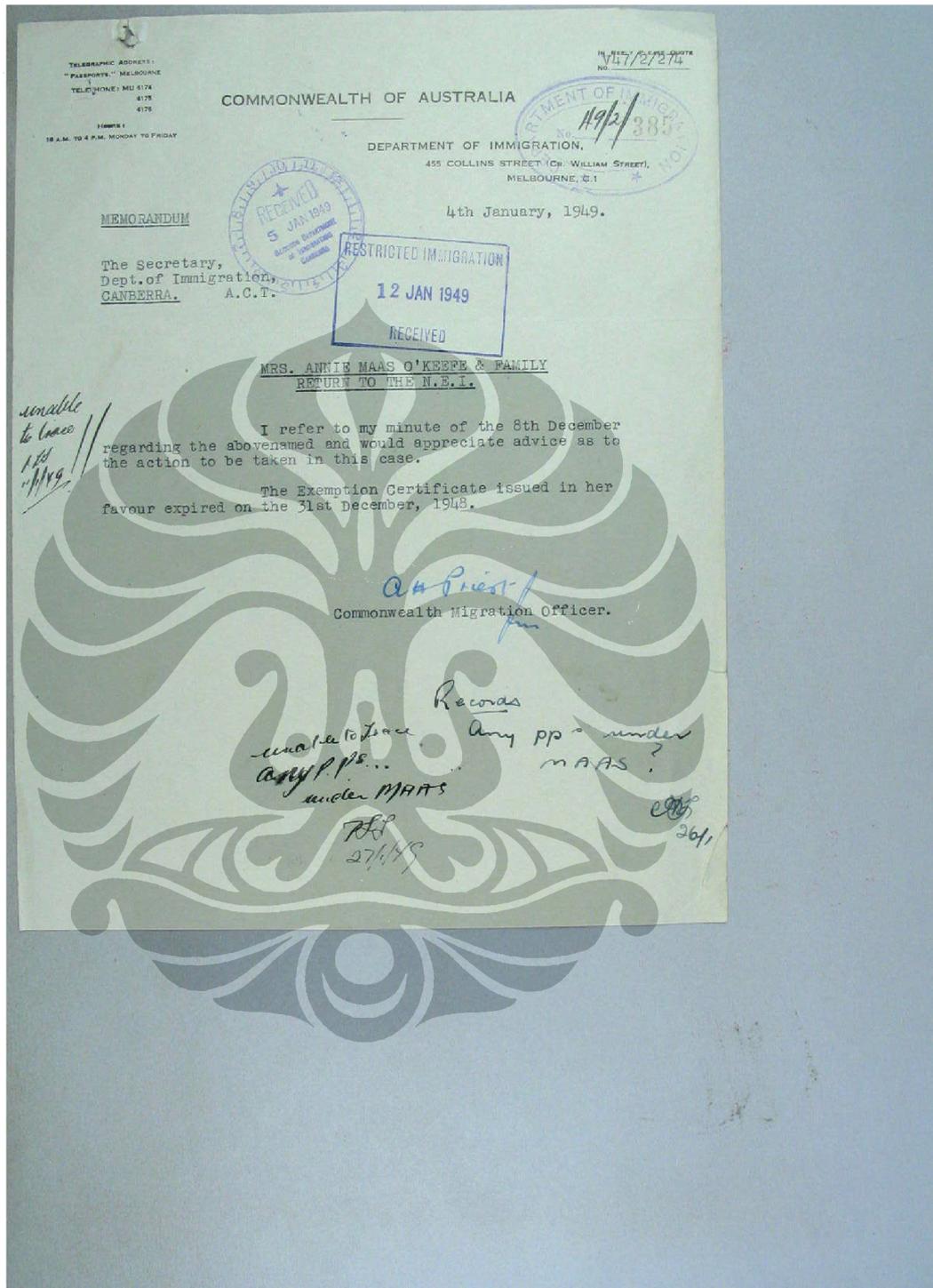
Florence Lee Hang Gung

Date of departure 9/9/16 Port of Embarkation Darwin  
 Ship SS Eastern Destination China  
 Date of return 2/9/17 Ship SS Changsha  
 Port Darwin W. H. Langford  
Customs Officer.

A. 214/2.14—C. 2503

Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 13.15 WIB

Lampiran 12. Surat Deportasi dari Pemerintah Australia terhadap Mrs. Annie O'Keefe



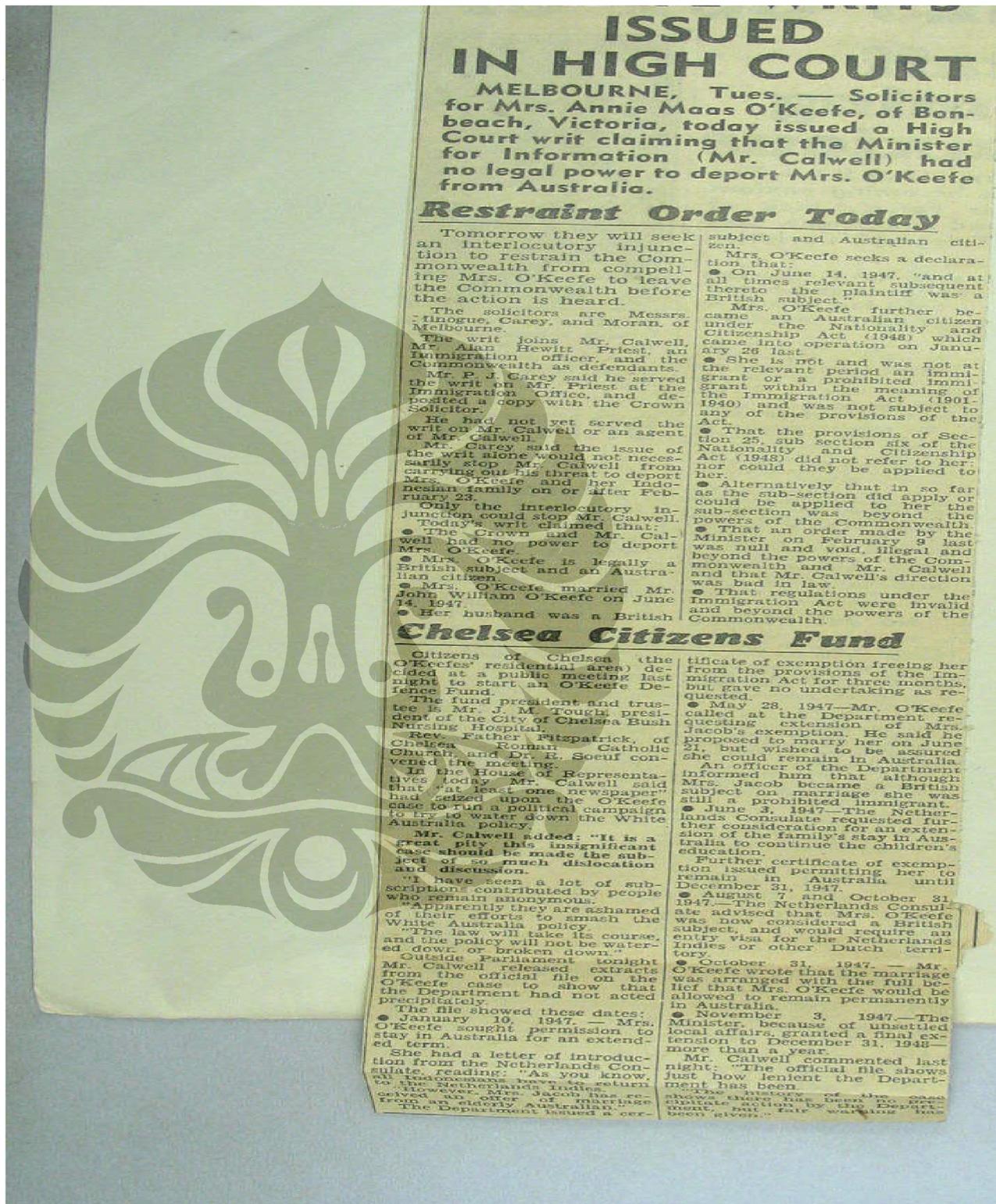
Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009, Pukul 14.05 WIB

Lampiran 13. Argumen Calwell terhadap kasus O'Keefe



Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

## Lampiran 14. Argumen O'Keefe terhadap kebijakan deportasi



Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

## Lampiran 15. Perdebatan antara pihak O'Keefe dan Pihak Calwell

has put, what we put on 4 is having a certificate you do not become a member of the community, but that is not as a matter of law but as a matter of fact.

McTIERNAN, J.: Is it not a matter of law that the facts whatever they were are the facts contemplated by the Act?

MR. TAIT: If a jury found that a person had a certificate and still found that person was a member of the community it would be a matter for consideration.

DIXON, J.: I find it very difficult to understand the particular view described to Mr. Justice Isaacs. Section 5 seems to be one of the Sections directed to preventing people becoming a part of the community. It says within five years dictation tests may be read to him and if he fails out he goes; and that is a measure directed to preventing a person becoming a member of the Australian community. It is difficult for me to understand.

WILLIAMS, J.: Does it not set up a reasonable period of probation?

MR. TAIT: I think it does. Because it appears in the Act I think so far as Parliament is concerned that 5 years is a reasonable time in which a person be held up as it were and being an immigrant prevented from being a part of the community. The only case in which this Court I think has had to consider as a matter of fact on the facts before it whether a particular person has become a member of the community is Walsh and Johnson.

McTIERNAN J.: Johnson I think.

MR. TAIT: Yes - the only time this Court has said "You are a member of the community." He was naturalized here and was here 14 years.

DIXON, J.: The majority of the Court said it had nothing to do with immigration.

MR. TAIT: My friend is taking a case that whatever may be the position under the Act, a period of waiting five years, or suspension of intermingling with the community, what you have got is a woman coming here when the Japanese were knocking at the door and were overrunning her own country and she got here and those conditions operated for quite a time and the question of repatriation was difficult to accomplish.

McTIERNAN, J.: You say she was seeking a sanctuary, not a home in those circumstances.

MR. TAIT: Yes. To say that by January 1947 she had to become a member of the Australian community seems to be to stretch it enormously. When you add to that the matter of having a certificate, the provision of five years in Section 5(2), the fact that a few months before this she was apparently willing to go - it was only because Indonesia was too unsettled - and when you consider the facts as to what happened in January when she went along and interviewed the immigration officer, and when my friend - who seems to know something about the Public Service - seems to think the immigration officer more or less forced a certificate on her; that she made inquiries through her husband of the Dutch authorities as to what would happen if she did marry - when you add those things

Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 27 Maret 2009, Pukul 10.15 WIB.

(lanjutan)

it takes on another aspect. She said in January when O'Keefe made her an offer of marriage, that she did not decide until six months after that. She was not married until June and an extension was given. In all those circumstances to say that in January she had become a member of the Australian community seems to me to be a position that could not be accepted.

I do not propose to debate that further. There is one other matter I have to deal with further.

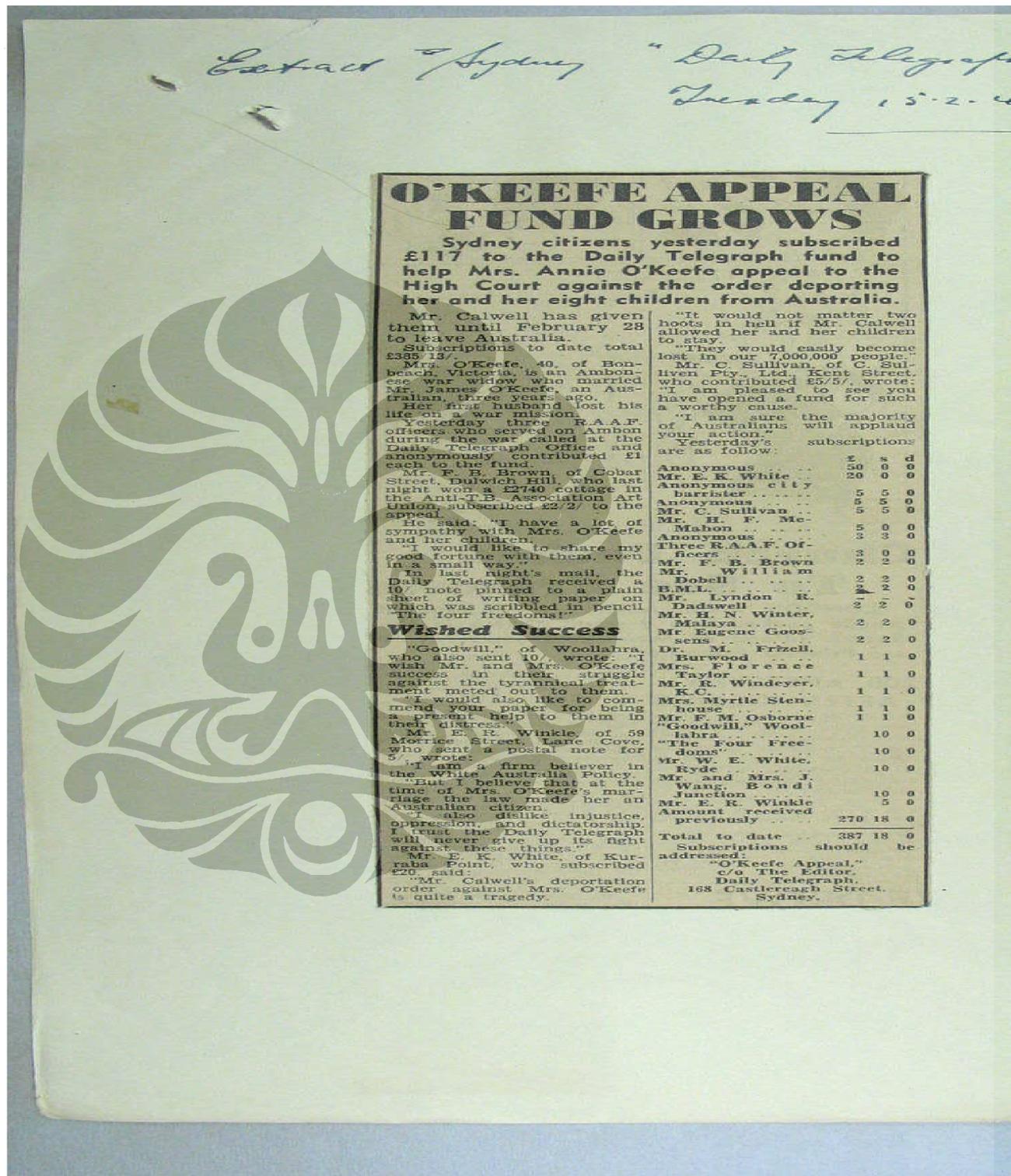
LATHAM, C.J.: That I presume is judicial power.

MR. TAIT: Yes.

LATHAM, C.J.: Doubtless Mr. Shell will reply to the .

THE COURT AT 4.30 P.M. ADJOURNED UNTIL THE  
FOLLOWING DAY, WEDNESDAY, 2ND MARCH, 1949,  
AT 10.30 A.M.

Lampiran 16. Daftar nama donatur warga kota Sydney dalam acara pengumpulan dana koran Sydney Daily Telegraph terhadap keluarga O'Keefe.



**O'KEEFE APPEAL FUND GROWS**

Sydney citizens yesterday subscribed £117 to the Daily Telegraph fund to help Mrs. Annie O'Keefe appeal to the High Court against the order deporting her and her eight children from Australia.

Mr. Calwell has given them until February 28 to leave Australia.

Subscriptions to date total £385 13/6.

Mrs. O'Keefe, 40, of Bonbrach, Victoria, is an Ambonese war widow who married Mr. James O'Keefe, an Australian, three years ago.

Her first husband lost his life on a war mission.

Yesterday three R.A.A.F. officers who served on Ambon during the war called at the Daily Telegraph Office and anonymously contributed £1 each to the fund.

Mr. F. B. Brown of Gobarr Street, Dulwich Hill, who last night won a £2740 cottage in the Anti-T.B. Association Art Union, subscribed £2 2/ to the appeal.

He said: "I have a lot of sympathy with Mrs. O'Keefe and her children. I would like to share my good fortune with them, even in a small way."

In last night's mail, the Daily Telegraph received a 10/- note pinned to a plain sheet of writing paper on which was scribbled in pencil "The four freedoms!"

**Wished Success**

"Goodwill" of Woollahra, who also sent 10/- wrote: "I wish Mr. and Mrs. O'Keefe success in their struggle against the tyrannical treatment meted out to them. I would also like to commend your paper for being a present help to them in their distress."

Mr. E. R. Winkle of 59 Morrice Street, Lane Cove, who sent a postal note for 5/- wrote:

"I am a firm believer in the White Australia Policy. But I believe that at the time of Mrs. O'Keefe's marriage the law made her an Australian citizen. I also dislike injustice, oppression, and dictatorship. I trust the Daily Telegraph will never give up its fight against these things."

Mr. E. K. White, of Kur-raba Point, who subscribed £20 said:

"Mr. Calwell's deportation order against Mrs. O'Keefe is quite a tragedy.

"It would not matter two hoots in hell if Mr. Calwell allowed her and her children to stay. They would easily become lost in our 7,000,000 people."

Mr. C. Sullivan of C. Sullivan Pty., Ltd, Kent Street, who contributed £5/5/, wrote: "I am pleased to see you have opened a fund for such a worthy cause."

"I am sure the majority of Australians will applaud your action."

Yesterday's subscriptions are as follow:

	£	s	d
Anonymous	50	0	0
Mr. E. K. White	20	0	0
Anonymous city	5	5	0
barbister	5	5	0
Anonymous	5	5	0
Mr. C. Sullivan	5	5	0
Mr. H. K. Mc-			
Mahon	5	0	0
Anonymous	3	3	0
Three R.A.A.F. Of-			
ficers	3	0	0
Mr. F. B. Brown	2	2	0
Mr. William	2	2	0
Dobell	2	2	0
B.M.L.	2	2	0
Mr. Lyndon R.	2	2	0
Dadswell	2	2	0
Mr. H. N. Winter,	2	2	0
Malaya	2	2	0
Mr. Eugene Goos-	2	2	0
sens	2	2	0
Dr. M. Frzell,	1	1	0
Burwood	1	1	0
Mrs. Florence	1	1	0
Taylor	1	1	0
Mr. R. Windeyer,	1	1	0
K.C.	1	1	0
Mrs. Myrtle Sten-	1	1	0
house	1	1	0
Mr. M. Osborne	1	1	0
"Goodwill" Wool-	10	0	0
lahra	10	0	0
"The Four Free-	10	0	0
doms"	10	0	0
Mr. W. E. White,	10	0	0
Ryde	10	0	0
Mr. and Mrs. J.	10	0	0
Wang, Bondi	10	0	0
junction	5	0	0
Mr. E. R. Winkle	5	0	0
Amount received	270	18	0
previously			
Total to date	387	18	0
Subscriptions should be			
addressed:			
"O'Keefe Appeal,"			
c/o The Editor,			
Daily Telegraph,			
168 Castlereagh Street,			
Sydney.			

Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30WIB.

Lampiran 17. Daftar Nama Donatur karyawan Cafe yang membantu pengumpulan dana bagi keluarga O'Keefe.



Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Senin, Tanggal 22 Maret 2010, Pukul 15.30 WIB



Lampiran 19. Surat salah satu pendukung O'Keefe kepada Perdana Menteri  
Chifley.

110 George St  
Paramatta  
6.2.49

The Prime Minister  
Canberra

Dear Sir,

I write to you to protest  
against the pending deportation of  
Mrs O'Keefe  
I am a Labor voter of many  
years standing and have never  
wished to vote otherwise.  
Mr. Baillie's arrogant and  
inhumane administration in the  
case of the fourteen Japanese who  
were deported, and later the "hawaii  
girls" episode disgusted me; but  
now the O'Keefe case has caused  
me to swear to vote against Labor  
as a lesson to the party.  
No political party can afford to  
offend the "colored vote", and whilst  
there is a necessity of this section  
in this country, there must be  
~~many~~ <sup>many</sup> who are sympathetic to those  
unwanted people on humane principle.  
Can you afford to lose our votes?  
Yours sincerely,  
(Mr) F. MACHEN

Sumber: [www.naa.gov.au](http://www.naa.gov.au), diunduh pada Hari Jumat, Tanggal 20 Maret 2009 2009, Pukul 14.05  
WIB.

**Lampiran 20. Pidato Calwell Yang Membahas Revisi Immigration Act 1949 dan  
War Time Refugee Removal Act 1949**

**169 Cabinet Submission by Calwell**

**Agendum 1580 CANBERRA, 31 March 1949**

**PROPOSED AMENDMENT OF THE IMMIGRATION ACT**

The effect of the majority judgment of the High Court in the case of Mrs. O'Keefe is that if a person is admitted to Australia without being subjected at the time of entry to any of the tests laid down in Section 3 of the Immigration Act he is not a prohibited immigrant. In such circumstances a person cannot lawfully be given a certificate of exemption [1] authorising him to remain in the Commonwealth unless he has been subjected to, and failed to pass, a dictation test under Section 5(2) of the Act. Under that Section the test can only be applied within five years from the date of a person's arrival in Australia.

2. For years past the certificates of exemption have been issued in preference to the dictation test as a means of controlling non-European immigration to Australia, because it was considered a more generous and tactful means of achieving the purpose of our restricted immigration policy.

3. The High Court's judgment removes from the Immigration Department's jurisdiction control over approximately four thousand non-Europeans who are now here on certificates of exemption. It also affects the Department's position in relation to thousands of displaced persons and other Europeans who have been admitted under certificates of exemption to ensure that they will remain in the employment to which they are allotted during their probationary period.

4. The non-Europeans include seamen, evacuees, amahs, overseas and local traders, assistants and substitutes for such traders, students, together with their wives and children. Seamen and evacuees were admitted during the war period on humanitarian grounds on the understanding that they would be returned to their own countries after the conclusion of hostilities.

5. In 1945 (18th June) Cabinet, in considering representations made by the Chinese Ambassador, Dr. Hsu Mo, that the certificates of exemption of certain categories of Chinese should be extended for three years, decided in giving approval for the extension of such certificates to reduce the period to two years, thereby making them effective only to the 30th June, 1947. War-time evacuees, seamen and other Asiatics were also dealt with in conformity with this decision. This concession was granted primarily on the grounds that owing to the shortage of shipping it was not practicable to arrange the repatriation of these people. The shortage of shipping continued and it was not possible due to this and other causes, to remove all wartime evacuees and seamen by June, 1947. Of the 6,269 evacuees and seamen who came here 5,473 left voluntarily, including approximately 3,700 Indonesians, 1,500 Chinese and ten Malays.

Sumber: <http://www.info.dfat.gov.au>, diunduh pada Tanggal 24 Mei 2010 Pukul 14.45 WIB

(Lanjutan)

6. It is the hard core of resisters consisting of approximately 800 Chinese and Indonesians who are now fighting the Government to prevent repatriation to their own countries. So far the High Court has upheld the appeal of one Indonesian, Mrs. Annie O'Keefe, and has granted temporary injunctions in the cases of three Chinese. Under the

law as it now stands, all war-time evacuees will be permitted to remain for permanent residence, a development never foreseen or even contemplated. In the whole period of nearly 50 years of Federation, no more than a couple of hundred Asiatics have been allowed to remain permanently and those only under conditions that had some relationship to their settlement here because of circumstances entirely different from those of war-time evacuees. In this connection it is interesting to note that, when I announced, after I became Minister for Immigration, that all Chinese evacuees and refugees must return to China, a Chinese Government spokesman at Nanking said that China would welcome the return of such nationals to their homeland and no representations have been made by Chinese diplomatic circles that any such Chinese citizens should be permitted to remain. Our trouble is not with the Chinese Government or, in fact, with any other Asiatic Government, but only with the individuals concerned.

7. The other classes of non-Europeans (mainly Chinese) were admitted under exemption in accordance with arrangements entered into with certain Eastern countries. Non-Europeans admitted under these arrangements are required to comply with certain standards laid down in regard to extent of trade done, class of employment, attendance at approved schools, etc., to enable them to remain here.

8. All of these people were admitted without being declared prohibited immigrants at the time of entry and were granted certificates of exemption after they had landed. According to the High Court judgment those certificates of exemption are ineffective. In the case of non-Europeans the great majority have been here for more than five years and cannot now be subjected to a dictation test and declared prohibited immigrants. It is not, therefore, possible under existing legislation to exercise any control over the great majority of non-Europeans now here or to take action for their removal from the Commonwealth. In the case of displaced persons and others who have been here less than five years it would be necessary in order to enable control to be retained over them to subject each one to a dictation test and, on failure to pass it, to issue them with certificates of exemption afresh.

9. The judgment will also affect the Department's administrative procedure in relation to future applications for the admission of non-Europeans, displaced persons and other aliens because to ensure that control can be retained over such persons it will be necessary to have them declared prohibited immigrants at the time of entry or alternatively to apply a dictation test shortly after landing before they can be issued with exemption certificates. Either procedure would be objectionable in principle and would cause difficulty in administration.

10. It is abundantly clear, therefore, if the principles which have underlaid our established immigration policy for 48 years are to be preserved and we are to retain a full measure of control over those admitted to our shores that action must be taken forthwith to validate the position as regards certificates of exemption which have been issued to those already here and those who may arrive in future. If action is not taken, our

Restricted Immigration Policy (known popularly as the White Australia Policy) will, to all intents and purposes, become impossible of application.

11. The matter which is one of urgency has been discussed with the Attorney-General's Department and that Department is of the opinion that this can be achieved by an amendment of the Immigration Act on the following lines-

(i) Section 4 of the Act to be amended to provide that certificates may be validly issued in future without first applying a dictation test; and (ii) the inclusion of a new clause declaring that certificates already issued should be deemed to have been issued under the Act as proposed to be amended. The views of Counsel in regard to the matter will be obtained before the amending legislation is drafted.

12. Recommendation Recommended that- (i) subject to legal advice, I be authorised to introduce during the forthcoming session of Parliament a Bill to amend the Immigration Act which will validate the position both as regards certificates of exemption already granted and those which may be issued in future; and (ii) in the event of advice being received that legislation under (i) above would be of doubtful validity, particularly as regards its retrospective features, be authorised to introduce, either as an alternative or as complementary, a special Aliens Act covering wartime evacuees or an amendment of the Aliens Deportation Act to enable action to be taken for the deportation of those aliens who entered the Commonwealth during the war period who are not eligible under existing immigration policy to remain here for permanent residence. [2]

*1 The certificates exempted the holders from the provisions of the Act, enabling them to enter Australia for a specific period.,*

*2 Cabinet approved the recommendations on 7 April 1949.*

[AA:A2700, VOL. 37]